BAB - IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bab ini akan menyajikan informasi program dan kegiatan serta alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2014. Secara detail penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

A. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Pendidikan

Urusan wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja pelaksana urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
   - Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah
   - Penambahan Ruang Kelas Sekolah
   - Pembangunan Taman, Lapngan Upacara dan Fasilitas Parkir
   - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
   - Rehabilitasi sedang/berat ruangn kelas sekolah
   - Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini
   - Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
   - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (banprov)
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
   - Pembangunan Gedung Sekolah
   - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru,dan Penjaga Sekolah
   - Penambahan Ruang Kelas Sekolah

- Pembangunan Laboraturium dan ruang praktikum sekolah
- Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
- Pembangunan ruang serba guna/aula
- Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
- Pembangunan ruang ibadah
- Pembangunan perpusatakaan sekolah
- Pembangunan sarana air bersih dan sanitary.
- Pengadaan pakaian seragam sekolah
- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
- Pengadaan meubeler sekolah
- Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa
- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat laboraturium dan ruang praktikum sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
- Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
- Pembangunan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/Mts
- Penyelenggaraan paket A
- Penyelenggaraan Paket B
- Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
- Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD/MI
- Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP/Mts
- Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah
- Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan beasiswa bagi siswa berprestasi jenjang SD dan SMP

- Rehabilitasi sedang /berat bangunan sekolah (BANPROP)
- Pengadaan sarana belajar mengajar sekolah (BANPROV)
- Pengadaan lahan/Tanah Perumahan dan gedung sekolah
- Pelatihan tenaga kependididkan jenjang SD dan SMP

3. Program Pendidikan Menengah
   - Pembangunan Gedung Sekolah
   - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, penjaga sekolah
   - Penambahan Ruang Kelas Sekolah
   - Pembangunan Lab dan ruang praktikum sekolah
   - Pembagunan ruang serba guna /aula
   - Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
   - Pembangunan ruang ibadah
   - Pembangunan perpustakaan sekolah
   - Pembangunan jaringan listrik sekolah dan perlengkapannya
   - Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
   - Pengadaanalat praktik dan peraga siswa
   - Pengadaan meubeler sekolah
   - Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa
   - Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
   - Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
   - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
   - Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
   - Rehabilitasi sedang/berat laboraturium dan ruang praktikum sekolah
   - Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
   - Pelatihan kompetensi pendidik
   - Penyediaan besiswa bagi siswa tidak mampu dan berprestasi

- Penyelenggaran paket C
- Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
- Penyediaan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) SMA
- Pembangunan asrama pelajar
- Lomba OSN, LKS dan lomba CC UUD 45
- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
- Pelatihan kuruikulum bagi guru SMA/SMK berau

4. Program Pendidikan Non Formal
   - Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non formal
   - Pengembangan pendidikan keaksaraan
   - Pengembangan pendidkan kecakapan hidup
   - Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah di SKB
   - Pembinaan dan pengembangan PMR, Pramuka Sekolah, Wiyata Mandala dan UKS dan kreatifitas pelajar
   - Penyelenggaraan kompeti olahraga dan kreatifitas pelajar
   - Terlaksananya diklat penilik sekolah
5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
   - Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik.
   - Pelatihan bagi pendidik untuk memnuhi standart kompetensi.
   - Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi.
   - Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
   - Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
   - Penilaian dangka kredit bagi tenaga fungional
   - Kegiatan MGMP SMA, MGMP SMK dan MKKS SMA/SMK
   - Kegiatan seleksi dan calon pengawas sekolah

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
   - Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Pendidikan.
   - Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
   - Penyelenggaran PPDB online
   - Penunjang operasional layanan pendidikan jenjang pendidikan menengah
   - Kegiatan kepramukaan
   - Kegiatan pegendalian internal
   - Asarjana mendidik di daerah terdepan, terluar dan tertinggal SM3T
   - Supervsi penawas sekolah
7. Program pendidikan Tinggi
   - PDD akademi komunitas berau

b. Kesehatan

Urusan wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Rumah Sakit Dr. Abdul Riva'i.serta oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja pelaksana urusan Wajib Kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Dinas Kesehatan

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
   - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
   - Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
   - Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di wilayah kabupaten berau
   - Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
   - Pengadaan peralatan kesehatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial.

- Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
- Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam
- Biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas
- Peningkatan jaminan kesehatan daerah
- Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan daerah
- Monitoring dan pengendalian JAMKESDA
- Operasional Jaminan Pemeliharaan kesehatan
- Pelatihan tenaga kesehatan mengenai tanggap darurat bencana
- Peningkatan JAMKESMAS
- Peningkatan layanan kesehatan masyarakat terhadap bahaya rokok dan upaya penegakan hukum bahaya rokok
- Pelayanan kesehatan pertolongan pertama kagawat darurat.

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
   - Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan.
   - Peningkatan kapasitas Laboratorium pengawasan obat dan makanan.
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
   - Pengembangan media promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
   - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
   - Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan.
   - Monitoring , evaluasi dan pelaporan
   - Percepatan pelaksanaan kabupaten berau sehat.
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
   - Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin.
   - Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Pengawasan Kualitas Air Bersih dan pengambilan sampel air bersih dan air minum
- Peningkatan kesehatan lingkungan

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
   - Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
   - Pelayanan dan Pencegahan Penyakit Menular
   - Peningkatan imunisasi
   - Peningkatan Surveillans Epidemologi dan Penanggulangan Wabah
   - Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
   - Pemberian Pelayanan Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Kabupaten Berau.
8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
   - Peningkatan mutu standarisasi perizinan pelayanan kesehatan.
   - Sertifikasi sarana pelayanan kesehatan
9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
   - Pelayanan Kesehatan Sunatan Massal.
   - Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/busung lapar.
10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan
    - Pembangunan Puskesmas
    - Pembangunan Puskesmas Pembantu
    - Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
    - Pembangunan rumah Dokter/Paramedis/Bidan
    - Rehabilitas sedang/berat rumah Dokter/Paramedis/Bidan
    - Pembangunan puskesmas pembantu dan puskesdes
    - Pembangunan Poskesded

11. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata
    - Pembangunan rumah dinas
12. Program peningkatan peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
    - Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
    - Peningkatan tenaga teknis pertolongan persalinan
    - Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak
    - Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi
14. Program perencanaan dan pembiayaan kesehatan.
    - Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pembiyaan Kesehatan.
    - Kegiaiatan pertemuan evaluasi program dan pembiayaan kesehatan.
15. Program penyusunan, pengkajian dan pengembangan data dan informasi kesehatan
    - Program pengembangan sistem informasi kesehatan daerah
16. Program pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
    - Pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas

b) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr A Rivai

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
    - Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan
    - Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pasien terlantar dan tidak mampu
    - Peningkatan pelayanan kesehatan bagi PNS Gol. I dan II
    - Peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit

2. Program promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
   - Peningkatan pemanfaatan sarana Kesehatan
3. Program standarisasi pelayanan kesehatan
   - Penyusunan standar pelayanan kesehatan
   - Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
4. Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/RS Jiwa/Rs.Paru-paru/RS.Mata
   - Pembangunan Rumah Sakit (Lanjutan)
   - Rehabilitasi bangunan rumah sakit
   - Pengadaan Alat-alat kesehatan RS
   - Pengadaan SIMRS
   - Pembangunan Lanjutan ruang perawatan kesehatan jiwa
   - Pembangunan gedung ./ruang generator oxygen
   - Pengembangan/peningkatan jalan lingkungan rumah sakit
5. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
   - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit.
   - Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
   - Pemeliharaan rutin/berkala alat alat kesehatan rumah sakit
   - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
   - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dokter/paramedis
6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
   - Kemitraan Peningkatan Kualitas dokter dan paramedis
7. Program perencanaan program dan pembiayaan kesehatan
   - Penyusunan perencanaan dan pembiayaan kesehatan

c. Pekerjaan Umum

Urusan wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja pelaksana urusan Wajib Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Dinas Pekerjaan Umum

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - Pembangunan Rumah Dinas.
   - Pembangunan gedung Kantor I
   - Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
   - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor I (luncuran 2013)
   - Pembangunan gedung Kantor II
   - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor II
   - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor III
2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
   - Perencanaan Pembangunan Jalan
   - Perencanaan Pembangunan jembatan
   - Pembangunan Jembatan
   - Peningkatan Jalan Dalam Kota 1
   - Peningkatan Jalan Dalam Kota 2
   - Peningkatan Jalan Luar Kota.
   - Peningkatan Jalan Lingkungan I
   - Peningkatan Jalan Lingkungan 2
   - Peningkatan Jalan Lingkungan 3
   - Peningkatan Jalan Lingkungan 4
   - Pembangunan Jalan 2
   - Peningkatan Jalan Dalam Kota 3
   - Peningkatan Jalan Luar Kota 2
   - Pembangunan Jembatan 3

- Pembangunan Jembatan 4
- Pembangunan Jembatan 5
- Pembangunan Jalan 1 (Lanjutan TA. 2013)
- Pembangunan Jembatan (Lanjutan TA. 2013)
- Peningkatan Jalan Dalam Kota 1 (Lanjutan TA. 2013)
- Peningkatan Jalan Dalam Kota 2 (Lanjutan TA. 2013)
- Pembangunan Jembatan 2 (Lanjutan TA. 2013)
- Peningkatan Jalan Dalam Kota 3 (Lanjutan TA. 2013)
- Pembangunan Jembatan 3 (Lanjutan TA. 2013)
- Pembangunan Jembatan 4 (Lanjutan TA. 2013)
- Pembangunan Jembatan 5 (Lanjutan TA. 2013)
- Pembangunan Jalan 3 (Lanjutan TA. 2013)
- Peningkatan Jalan Luar Kota 4
- Pembangunan Jalan 4
- Pembangunan Jembatan 6
- Pembangunan Jalan 3

3. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
   - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kec. Tanjung Redeb
   - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kec.Tl. Bayur
   - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kec. Gunung Tabur
   - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kec.Sambaliung
   - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kec. Tanjung Redeb II
   - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kec. Tanjung Redeb III
   - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Luar Kota

4. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
   - Perencanaan Turap/Talud/Bronjong 1
   - Perencanaan Turap/Talud/Bronjong 2
   - Pembangunan Turap/Talud/Bronjong I (Lanjutan 2012)
   - Pembangunan Turap Sheet Pile Jl. M. Iswahyudi Tahap III
   - Perencanaa AMDAL Turap/Talud/Bronjong
   - Pembangunan Turap Pile Ex pasar Gayam Tanjung Redeb
   - Pembangunan Turap Sheet Pile Jl. M. Iswahyudi Tahap III (luncuran ABT 2013)
   - Pembangunan Turap Pile beton Gunung Tabur (luncuran ABT 2013)
   - Pembangunan Turap Pile beton Sambaliung (luncuran ABT 2013)
   - Pembangunan Turap Pile beton Gunung Tabur(MYC)
   - Peningkatan Sub Das simpang jalan raja alam dan jalan bukit berbunga kecamatan sambaliung
   - Pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan turap/talud/brojong.
5. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
   - rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
   - rehabilitasi/pemeliharaan jalan dalam kota
   - rehabilitasi/pemeliharaanjalan luar kota
6. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi Rawa dan jaringan Pengairan lainnya.
   - Pembangunan Jaringan Irigasi I
   - Pembangunan Jaringan Irigasi II
   - Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
   - Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan I
   - Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan II

- Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan
- Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan (Luncuran 2013)
- Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Perkotaan Tahap III (Luncuran 2013)

8. Program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP)
   - Pembangunan Jalan Usaha tani
   - Peningkatan jalan dan jembatan pedesaan
9. Program pengembangan perumahan
   - Pembangunan sarana dan prasarana Rumah sehat sederhana I
   - Pembangunan sarana dan prasarana Rumah sehat sederhana I
10. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kota
    - BOP penanggulangan kemiskinan di perkotaan
11. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
    - BOP penanggulangan kemiskinan di pedesaan (PPIP)

d. Perumahan

Dinas Perumahan dan Tata Ruang

1. Program Lingkungan sehat perumahan
   - Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

2. Program lingkungan sehat perumahan
   - Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
3. Program pengembangan perumahan
   - Perencanaan teknis penanganan prasarana dan sarana umu perumahan
   - Penyusunan data base perumahan

Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Penyediaan prasaranan dan sarana pengelolaan persampahan
- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

2. Program Peningkatan Kesediaan dan pencegahan bahaya kebakaran
   - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
   - Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran
3. Program pengelolaan areal pemakaman
   - Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
4. Program penataan ruang terbuka hijau (RTH)
   - Pemeliharaan RTH (Swakelola)
   - Penataan RTH
   - Normalisasi saluran drainase (Swakelola)

e. Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan Tata Ruang

1. Program Perencanaan Tata Ruang.
   - Penyusunan rancangan peraturan daerah
   - Sosialisasi paket regulasi tentang rencana tata ruang
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
   - Pengawasan Pemanfaatan Ruang
   - Pengawasan dan penertiban perijinan bangunan umum
   - Pengawasan dan penertiban perijinan bangunan perumahan
3. Pendataan dan identifikasi kawasan
   - Pendataan kawasan industri dan real estate
4. Penataan ruang
   - Pengadaan dan pemasangan patok GSB

f. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan adalah:

1. Program Perencanaan Pembangunan daerah
   - Penyusunan Rancangan RKPD
   - Penyelenggaraan musrenbang RKPD
   - Monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah
   - Koordinasi dan fasilitasi penyusunan RKA SKPD
   - Koordinasi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Berau
   - Koordinasi perencanaan bidang penelitian dan pengembangan
   - Evaluasi RKPD dan RPJMD
   - Penyusunan Buku putih RPJMD 2015 -2020
   - Koordinasi pengembangan sistem inovasi daerah
   - Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran
   - Penelitian bidang SDA dan Kepariwisataan Daerah
2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
   - Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang Ekonomi
   - Koordinasi percepatan pembangunan pertanian dalam arti luas
   - Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian SDA dan LH
3. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
   - Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang sosbud.
   - Penyusunan IPM kab. Berau tahun 2014
4. Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah
   - Konsultasi, koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan perencanaan pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah.
   - Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (KPRD)
   - Koordinasi pembangunan sanitasi

- Inventarisasi prasarana wilayah
- Inventarisasi dan verifikasi data rumah tidak layak huni

g. Perhubungan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, yaitu:

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
   - Perencanaan pembangunan prasarana dan fasiitas perhubungan
   - Pembangunan sarana dan fasilitas sungai, danau dan penyeberangan
   - Rehabilitasi saraba dan fasilitas sungai, danau dan penyeberangan
   - Pembangunan dermaga maratua
   - Perencanaan pembangunan bandara maratua
   - Rehab dermaga kampung teluk semanting
   - Pembangunan dermaga maratua (luncuran)
   - Pembuatan ruang Tunggu pelabuhan di kecamatan gunung tabur
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
   - Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
   - Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
   - Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban lalu lintas air dan angkutan sungai
   - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
   - Kegiatan wahana tata nugraha
   - Kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas
   - Sosialisasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar dan generasi muda .
4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
   - Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

5. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
   - Pengadaan rambu-rambu lalulintas.
   - Pengadaan alat pemberi isyarat lalulintas (APILL)

h. Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
   - Bimbingan teknis persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup
   - Koordinasi Penialian Kota Sehat / Adipura
   - Pemantauan Kualitas Lingkungan
   - Pemantauan Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
   - Pengkajian Dampak Lingkungan
   - Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
   - Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih
   - Pengembangan produsi ramah lingkungan
   - Koordinasi penyusunan AMDAL
   - Peningkatan Peran Serta Masyrakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
   - Koordinasi menuju indonesia Hijau (MIH)
   - Koordinasi program pemantapan Program Lingkungan Hidup.
   - Penanganan kasus lingkungan
   - Pemantauan kerusakan lingkungan hidup
3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
   - Identifikasi data daerah kawasan karst
   - Konservasi penyu
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
   - Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang

lingkungan

- Pengembangan data dan informasi lingkungan
- Corporate social responsibility (CSR)
- Pekan Lingkungan Indonesia

5. Program Peningkatan Pegendalian Polusi
   - Pengujian Kaliberasi peralatan Laboratorium lingkungan dan pemulihan /service/penggantian sparepart peralatan lab.
6. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.
   - Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
7. Program Pelayanan Administrasi komisi Penilaian Amdal
   - Pelaksanaan Kegiatan Pra-Amdal dan pengadaan peralatan serta perlengkapan AMDAL.

i. Pertanahan

Bagian Pertanahan Setda Berau

1. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
   - penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
   - workshop peningkatan SDM bidang pertanahan
   - koordiasi pelaksanaan pengadaan tanah di lingkungan pemerntah kabupaten berau
   - fasilitasi permasalahan pertanahan
2. Program pengendalian pemanfaatan ruang
   - Penataan batas wilayah kecamatan/kampung

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana

1. Program Penataan Adminstrasi Kependudukan

- Implementasi sistem Administrasi Kependudukan.(membangun, updating dan pemeliharaan).
- Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan.
- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
- Pengembangan database kependudukan.
- Sosialisasi kebijakan kependudukan.
- Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan capil.
- Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Dokumen Akta-akta Capil
- Peningkatan Pelayanan dam bidang Pencatatan Sipil
- Pengawasan dan pengendalian Penduduk
- Peningkatan pelayanan pencatatan akta perkawinan dan perceraian, adopsi pengesahan dan pengakuan anak.

k. Pemberdayaan Perempuan.

Kantor Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana.

1. Program keserasian kebijakan peningktan kualitas anak dan perempuan.
   - Rakor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana TK. Provinsi se Kaltim
2. Program Penguatan kelembagaan Pengurustamaan Gender dan anak
   - Fasilitasi pengembangan P2TP2
   - Pengembangan sistem informasi gender dan anak
   - Evaluasi dan sosialisasi kota layak anak (KLA)
   - Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
   - Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
4. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

- Pembinaan Organisasi Perempuan.
- Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.
- Pemberdayaan PKK
- Ekspose peningkatan kualitas perempuandalam pembangunan
- Pemberdayaan DWP
- Pemberdayaan GOW
- Evaluasi dan pembianaan dan advokasi kelompok UPPKS
- Pembinaan kelompok ekonomi produktif bagi perempuan

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kantor Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana.

1. Program Keluarga Berencana
   - Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin.
   - Pembinaan keluarga berencana
   - Rapat Kerja pmberdayaan perempuan dan KB Se-kabupaten Berau di Kabupaten Berau.
   - Pendataan keluarga
   - Jambore PKB TK. Nasional
2. Program kesehatan reproduksi remaja.
   - Advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
   - Jambore PIK remaja/mahasiswa
3. Program Pelayanan Kontrasepsi.
   - Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
4. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
   - Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
5. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

- Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

m. Sosial

Dinas Sosial

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
   - Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
   - Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi Keluarga miskin.
   - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
   - Pelatihan keterampilan bagi Penyandang masalah kesejahteraan sosial
   - Perbaikan Rumah Miskin Atap Lantai Dinding (ALADIN).
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
   - Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
   - Fasilitasi penyaluran dan dana tebus raskin
   - Pendayagunaan komunitas adat terpencil
   - Pelaksanaan isbat nikah/ nikah massal bagi keluarga miskin
   - Fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan
   - Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
   - Penanggulangan bencana
   - Pelaksanaan validasi data keluarga miskin
3. Program pembinaan anak terlantar
   - Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
   - Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.

- Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
- Pengiriman orang sakit jiwa kerumah sakit jiwa dan Rehab Paca

5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
   - DIKLAT keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
   - Pemberdayaan eks penyandang penyakit social.
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtreraan sosial.
   - Penjaringan karang taruna, organisasi sosial dan PSM berprestasi
   - Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
   - Operasional pokja Pandu Gempita (pelayanan terpadu gerakan masyarakat peduli)

n. Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga kerja.
   - Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
2. Program peninhgkatan kesempatan kerja
   - Pengembangan kelembagaan dan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
   - Sosialisasi perbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagkerjaan.
   - Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kesehatan dan kesehatan kerja.
   - Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
   - Penyuluhan, pembentukan sarana hubungan industrial serta penanganan perselisihan hubungan

- Peningkatan fungsi-fungsi lembaga ketenagakerjaan.
- Penigkatan pembinaan K3 di perusahaan.

o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
   - Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
   - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan pemuda
   - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
3. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha bagi mikro kecil menengah.
   - Pemantauan pengelola pengunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.
   - Penyelengaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah.
   - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4. Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
   - Sosialissi prinsip-prinsip kelembagaan koperasi.
   - Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi.
   - Revitalisasi bagi koperasi.

p. Penanaman Modal

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi.
   - Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
   - Peningkatan kegiatan pemantauan , pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal

- Penyelenggaraan pameran investasi

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
   - Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan
   - Pengembangan system informasi pelayanan perijinan terpadu.
   - Peningkatan pelayanan perijinan bidang pelayanan umum.
   - Peningkatan pelayanan perijinan bidang perekonomian.
   - Penertiban perizinan bidang pelayanan umum
3. Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah.
   - Peningkatan pelayanan perijinan bidang pengelolaan sumber daya alam.
   - Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.

q. Kebudayaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
   - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
   - Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang kebudayaan.
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
   - Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.
   - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
   - Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
3. Program pengelolaan keragaman budaya
   - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
   - Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

r. Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pemuda dan Olahraga

1. Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan Kepemudaan
   - Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemuda
2. Program peningkatan Peran serta Kepemudaan
   - Pembinaan Organisasi Kepemudaan
   - Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
   - Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
   - Pelaksanaan paskibraka di kabupaten berau
   - Korsik kab. berau
3. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
   - Pelatihan kewirausaan bagi pemuda
4. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah raga
   - Pembinaan Cabor prestasi di daerah
   - Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
   - Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga
   - Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
   - Peningktan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga
5. Program peningkatan sarana dan prasarana Olah Raga
   - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
   - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
   - Pengadaan lahan untuk sarana dan prasarana olahraga
   - Rehab kolam renang kakaban aquatik menjadi indoor

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesbang Politik dan Linmas

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
   - Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
   - Pengawasan dan pengendalian daerah rawan sosial
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
   - verifikasi data LSM, ormas dan parpol
3. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
   - Fasilitasi dan sosialisasi forum pembaruan kebangsaan di kab. berau
4. Program pmberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
   - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   - Operasional komunitas intelejen (KOMINDA), Forum Kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan forum kerukunan umat beragama
   - Kewaspadaan dini bencana konflik sosial di masyarakat
5. Program pendidikan politik masyarakat
   - Koordinasi forum forum diskusi politik
   - Desk pemilu legislatif dan presiden 2014
   - Persiapan desk pilkada bupati berau 2015
   - Fasilitas pengawasan kegiatan pileg dan pilpres di kab. berau
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
   - Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam
   - Teknis penanggulangan bencana dan pengungsi dan koordinasi berkala tim Satkorlak
   - Pelatihan penanggulangan bencana dan tanggap darurat operasional penanggulangan bencana

7. Program rakor kesbangpol se kalimantan timur
    - Fasilitas rakor kesbangpol se kalimantan timur di kab. berau

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1. Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan
    - Pengendalian Keamanan Lingkungan
    - Rakor Pol PP se kalimantan timur
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
    - Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan polisi Pamong Praja
    - Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sekretariat Daerah

Program Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Kantor
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
    - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
    - Penyediaan jasa administrasi keuangan
    - Penyediaan jasa kebersihan kantor
    - Penyediaan alat tulis kantor
    - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - Pengadaan peralatan Rumah jabatan
   - Pengadaan meubelier
   - Pengadaan peralatan asrama mahasiswa
   - Pengdaan/sewa gedung kantor
   - Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
   - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
   - Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/ dinas
   - Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan/perlengkapan kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengklapannya
4. Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS
   - Pemulangan Pegawai yang Pensiun
   - Pemindahan Tugas PNS
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
   - Pendidikan dan Pelatihan Formal
   - Peningkatan SDM kesekretariatan
   - Sosialisasi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa
   - Manajemen pelaksanaan kontrak
6. Program peningkatan pengembangan sistenm laporan capaian kinerja dan keuangan
   - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

skpd

- Monitoring dan evaluasi LHKPN di lingkungan pemerintah kab. Berau
- Perencanaan dan pengendalian administrasi keuangan SKPD

7. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif
   - Pengkajian dampak regulasi / kebijakan nasional
8. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
   - penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
   - workshop peningkatan SDM bidang pertanahan
   - koordiasi pelaksanaan pengadaan tanah di lingkungan pemerntah kabupaten berau
   - fasilitasi permasalahan pertanahan
9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH
   - Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasayrakatan
   - Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Non Departemen/Luar Negeri
   - Rapat Koordinasi unsur Muspida
   - Rakor pejabat pemerintah daerah
   - Kunjungan Kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
   - Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya
   - Keprotokoleran kepala daerah/wakil kdh
   - Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat
   - Penyelenggaraan pembentukan PATEN
   - Rakor camat, Lurah dan kepala kampung se kabupaten berau
   - Ekpspos Peningkatan Kebangsaan

- Evaluasi dan monitoring kebijakan kepala daerah tentang ijin lokasi
- Inventarisasi pemakuan nama rupa bumi
- Evaluasi dan penilaian kinerja camat
- Koordinasi penyusunan LKPJ
- Penerbitan Buku pencapaian pembangunan pemerintah kabupaten berau oleh APKASI

10. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
    - Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
11. Program pembangunan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah
    - Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UKMM
    - Penelitian permohonan dan penyelesaian masalah pengelolaan/pengusahaan sarang burung walet
    - Fasilitasi pendidrian BPR
12. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
    - Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
    - Pembinaan dan monitoring TPA
    - Fasilitasi kegiatan keagamaan
    - Pelaksanaan MTQ
    - Peningkatan pembinaan keagamaan pada masyarakat
    - Pelayanan ibadah haji pemerintah kab. Berau
    - Fardhu kifayah
    - Pendalaman dan pembelajaran ilmu alquran pada santri berau di luar ponpes kaltim
    - MUI kab. Berau
    - Peningkatan keagamaan pemuda dan remaja di kab. Berau
    - Monitoring evaluasi dan verifikasi dana bantuan sosial dan hibah

kab. Berau

- Tim seleksi penerimaan beasiswa kaltim cemerlang tahun 2014

13. Program kerjasama informasi dengan mass media
    - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
    - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan PEMDA
    - Rangkaian pelaksanaan Event daerah
14. Program pengendaian pemanfaatan ruang
    - Penataan batas wilayah kecamatan / kampung
15. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
    - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
    - Operasional Tim Kajian Sanggah banding
    - Tim Evaluasi dan Pelaporan Dana APBD Kab. Berau Tahun 2014
    - Tim Monitoring dan Evaluasi Banprop Kaltim 2014
    - Aplikasi Pelaporan Realisasi Fisik Keuangan
    - LPSE
    - Peningkatan Sitem Operasional ULP Kab. Berau
    - Koordinasi penyelesasian Masalah perbatasan antar daerah
    - Raker perbatasan se kalimantan timur di pl. Derawan
    - Peningkatan aplikasi sistem pengendalian
16. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
    - Pengembangan pusat layanan internet kecamatan
    - Penyebaran informasi publik
17. Program penataan peraturan perundang undangan
    - Koordinasi kerjasam permasalahan Per UU
    - Penyusunan Rancangan kerja Rancangan Per UU
    - Publikasi per UU
18. Program penataan daerah otonom baru
    - Koordinasi dan Fasilitasi percepatan pemakaran daerah

19. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
    - Pengembangan konten website kab. Berau
    - Peningkatan infrastruktur jaringan telematika
    - Pembangunan dan pengembangan BTS
    - Pembangunan dan pengembangan SIM Daerah
    - Operasional BTV dan RSPD
20. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
    - Pelaksanaan Workshop SKP di Lingkungan Setda Kab. Berau
    - Anjab dan penataan kelembagaan
    - Penyusunan SPM
    - Penyusunan Roadmap reformasi birokrasi
    - Monitoring dan evaluasi IKM di lingkungan pemda berau
21. Program kerjasama informasi dengan media massa
    - Monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur jaringan TI

Sekretariat DPRD

1. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
    - Pengadaan mobil jabatan
    - Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas.
    - Pengadaan Mebeleur
    - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.
    - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
    - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
    - Rehabilitasi berat/sedang gedung kantor
2. Program penigkatan Disiplin Apratur
    - Pengadaan pakaian dinas bersrta kelengkapannya.
    - Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
3. Program peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur.
    - Bintek implementasi pearturan perundang-undangan.

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
   - Penyusunan laporan capian kinerja dan iktisar realisasi kenerja SKPD.
5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah.
   - Pembahasan Rancangan peraturan Daerah.
   - Hering/ dialog badan koordinasi dengan pejabat Pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama.
   - Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
   - Rapat-rapat paripurna.
   - Kegiatan reses.
   - Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah.
   - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan.
   - Sosialisasi peraturan perundang-undngan.
   - Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah
   - Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD.

Sekretariat Dewan Korpri

1. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
   - Pendidikan dan pelatihan formal
   - Sosialisasi peraturan PerUU
   - Peningkatan SDM kesetretariatan
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   - Sosialisasi Kinerja Program SKPD
   - Pembinaan organisasi dan kelembagaan KORPRI
3. Program pengembangan perumahan
   - Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

4. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga
   - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
   - Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
5. Program penataan peraturan Per perundang-undangan
   - Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
   - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   - Penyusunan Laporan Keuangan akhi tahun
   - Sosialisasi kinerja program SKPD
   - Penyusunan pelaporan Capaian kinerja bidang pendapatan
   - Penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis APBD
2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan daerah
   - Penyusunan standar satuan harga
   - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retibusi
   - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
   - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
   - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
   - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
   - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
   - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
   - Penyusunan sitem informasi pengelolaan keuangan daerah

- Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
- Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB
- Penyusunan pra RAPBD bidang pendapatan
- Sertifikasi tanah daerah
- Penyusunan potensi pajak daerah, retribusi daerah dan laian-lain PAD yang sah
- Penyusunan daftar kebutuhan barang
- Pembinaan sistem informasi barang daerah SKPD
- Pengembalian batas (pengamanan aset)
- Pendataan PBB
- Optimalisasi penerimaan dana perimbangan.

3. Program pembianaan dan fasilitasi pengeloalaan keuangan Kabupaten/Kota
   - Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten/kota
   - Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
   - Pembinaan dan peningkatan tertib administrasi keuangan.
4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
   - Penyusunan SIMPAD
   - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Kepegawaian

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   - DIKLAT PIM Tk.IV Tahun 2014
   - Pendidikan teknis fungsional pra pensiun
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
   - Seleksi Penerimaan Calon PNS

- Penempatan PNS
- Penataan system administrasi kenaikan pangakt otomatis PNS.
- Pembangunan / pegembangan sistem informasi kepegawaian daerah
- Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin
- Pemberiayan biaya tugas belajar dan ikatan dinas
- Pemberian biaya penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Penyelenggaraan ujian dinas TK. II, III dan IV
- Pengurusan SK pensiun PNS dan Klaim tepat waktu
- Pengiriman diklat pengelolaan keuangan daerah
- Pengurusan SK Pensiun PNS dan Klaim Tepat Waktu
- Penyelesaian pengurusan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen PNS Berau
- Pemetaan kompetensi jabatan eselon
- Analisis kebutuhan pegawai
- Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP no 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
- Pembangunan/pengembangan sistem tata naskah dinas

Inspektorat

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
   - Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala
   - Penanganan kasus pada pemerintahan dibawahnya.
   - Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
   - Inventarisasi temuan pengawasan
   - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
   - Koordinasi Pengawasaan yang lebih komperehensif
   - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
   - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
   - Pelatihan Teknis Pengawasan
   - Pengembangan wawasan aparat pengawasan internal pemerintah daerah

Kecamatan

1. Program Peningkatan kapsitas Sumber Daya Aparatur
   - Bimtek Implementasi peraturan per UU
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
   - Operasional PKK kecamatan dan Kelurahan
4. Program penataan administrasi kependudukan
   - Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
5. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan
   - Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

u. Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian

1. Program peningkatan kesejahteraan petani
   - Pelatihan petani pelaku agribisnis
   - Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
   - Peningkatan kemampuan lembaga petani
2. Program peningkatan ketahanan pangan

- Analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan
- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
- Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
- Pengembangan cadangan pangan daerah
- Pengembangan desa mandiri pangan
- Pengembangan lumbung pangan desa
- Koordinasi kebijakan perberasan
- Peningkatan pembinaan daerah rawan pangan
- Peningkatan kewaspadaan, mutu dan keamanan pangan

3. program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
   - Peningkatan kemampuan kemitraan pelaku agribisnis
4. program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
   - Peningkatan penyediaan bahan bahan metodelogi sarana dan prasarana penyuluhan
   - Sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan penyuluhan
   - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
   - Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan penyuluh
   - Penyuluh pertanian lapangan

v. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

1. Peningkatan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
   - Penyelenggararaan diseminasi informasi bagi masyarakat
   - Bulan bakti dan gotong royong
   - Rakor Lembaga Permberdayaan Masyarakat
   - Pelatihan LPM dan KPM
   - Pengembangan Sistem Informasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
   - Survey dan pendataan kriteria perkembangan kampung/kelurahan

- Koordinasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) kab. berau

2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
   - Fasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
   - Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
   - Pendataan potensi pasar desa
   - Inventarisasi, sosialisasi dan pembentukan BUMDes percontohan
3. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
   - Pemilihan, pelantikan dan pembinaan Kepala Kampung
   - Pelaksanaan KKN Mahasiswa
   - Pelaksanaan lomba kampung/kelurahan
   - Pemekaran kampung
   - Penyusunan kebijakan dan validasi data alokasi dana desa/ kampung (ADD/ADK)
   - Peningkatan kualitas SDM pengurus Pos pelayanan teknologi tepat guna dan berpartisipasi dalam gelar teknologi tepat guna tingkat nasional
4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
   - Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam pengeloloaan keuangan Desa/Kampung
   - Pengelolaan data profil desa dan profil kelurahan
   - Pembinaan LPM
   - Pembinaan dan administrasi alokasi dana bantuan kampung
   - Penilaian LPM prestasi
   - Sosialisasi peraturan tentang kampung
   - Pelatihan penyusunan RPJM kampung
   - Pelatihan aparatur Kampung dan BPK dalam bidang pengelolaan ADM Kampung

- Pelatihan ADK bagi tim pendamping kecamatan
- Penyusunan pertauran tentang kampung

5. Program pengembangan Kecamatan
   - Pengembangan dan pemberdayaan Kecamatan (PNPM-MP)
6. Program pengembangan perumahan
   - Validasi data rumah tangga miskin yang tidak layak dihuni

w. Statistik

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Program Pengambangan Data / Informasi
   - Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah
   - Penyusunan Profile Daerah

x. Kearsipan

KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
   - Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
   - Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
   - Pendataan dan Penataan dokument/Arsip Daerah
   - Penduplikasian dokumen / arsip dalam bentuk informayika
3. Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
   - Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
   - Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
   - Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.
4. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
   - Penyediaan sarana layanan informasi
   - Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi

pemerintah/swasta.

y. Komunikasi dan informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

z. Perpustakaan

Kantor Perpustakaan Umum

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.
- Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Penyediaan bantuan buku pengembangan perpustakaan dan minat baca didaerah
- Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah
- Operasional mobil dan motor pintar perpustakaan umum
- Peningkatan pelayanan perpustakaan
- Operasional perpustakaan keliling perpustakaan umum

2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan wajib pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan masalah paling mendasar yang menjadi fokus perhatian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, visi yang telah ditetapkan adalah Berau Cerdas dan Terdidik yang diharapkan memacu langkah strategis dan inovatif dalam mewujudkannya, anggaran pembangunan sektor pendidikan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Berau senantiasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Perolehan capaian terhadap sasaran selama tahun 2014 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian sangat rendah. Berikut ini perolehan sasaran tahun 2014 beserta evaluasi dan analisis capaiannya :

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR CAPAIAN		
			TAHUN 2014	REALISASI	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	66,67	74,43	59,57

Secara umum realisasi pencapaian sasaran pada pendidikan anak usia dini (PAUD) meningkat sebesar 74,43% dari yang ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 66,67% sehingga pencapaiannya mencapai 59,57%.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya didirikan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) dan banyaknya minat pada anak-anak usia dini untuk bersekolah dan semakin besarnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang di mulai dari usia dini.

Realisasi capaian dapat dihitung berdasarkan perhitungan banyaknya jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak yang berjumlah sebanyak 10.926 orang berbanding jumlah anak usia 4-6 tahun yang sebesar 14.679 orang. Dari hasil perbandingan tersebut dapat di lihat sekitar 3.753 dari jumlah anak usia 4-6 tahun yang tidak bersekolah.

Dari jumlah anak usia 4-6 tahun yng tidak bersekolah pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dimungkinkan karena factor-faktor umum saja. Faktor-faktor umum tersebut adalah sebagai berikut :

- Kurangnya keinginan anak usia dini untuk bersekolah,dan di masa usia dini tersebut orang tua di larang untuk memaksa anak usia dini untuk bersekolah.
- Kurang nya kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anak pada usia dini.

- Masih adanya orang tua yang belum tahu pentingnya pendidikan anak di usia dini.

Dalam Pelaksanaan kegiatan nya anggaran pendidikan anak usia dini pada tahun 2014 ini mencapai Rp. 5.686.501.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.650.933.400,00 sehingga persentasenya sebesar 81,79%

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR CAPAIAN		
			TAHUN 2014	REALISASI	%
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf	%	99.98	100,69	99.29

Berdasarkan dari tabel diatas penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf tahun 2014 memang masih kurang mencapai target, dari target yang ditentukan sebesar 99.98 % hanya dapat terealisasikan sebesar 99.29%. Hasil tersebut di dapat dari perhitungan Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis sebanyak 136.304 orang berbanding dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sebesar 135.376 orang.

Ketidak capaian tersebut di pengaruhi beberapa faktor, faktor tersebut meliputi :

- Kurang nya minat penduduk untuk mengikuti program paket C dan besarnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
- Penduduk yang mengikuti program paket C hanya kepada penduduk yang telah dalam masa kerja yang dalam penggunaannya diperuntukkan sebagai alat kenaikan jabatan.
- Penduduk yang dalam masa mencari pekerjaan.

Dengan melihat beberapa faktor tersebut dapat memacu dinas pendidikan untuk lebih meningkatkan program penyelenggaraan paket C di tahun yang akan datang agar capaian dapat lebih baik dari tahun 2013. Dan selalu memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya paket C bagi mereka yang membutuhkannya.

Pada pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan paket C setara SMU pada tahun 2014 ini memang tidak 100% hanya mencapai 99.29 % dengan anggaran sebesar Rp. 138.809.000,00 dan dapat di realisasikan sebesar 134.404.200,00

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR CAPAIAN		
			TAHUN 2014	REALISASI	%
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	93,40	98,80	105,78

Pada angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A pada tahun 2014 didapat dari perhitungan Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/paket A yang sebesar 24.805 orang berbanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang sebesar 25.104 orang.

Target angka partisipasi murni (APM) pada tahun 2014 ini sebesar 93,40% dan dapat terealisasikan sebesar 98,80% sesuai perhitungan di atas sehingga dapat mencapai 105,78 % angka tersebut dinyatakan berhasil.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR CAPAIAN		
			TAHUN 2014	REALISASI	%
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	79,77	83,99	105,29

Pada angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2014 didapat dari perhitungan Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B yang sebesar 8.434 orang berbanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sebesar 10.042 orang.

Target angka partisipasi murni (APM) pada tahun 2014 pada ini sebesar 79,77% dan dapat terealisasikan sebesar 83,99% sesuai perhitungan di atas sehingga dapat mencapai 105,29% angka tersebut

sudah berhasil. Namun demikian dinas pendidikan tetap harus lebih meningkatkan kinerja nya agar ke depannya dapat lebh baik.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR CAPAIAN		
			TAHUN 2014	REALISASI	%
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	78,06	72,63	93,04

Pada angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2014 didapat dari perhitungan Jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C yang sebesar 6.652 orang berbanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sebesar 9.159 orang.

Target angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2014 ini sebesar 78,06% dan dapat terealisasikan sebesar 72,63% sesuai perhitungan di atas sehingga dapat mencapai 93,04% angka tersebut sudah lebih mencapai target yang telah di tetapkan.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR CAPAIAN		
			TAHUN 2014	REALISASI	%
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,25	0,14	48,00

Angka putus sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2014 dengan target yang di tentukan sebesar 0.25% dan dapat terrealisasi sebesar 0.12 sehingga mencapai capaian 48,00%. Angka ini di dapat dari perhitungan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI yang berjumlah 41 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya yang sebanyak 29,015 orang.

Dari target yang di tentukan tahun 2014 dengan yang telah terrealisasi dinas pendidikan dapat di katakan telah berhasil dengan

programnya karena makin kecil angka putus sekolah (APM) SD/MI maka pendidikan berjalan lebih baik. Namun di lihat dari angka persentase dapat dikatakan masih tinggi nya angka putus sekolah (APM) SD/MI.

Ada beberapa factor yang menyebabkan Angka putus sekolah (APS) SD/MIpada tahun 2014 ini masih ada :

- Masih adanya anak yang di minta orang tua nya untuk bekerja di usia sekolah SD/MI.
- Kekurangtahuan orang tua bahwa pendidikan sangat penting.
- Kekurangtahuan siswa arti pentingnya pendidikan masa sekarang dan masa depan.

Sehingga dinas pendidikan di tahun mendatang harus lebih giat dalam menjalankan program-program sehingga angka putus sekolah (APM) SD/MI akan semakin kecil bahkan diharapkan tidak akan ada lagi siswa jenjang SD/MI putus sekolah.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR CAPAIAN		
			TAHUN 2014	REALISASI	%
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,25	0.16	64

Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs pada tahun 2014 dengan target yang di tentukan sebesar 0.25% dan dapat terrealisasi sebesar 0.16% sehingga mencapai capaian 64 %. Angka ini di dapat dari perhitungan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs yang berjumlah 18 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 11.301 orang.

Dari target yang di tentukan tahun 2014 dengan yang telah terrealisasi dinas pendidikan dapat di katakan telah berhasil dengan programnya karena makin kecil angka putus sekolah (APM) SMP/MTs

maka pendidikan SMP/MTs berjalan dengan baik dari yang telah di targetkan.

Sehingga dinas pendidikan di tahun mendatang harus lebih giat dalam menjalankan program-program sehingga angka putus sekolah (APM) SMP/MTs akan semakin kecil bahkan diharapkan siswa/siswi SMP/MTs tidak aka nada lagi.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR CAPAIAN		
			TAHUN 2014	REALISASI	%
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0.03	0.20	666%

Angka putus sekolah (APS) SMA/MA pada tahun 2014 dengan target yang di tentukan sebesar 0.03% dan terrealisasi sebesar 0.27%, sehingga mencapai capaian 666%. Angka ini di dapat dari perhitungan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMA/MA yang berjumlah 18 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/MA sebanyak 7.821 orang.

Masih banyaknya angka putus sekolah (APS) SMA/MA di akibatkan beberapa factor, factor tersebut meliputi :

- Siswa lebih memilih mencari pekerjaan dari pada bersekolah.
- Faktor yang lebih besar di karenakan siswa melakukan pernikahan.

Melihat faktor di atas maka menjadi PR dinas pendidikan di tahun mendatang agar harus lebih bekerja keras dalam menjalankan program-program sehingga angka putus sekolah (APM) SMA/MA akan semakin kecil bahkan diharapkan siswa/siswi putus sekolah SMA/MA tidak akan terjadi.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR CAPAIAN		
			TAHUN 2014	REALISASI	%
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100

Sumber Data : LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2014.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI dinas pendidikan mempunyai target 100% tahun 2014 ini dan akhirnya dapat terrealisasikan sebesar 100% sehingga persentase target indicator capaian nya mencapai 100%. Hal tersebut dapat di lihat dari perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SD/MI yang sebanyak 4.092 orang dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran tahun sebelumnya yang sebanyak 4.092 orang.

Di lihat dari perbandingan tersebut sehingga tidak ada siswa/siswa SD/MI yang tidak lulus saat ujian nasional. Pada Angka Kelulusan (AL) SD/MI dinas pendidikan dapat dinyatakan berhasil dalam melaksanakan program-program. Dan diharap di tahun ke depan Angka Kelulusan (AL) SD/MI yang mencapai 100% dapat di pertahankan dengan baik.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR CAPAIAN		
			TAHUN 2014	REALISASI	%
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,01	99,90	100,90

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs dinas pendidikan target tahun 2014 ini sebesar 99,01 % dan akhirnya dapat terrealisasikan sebesar 99.90% sehingga persentase target indikator capaian nya mencapai 100,90%. Hal tersebut dapat di lihat dari perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs yang sebanyak 3.099 orang dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran tahun sebelumnya yang sebanyak 3.102 orang.

Di lihat dari perbandingan tersebut walau realisasi Mencapai target yang telah ditentukan. Namun dari jumlah siswa/siswi yang sebesar 3.102 orang tersebut masih ada 3 (Tiga) orang siswa/siswi SMP/MTs yang tidak lulus saat ujian nasional. Hal ini Berbanding dengan tahun 2013 dimana siswa Keseluruhannya Lulus, Namun di harapkan di tahun kedepan nya siswa/siswi SMA/SMK/MA dapat lulus semua.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR CAPAIAN		
			TAHUN 2014	REALISASI	%
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99,86	99,69	99,83

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA dinas pendidikan target tahun 2014 ini sebesar 99.86% dan akhirnya dapat terrealisasikan sebesar 99.69% sehingga persentase target indikator capaian nya mencapai 99,83%. Hal tersebut dapat di lihat dari perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA yang sebanyak 1.928 orang dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran tahun sebelumnya yang sebanyak 1.934 orang.

Di lihat dari perbandingan tersebut walau realisasi Mencapai target yang telah ditentukan. Namun dari jumlah siswa/siswi yang sebesar 1776 orang tersebut masih ada 6 (Enam) orang siswa/siswi SMA/SMK/MA yang tidak lulus saat ujian nasional. Hal ini lebih Banyak di banding dengan tahun 2014 dimana siswa yang tidak lulus sebanyak 2 (Dua) Orang Namun di harapkan di tahun kedepan nya siswa/siswi SMA/SMK/MA dapat lulus semua.

Pada Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA dinas pendidikan dapat dinyatakan berhasil dalam melaksanakan program-program. Dan diharap di tahun ke depan Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA yang mencapai 100 % dapat di pertahankan dengan baik bahkan harus lebih

sehingga tidak ada yang tidak lulus lagi pada siswa/siswi tingkat SMA/SMK/M

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR CAPAIAN		
			TAHUN 2014	REALISASI	%
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP	%	99.95	94,55	94,59

Pada Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP pada tahun 2014 dengan target yang di tentukan sebesar 99.95% dan dapat terrealisasi sebesar 94,55%, sehingga mencapai capaian 94,59%. Angka ini di dapat dari perhitungan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs sebanyak 3.869 orang dengan jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya sebanyak 4.092 orang. Maka dengan hasil realisasi yang ada maka dinas pendidikan dinyatakan belum berhasil dikarenakan masih kurangnya realisasi yang ditargetkan 99.95% dan hasil yang ada masih terrealisasi 94,55 %

Dengan hal ini maka dinas pendidikan akan lebih bekerja keras memberikan arahan kepada siswa dan orang tua agar lebih mementingkan pendidikan demi masa depan yang lebih baik.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR CAPAIAN		
			TAHUN 2014	REALISASI	%
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	96,93	96,93

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2014 dengan target yang di tentukan sebesar 100% dan dapat terrealisasi sebesar 96,93 %, sehingga mencapai capaian 96,93 %. Angka ini di dapat dari perhitungan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 3.004 orang dengan jumlah

lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebanyak 3.099 orang.

Dari target yang di tentukan tahun 2014 sebesar 100% dengan yang telah terrealisasi sebesar 93,96 % angka tersebut belum memenuhi Target yang telah di tentukan hal ini berbanding terbalik dengan keadaan tahun 2013.

Ketidak berhasilannya dari target yang di tentukan dengan angka yang telah terealisasi tersebut di sebabkan dari beberapa factor,factor-faktor tersebut meliputi:

- Masih banyaknya siswa yang lebih memilih bekerja guna membantu ekonomi keluarga.
- Masih kurangnya pengetahuan siswa tentang pentingnya pendidikan demi masa depan.
- Kurangnya dorongan dari orang-orang sekitar agar siswa melanjutkan pendidikan terutama dorongan dari orang tua.
- Masih adanya orang tua yang meminta bahkan membiarkan siswa untuk bekerja dari pada melanjutkan pendidikan.

Dari beberapa faktor di atas menjadi motivasi dinas pendidikan agar lebih bekerja keras memberikan arahan kepada siswa dan orang tua agar lebih mementingkan pendidikan demi masa depan yang lebih baik.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR CAPAIAN		
			TAHUN 2014	REALISASI	%
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	86,59	68,72	79,36

Secara umum realisasi pencapaian sasaran terhadap indicator kinerja pada guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dari target yang ditentukan sebesar 86,59 % dapat terrealisasikan sebesar 68,72 % sehingga

persentasenya mencapai angka 79,36 %. Hal ini dapat di lihat dari perhitungan perbandingan antara jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 2.555 orang dengan jumlah guru SD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK/MA sebanyak 3.718 orang.

Dari data di atas di dapat hasil bahwa dinas pendidikan masih harus terus meningkatkan dan menjalankan program-programnya. Dan di harapkan tenaga kependidikan harus sudah berkualifikasi S1/D-IV agar kualitas pendidikan lebih bermutu.

ASPEK KEUANGAN

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk membiayai 317 kegiatan adalah sebesar Rp. **389.755.284.026,00** sedangkan realisasinya sebesar Rp. **274.316.264.847,00** atau sebesar **64.29 %**.

b. Kesehatan

Dinas Kesehatan

Untuk menggambarkan hasil kinerja peningkatan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Berau terakhir dapat dilihat dari Capaian Kinerja yang disertai evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja masing-masing sasaran pada Dinas Kesehatan sebagai berikut :

Meningkatnya mutu dan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita serta UHH

Keberhasilan dan capaian kinerja sasaran meningkatnya mutu dan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita serta UHH dapat dilihat pada uraian berikut:

1. **Angka kematian ibu atau Maternal Mortality Rate (MMR**)

   Angka kematian ibu atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) adalah jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait

dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan *selama kehamilan melahirkan dan* dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Namun bagi wilayah yang jumlah kelahiran hidupnya tidak sampai dengan angka 100.000 tidak diwajibkan menggunakan angka tersebut tetapi diwajibkan menggunakan **angka absolut** atau jumlah sebenarnya, tetapi rumus diatas tetap dipedomani sebagai standar dan merupakan target setiap wilayah. Oleh Karena Kelahiran Hidup di kabupaten Berau tergolong kecil pada Tahun 2014 hanya 5.234 jauh dibawah 100.000 maka di kabupaten Berau digunakan angka Absolut dan jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2015 MDGs adalah 102 /100.000 Klh maka dikabupaten Berau pada tahun 2015 paling tinggi kematian Ibu adalah 5 Kasus.

- Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator *Millenum Development Goals* (MDGs) yang Secara Nasional perlu mendapatkan perhatian khusus karena capaiannya masih sangat jauh dari target 102 /100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, bahwa AKI Indonesia adalah 359 perseratus ribu kelahiran hidup sedangkan Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 terdapat 111 kasus kematian . Berdasarkan Laporan rutin Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2013 jumlah kematian ibu di Indonesia adalah 5.019 kasus sedangkan Propinsi Kaltim adalah 125 kasus.
- Kematian ibu di Kabupaten Berau mulai tahun 2011 adalah 8 kematian dari 4.453 Kelahiran hidup, Tahun 2012 terdapat 10 kematian dari 4.644 Kelahiran hidup, pada tahun 2013 terdapat 15 kematian dari 4.678 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2014 terdapat 11 kematian dari 5.324 kelahiran hidup.

- Penyebab kematian ibu Faktor medis (langsung dan tidak langsung) yaitu : perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (eklamsi) dan penyakit ibu penyerta kehamilan.

Berikut analisis kematian ibu di Kabupaten Berau :

Permasalahan yang dihadapi :

- Belum semua bidan Kampung tinggal di Kampung, dan belum semua bidan kampung mempunyai tempat pelayanan yang bisa sekaligus dijadikan tempat tinggal belum semua dukun bermitra dengan bidan.
- Walaupun persalinan ditolong tenaga kesehatan sudah tinggi, namun masih banyak persalinan tersebut yang dilakukan di rumah dan bukan di fasilitas kesehatan.
- Belum semua Poskesdes serta Bidan Kampung memiliki sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk menolong persalinan.
- Masih ada beberapa Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada Ibu Hamil, Melahirkan, dan Nifas yang belum sesuai standar.
- Masih ada kepercayaan sebagian masyarakat yang lebih memilih persalinan ditolong tenaga non kesehatan.
- Koordinasi dan integrasi lintas program dan lintas sector masih kurang optimal.
- Melemahnya kegiatan pendataan dan pemantauan wilayah setempat (PWS) kesehatan ibu oleh Puskesmas, Pustu, poskesdes serta Tenaga Bidan Kampung
- Sistem pencatatan dan pelaporan belum sesuai yang diharapkan (ada keterlambatan pengiriman laporan).
- Puskemas yang telah dilatih PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) belum sepenuhnya berfungsi secara optimal disebabkan mobilitas tenaga Kesehatan tinggi terutama tenaga

dokter yang merupakan TIM PONED (dokter, perawat, bidan) pada umumnya adalah tenaga Non PNS.

- Belum kuatnya sistem rujukan dari puskesmas ke RSU dan Klinik Ibu dan Anak sebagai fasilitas lanjutan
- Peran serta masyarakat khususnya yang terkait dengan upaya kesehatan ibu belum maksimal. Keluarga dan masyarakat masih belum optimal untuk mencegah terjadinya 4 terlalu dalam kehamilan atau persalinan (terlalu muda hamil, terlalu tua hamil, terlalu banyak dan terlalu pendek jaraknya) dan 3 terlambat (terlambat mengambil keputusan mencari pelayanan kesehatan terampil, terlambat tiba di rumah sakit karena masalah transportasi dan terlambat dalam tindakan medis).
- Dasa wisma sebagai ujung tombak peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak , pada kenyataannya Dasa wisma belum berjalan dengan maksimal. Tidak satupun Desa Siaga dikabupaten Berau yang pada status mandiri, sebagian besar desa siaga pratama.

1) Kegiatan yang dilaksanakan Dinas kesehatan pada tahun 2014 sebagai upaya menurunkan AKI meliputi :

Pemenuhan tenaga Bidan di kampung dan puskesmas induk serta dokter melalui Tenaga Kontak kegiatan operasional Puskesmas.

Pembangunan Poskesdes sebagai tempat pelayanan kesehatan sekaligus tempat tinggal Bidan Kampung (2014) 16 unit .

- Pembentukan TIM Audit Maternal Perinatal (AMP) yang terdiri dari IBI, PPNI, IDI, PKK, Pemberdayaan Perempuan Serta kepala Puskesmas. Melakukan pengkajian dan Pembelajaraan kasus kematian ibu dan perinatal baik yang terjadi di rumah, puskesmas/jaringannya, rumah sakit dan

fasilitas kesehatan lain serta Lokakarya. Penelaahan kasus ini menghasilkan rekomendasi pencegahan kasus kematian.

- Pemegang Program Kesehatan keluarga dinas kesehatan melaksanakan Rapat Lintas Sektor PWS KIA serta Monitoring dan Evaluasi program di Puskesmas.
- Melaksanakan pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun dengan peserta Bidan dan Dukun 36 orang .
- Melaksanakan Pelatihan Klas ibu hami pada 28 orang petugas KIA.

2) Usulan Pemecahan Masalah

- Meningkatkan Kompetensi tenaga kesehatan dalam program kesehatan ibu, baik di Puskesmas maupun di Poskesdes/Kampung melalui pelatihan teknis yang terkait dengan KIA
- Menguatkan motivasi dan komitmen tenaga kesehatan di Puskesmas maupun di Poskesdes/Kampung dalam menjalankan program.
- Memenuhi kekurangan sarana, prasarana, dan peralatan Kesehatan untuk pelayanan KIA termasuk pemenuhan poskesdes.
- Meningkatkan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung program KIA termasuk menyiapkan tempat Pelayanan dan Tempat tinggal bagi tenaga Bidan di kampung yang belum punya Poskesdes.
- Meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

- Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) dalam Desa Siaga, dan pengaktifan kelompok Dasa Wisma
- Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.
- Meningkatkan koordinasi dan integrasi Lintas Program/Lintas Sektor (LP/LS) untuk mendukung kegiatan KIA.

2. **Cakupan kunjungan ibu hamil K4**
   - Ibu hamil K-4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan.
   - Kunjungan ibu hamil sesuai standar adalah pelayanan yang mencakup minimal : (1) Timbang badan dan ukur tinggi badan, (2) Ukur tekanan darah, (3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) (4) Skrining status imunisasi tetanus (dan pemberian Tetanus Toksoid), (5) (ukur) tinggi fundus uteri, (6) Pemberian tablet besi 90 tablet selama kehamilan), (7) Penentuan Presentasi janin dan Denyut jantun Janin (DJJ), (8) temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling) termasuk Keluarga Berencana, (9) Test laboratorium sederhana (Hb, Protein urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg, Sifilis, HIV,Malaria, TBC) bila belum perna dilakukan sebelumnya. (10) Tata laksana Kasus
   - Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal serta Kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke Tenaga kesehatan.

- Berdasarkan Laporan Rutin Capaian K4 secara nasional pada tahun 2013 adalah 86.85 % sedangkan capaian k4 Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 adalah 84.99% sedangkan Kabupaten Berau 70.80% pada tahun 2013 dan 70.45% pada tahun 2014 .
- Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K4 kabupaten Berau Tahun 2014 adalah 70.45% dengan capaian masing-masing Puskesmas dapat dilihat pada lampiran

3. **Persalinan oleh Tenaga yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**
   - Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan diantaranya tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
   - Cakupan Persalinan oleh Nakes secara nasional pada tahun 2013 adalah sebesar 90,88%, sedangkan capaian di Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 adalah 90.86.
   - Kemungkinan untuk lost data sangat kecil, sebab Jumlah ibu hamil yang pernah kontak dengan petugas kesehatan sebanyak 5.540 orang (87 %) sedangkan jumlah sasaran bumil 6.365, dan jumlah persalinan sehingga kemungkinan jumlah ibu hamil yang ada di Berau sebanyak 5.540. Jumlah seluruh persalinan yang tercakup

baik oleh tenaga yg berkompetensi (84.01%), perawat (1%) dan dukun,lainnya 14.99 %.

- Kabupaten Berau merupakan daerah yang mobilisasi penduduknya sangat tinggi dan tentunya ini berpengaruh pada sasaran pelayanan kesehatan ibu mulai dari antenatal, persalinan , Nifas dan Bayi balitanya

4. **Cakupan Pelayanan Nifas**

- Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari, pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A 2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan.
- Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi :
  - Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);
  - Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri);
  - Pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain;
  - Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;
  - Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana;
  - Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.
- Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (Cakupan KF3). Indikator ini menilai kemampuan dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar. ini di sebabkan oleh :
- Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan nifas di Kabupaten Berau adalah Persalinan yang di rumah sakit setelah pulang ke rumah tidak tercakup secara menyeluruh oleh pengelola program KIA di Puskesmas, terutama di wilayah perkotaan (Puskesmas

Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Bugis dan Tanjung Redeb.

Data yang diterima dari rumah sakit terutama alamat ibu bersalin tdak tercatat dengan lengkap sehingga pihak puskesmas mengalami kesulitan untuk melakukan pelacakan. Dasa Wisma sebagai sumber data KIA dari sisi masyarakat belum optimal menjalankan fungsinya.

5. **Cakupan Kunjungan Bayi Dan Balita**

- Bayi merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan maupun serangan penyakit. Kesehatan bayi dan balita harus dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan kesehatan bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita.
- Bayi adalah anak berumur 29 hari – 11 bulan.
- Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulandi sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhandan sebagainya melalui kunjungan petugas.
- Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi 5) Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi : konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya

bayi sakit (sesuai MTBS), pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6 – 11 bulan. 6) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan.

- Anak balita adalah anak berumur 12 - 59 bulan. Setiap anak umur 12 - 59 bulan memperoleh pelayanan pemantauanpertumbuhan setiap bulan, **minimal 8 x dalam setahun** yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya.
- Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan pertinggi/panjangbadan (BB/TB). Ditingkat masyarakat pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per umur (BB/U) setiap bulan di Posyandu, Taman Bermain, Pos PAUD, Taman Penitipan Anak dan Taman Kanak-Kanak, sertaRaudatul Athfal dll.Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut atau berat badan anak balita di bawah garis merah harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan untuk menentukan status gizinya dan upaya tindak lanjut.
- Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar,gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas. Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang lebih memiliki kompetensi.
- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak usia 12-59 bulan dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK minimal 2 kali

pertahun (setiap 6 bulan) dan tercatat pada Kohort Anak Balita dan Prasekolah atau pencatatan pelaporan lainnya. Pelayanan SDIDTK dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak.

- Suplementasi Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) diberikan pada anak umur 12- 59 bulan 2 kali pertahun (bulan Februari dan Agustus). Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi anak balita sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa :

1) Kohort bayi dan balita belum dapat dipergunakan secara maksimal oleh pengelola program KIA dan Bidan Desa.
2) Pemahaman yang berbeda dalam memahami Definisi operasional cakupan kunjungan bayi dan cakupan kunjungan balita.
3) Belum terlaksananya Monev pelayanan kesehatan anak.

Pemecahan Masalah

1. Sumber Daya Manusia

   Jumlah SDM kesehatan di Kabupaten Berau sebenarnya cukup. Tetapi kinerja, disiplin, pengetahuan dan keterampilan petugas masih perlu untuk diperkuat. Hal ini dapat dilakukan dengan :

   a. Menegakkan disiplin bidan didesa, dengan memberikan teguran dan Punishment pada Bidan yang bermasalah. Apabila disiplin ini tidak ditegakkan maka akan sangat berpengaruh pada penurunan AKI dan AKB.

b. Di buatnya penetapan indikator Kinerja Bidan dan perlunya supervisi fasilitatif oleh Bikor puskesmas dan Dinas kesehatan.
c. Pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan Skill dan FGD (Fokus Group Discution) yang sering ditingkat puskesmas pembantu.
d. Membuat SK Bikor Puskesmas untuk memberikan rasa nyaman pada Bikor dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Metode Pelayanan :
   a. Perbaikan sistem pencatatan pelayanan kesehatan sampai ketingkat pustu dan tingkat posyandu dengan menggunakan sistem kohort untuk memudahkan pemantauan masing-masing Ibu, Bayi dan Balita.
   b. Perlunya koordinasi antar program terutama gizi untuk pengisian data penimbangan dan suplementasi vitamin A.
   c. Penguatan mikro manajemen tenaga kesehatan ditingkat puskesmas sampai ke pustu untuk mengoptimalkan tenaga yang telah ada.
   d. Perbaikan sistem pelaporan dari Rumah sakit, Klinik Ibu dan Anak, Dokter Praktek dan Bidan Praktek mandiri.
   e. Koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk menuliskan alamat dengan lengkap sesuai dengan tempat tinggal ibu yg sebenarnya (alamat sampai dengan Jln dan RT)
   f. Membuat MOU Sistem Rujukan dengan pihak RSUD Abdul Rifai dan Klinik Ibu dan Anak (APBD Perubahan)
   g. Kerja sama dengan Lintas sektor (PKK, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan DPMPK) dalam penurunan AKI dan AKB.

h. Untuk puskesmas perkotaan (Puskesmas Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Bugis dan Tanjung Redeb) perlu dilakukan :

Pembagian wilayah tanggung jawab Bidan yg ada di puskesmas induk untuk dilakukan pemantauan, karena jumlah Bidan hanya sedikit maka pemantauan bisa difokuskan pada ibu dan Anak yang mempunyai beresiko.

3. Penganggaran :
   a. Dalam penganggaran BOK Perlu pengarahan anggaran yang ada untuk penguatan program kesehatan ibu dan anak . sehingga realisasi keuangan berbanding lurus dengan realisasi pencapaian program.
   b. Peningkatan penyerapan anggaran yang ada di seksi kesga.
   c. Perubahan pola pikir petugas kesehatan dalam melaksanakan kegiatan merupakan tupoksi bukan berdasarkan anggaran.
4. Peralatan :
   a. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan Bidan KIT, O2 dan fasilitas lain yang mendukung pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Penambahan peralatan sdidtka untuk pustu.
   b. Perlunya pemenuhan pendukung pelayanan MTBS dan MTBM sampai ketingkat puskesmas pembantu.

Meningkatnya status Gizi

1) Ibu Hamil yang mendapat Tablet Fe

Tablet Tambah Darah (TTD) adalah tablet yang mengandung Fe dan Asam Folat . Ibu Hamil dikatan mendapa Tablet Tambah Darah (Fe.3) adalah ibu yang selama masa kehamilannya minimal mendapat 90 TTD.

Capaian : Hasil cakupan Fe.3 pada ibu hamil pada tahun 2014 adalah 62,42%, jauh dari target yaitu 85%, dan lebih rendah pencapaiannya dibanding tahun 2013 yaitu 72,72%.

- Penyebab : Hasil capaian Fe 3 tahun 2014 hanya 62,42, ini sangat jauh dari target yang ditetapkan yaitu 85%, kalau dibandingkan dengan cakupan K4, hasilnya tidak jauh berbeda. Penyebab adalah 1) masih rendahnya kunjungan ibu hamil pada kehamilan triwulan terakhir, membuat rendahnya partisipasi ibu hamil terhadap tablet tambah darah (Fe) 2). Kurang koordinasi petugas gizi (TPG) dengan petugas KIA di Puskesmas dalam pemberian tablet Fe).
- Usul Pemecahan Masalah : 1). Petugas Gizi dengan petugas KIA harus selalu koordinasi, 2). TTD diberikan selama kehamilan, tidak hanya di berikan pada kehamilan tiga bulan terahir, 3). Perlu TTD yang rasanya lebih enak dan kemasan menarik, 4) Pada saat pemberian TTD pada ibu hamil, harus dibarengi dengan konseling.

2) Balita yang ditimbang berat badannya

- Pemantauan Pertumbuhan anak dilakukan melalui penimbangan berat badan secara teratur dan menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS). Kartu tersebut berfungsi sebagai instrumen penilaian pertumbuhan anak dan sebagai dasar strategi pemberdayaan masyarakat yang telah dikembangkan sejak awal 1980-an.
- Pemantauan pertumbuhan mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yang pertama adalah sebagai strategi dasar pendidikan gizi dan kesehatan masyarakat, dan yang kedua adalah sebagai sarana deteksi dini dan intervensi gangguan pertumbuhan serta *entry point* berbagai pelayanan kesehatan anak (misalnya imunisasi, pemberian kapsul vitamin A, pencegahan diare, dll) untuk meningkatkan kesehatan anak.

- Cakupan penimbangan balita di posyandu (D/S) di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 80,30%. Cakupan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 75,1% Sedangkan di Propinsi Kaltim pada tahun 2013 adalah 65.37.
- Masalah yang dihadapi : 1). Kurangnya komitmen petugas baik ditingkat puskesmas/kecamatan juga di tingkat kabupaten (lintas program/lintas sektoral) dan pemangku kepentingan 2). Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Posyandu, 3). Kurangnya kapasitas kader, 4). Kurangnya prasarana serta kualitas pelayanan di posyandu, terutama sistem 5 meja belum berjalan optimal
- Usul Pemecahan Masalah : 1). Melaksanakan Lokakarya mini triwulanan baik lintas program maupun lintas sektor , 2).Meningkatkan peran aktif organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM dan sukarelawan, 3). Memotivasi keluarga melalui kunjungan rumah, 4). Peningkatan kapasitas kader, 5) Pembinaan kader, Pemberian penghargaan kepada kader,6). Mengintegrasikan posyandu dengan BKB dan PAUD, 7). Melengkapi sarana dan prasarana di posyandu, dan PMT.

Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular

Permasalahan yang ditemui pada pencapaian Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular adalah :

a) **Angka Kesakitan Malaria** mulai tahun 2012 dipergunakan Annual Parasite Indeks (API) yaitu jumlah penderita Malaria Positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dibagi dengan jumlah Penduduk sasaran sedangkan sebelumnya menggunakan AMI (Annual Malaria Indeks) yaitu Jumlah Penderita Malaria kliniks dibandingkan dengan penduduk sasaran. Pertimbangan penggunaan API yaitu :

- Pengobatan yang diberikan berdasarkan dengan diagnose penyakit dan pemeriksaan Laboratorium.
- Menghindari terjadinya resistensi terhadap pengobatan malaria dan pemborosan obat malaria.
- Semua Puskesmas induk dikabupaten Berau telah memiliki peralatan untuk melakukan Deteksi Malaria (RDT) .
- Pada Tahun 2014 ditemukan Penderita Malaria klinis 1.236 dan penderita malaria Posistif 64 penderita sehingga API kab. Berauadalah 0.25 ‰(Daerah endemis rendah API < 1 ‰)

b) **Angka Kesakitan (Incidence Rate) Demam Berdarah Dengue** . Penyakit Demam berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes,* misalnya *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus.* PenyakitDBD dapat muncul sepanjang tahun dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

- penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Berau cenderung meningkat dan penyebarannya semakin luas. Pada tahun 2014 Angka Kesakitan DBD 126.42 per 100.000 penduduk , CFR adalah 0.63% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 hanya 76.44 per 100.000 penduduk dan jika dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun 2013 IR adalah 45.85 per 100.000 penduduk dengan CFR 0.77%.
- perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan di rumah sakit dan puskesmas (dokter, perawat, dan lain) sarana penunjang diagnostik dan penatalaksanaan bagi penderita di sarana pelayanan kesehatan.

c) **Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau *Case Detection Rate* (CDR)** adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

- Capaian Penemuan pasien baru TB BTA atau *Case Detection Rate* (CDR) pada tahun 2014 adalah 69.65% mengalami peningkatan dari tahun 2013 44.67% hal ini karena adanya kerja sama yang baik antara dinas kesehatan, Dokter Spesialis Paru dan Puskesmas sehingga dapat dilakukan pelacakan kasus / survei Kontak dan kasus yang ditemukan dan yang datang 100% tertangani dengan obat Program. Hal yang mendukung lainnya adalah ketersediaan Obat dan alat bantu diagnostik di laboratorium karena kesigapan pemegang program
- Capaian target angka kesembuhan TB tidak bisa dijadikan acuan utama dalam penilaian kinerja karena TB tidak sama dengan penyakit lain yang hanya membutuhkan waktu pengobatan beberapa hari sudah dapat dinilai kesembuhannya tetapi TB butuh waktu minimal 6 bulan sehingga pasien yang start pengobatan pada tahun 2014 sebagian dapat dinilai pada tahun 2015.
- Permasalahan : Belum tersedianya analis pada semua puskesmas, Analis yang ada di puskesmas tidak semua memiliki kemampuan yang handal dalam memeriksa Sputum.
- Usulan : Perlunya beberapa analis dimagangkan untuk mempermahir keterampilan, Perlu penyediaan anggaran untuk pelacakan kasus TB/ survei kontak TB sampai ke pelosok. Perlu ada kerja sama antara Kesmas – Pemegang program untuk memberi penyuluhan dan sekaligus melakukan pemeriksaan ke rumah pasien untuk melihat kondisi rumah, kamar dan ventilasi termasuk kemungkinan penularan pada anggota keluarga lainnya.

d) **Pneumonia** adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan/atau kesukaran bernafas.

- Klasifikasi penyakit ISPA Dalam penentuan klasifikasi penyakit dibedakan atas dua kelompok yaitu kelompok untuk umur 2 bulan - < 5 tahun dan kelompok umur < 2 bulan .
- Untuk kelompok umur 2 bulan -< 5 tahun klasifikasi dibagi atas Pneumonia Berat , Pneumonia, dan batuk bukan Pneumonia Untuk kelompok umur < 2 bulan klasifikasi dibagi atas: Pneumonia berat dan batuk bukan Pneumonia. Dalam pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) klasifikasi pada kelompok umur < 2 bulan adalah infeksi bakteri sistemik dan infeksi bakteri local. Klasifikasi Pneumonia berat didasarkan pada adanya batuk dan/atau kesukaran bernafas disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (TDDK) pada anak usia 2 bulan - < 5 tahun.
- Untuk kelompok umur < 2 bulan klasifikasi Pneumonia berat ditandai dengan TDDK kuat atau adanya nafas cepat lebih atau sama dengan 60 x per menit.
- Klasifikasi Pneumonia didasarkan pada adanya batuk dan/atau kesukaran bernafas disertai adanya nafas cepat. Batas nafas cepat pada anak usia 2 bulan - < 1 tahun adalah 50 kali permenit dan 40 kali permenit untuk anak usia 1 - < 5 tahun. Klasifikasi batuk bukan Pneumonia mencakup kelompok penderita Balita dengan batuk yang tidak menunjukkan gejala peningkatan frekuensi nafas dan tidak menunjukkan adanya tarikan dinding dada bagian bawah kedalam. Dengan demikian klasifikasi batuk bukan Pneumonia mencakup penyakit-penyakit ISPA lain diluar Pneumonia seperti batuk pilek (*common cold, pharyngitis, tonsillitis, otitis*). Diberikan tatalaksana adalah diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk

Pneumonia diberikan antibiotika dan Pneumonia berat dirujuk ke Sarana Kesehatan yang lebih memadai. Sarana Kesehatan adalah semua sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta.

e) Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita adalah 10% dari jumlah balita. Secara nasional penemuan pneumonia balita hanya 24.46% jauh dibawah target nasional 80%. Begitu juga di Kabupaten Berau pada tahun 2014 hanya 10.62% .

f) **HIV Aids yang ditangani,** HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan *Voluntary, Counseling, and Testing(VCT), sero survey*, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

- Jumlah Penderita HIV AIDS di Kabupaten Berau tahun 2014 adalah 31 kasus mengalami peningkatan dari tahun 2013 → 15 Kasus. semua penderita yang ditemukan ditangani 100 % dan diserahkan ke Tim VCT di Rumah Sakit. Hal ini dapat terlaksana dengan baik karena kerja sama lintas sektor seperti RSU, dan BNK.
- Permasalahan : Sebagian besar penderita yang ditemukan adalah para pekerja seks yang datang dari luar Berau, Umumnya kerja sama dengan pemilik sarana tempat mereka kerja tidak secepatnya memberi informasi jika ada pendatang baru guna diperiksa sebelum bekerja / menularkan penyakit.

- Usulan kegiatan Perlu dipertahankan survei/pelacakan kasus ketempat hiburan sebagai resti, Perlu kerja sama dengan perusahaan untuk memeriksakan karyawan baik secara rutin saat medical check up maupun saat recruitmen untuk menemukan secara dini demi memutus mata rantai penularan dan sekaligus penanganan secara dini. Perlu pertimbangan SDM .

g) **Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI**) adalah Desa/Kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Secara Merata

1) Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pasal 16 : Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Pasal 19: Untuk melaksanakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat diperlukan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat
2) Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

3) Berdasarkan data Capaian kinerja terlihat bahwa Ketersedian Tenaga kesehatan diukur dari Ketersediaan Tenaga di Puskesmas induk Non Perawatan , Puskesmas Perawatan dan Puskesmas DTPK. Sampai dengan tahun 2014 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Berau adalah 19 unit dengan kategori Non Perawatan 8 unit dengan Ketersedian tenaga 39.29%, Puskesmas Perawatan 10 Unit dengan ketersediaan tenaga 51.08%, dan terdapat Satu Puskesmas kategori DTPK yaitu puskesmas Maratua. (perawatan) ketersediaa tenaga 61.90%. dari segi jumlah Tenaga kesehatan di puskesmas induk semakin meningkat namun ada beberap tenaga teknis yang masih kosong seperti tenaga D IV Promkes, DIV Epidemiologis sedangkan dari segi kualitas ada puskesmas yang jumlah perawat dan Bidan sudah mencukupi jumlah namun belum memenuhi Pendidikan D3. Begitu juga dengan ketersedian tenaga di Kampung , berdasarkan setiap kampung minimal 2 orang tenaga yaitu D3 Perawat 1 orang dan D3 Kebidanan 1 orang. Jumlah Keseluruhan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan adalah 911 orang.
4) Ketersedian Fasilitas Pelayanan Kesehatan semakin meningkat dan merata. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Berau meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C 1 (satu) Unit, Klinik Bersalin 1 unit, Puskesmas Induk pada tahun 2014 ada 19 unit , Puskesmas Pembantu 111 unit dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) ada 44 unit, Laboratorium Kesehatan daerah milik Pemda 1 unit, Instalasi Farmasi 1 unit, UPTD Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 1 unit. Pada akhir tahun 2014 telah dibangun Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Talisayan.

5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kampung masih kurang khususnya Fasilitas Pelayanan untuk Bidan Kampung . berdasarkan Data Kepegawaian Dinas Kesehatan tahun 2014 bahwa Bidan yang ditempatkan di Kampung ada 104 orang jika dilihat dari Poskesdes yang ada 44 unit maka terdapat 60 orang Bidan di kampung yang belum disiapkan tempat pelayanan yang sesuai standar sekaligus sebagai tempat tinggal.

Meningkatnya Pelayanan kesehatan yang bermutu di semua jenjang pelayanan kesehatan

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu di Semua Jenjang Pelayanan kesehatan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dilaksanakan peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan melalui Pendidikan dari Dokter ke Dokter Spesialis, Si Kesehatan ke S2 Kesehatan, D3 Kesehata Ke SI , dari DI ke DIII, serta melalui pelatihan-pelatihan teknis.

- Untuk menjaga Mutu pelayanan kesehatan maka Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Praktek harus mempunyai Surat Ijin Praktek, dan sarana Pelayanan Kesehatan Baik Pemerintah maupun swasta harus memiliki Surat Ijin Operasional.
- Dan Untuk meningkatkan Mutu pelayanan Kesehatan khususnya di Era JKN maka BPJS mempersyaratkan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang bekerja sama dengan BPJS pada tahun 2019 wajib akreditasi. Pada tahun 2014 terdapat 2 unit puskesmas yang telah mendapatkan Standar ISO 9001 yaitu Puskesmas Tanjung Redeb dan Puskesmas Kampung Bugis.

Terwujudnya Lingkungan Sehat

Kesehatan lingkungan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, menurut WHO (World Health Organization), kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.

- Puskesmas yang menyelenggarakan klinik sanitasi ditargetkan 85% namun yang melaksanakan baru ada 5 puskesmas yaitu puskesmas Gunung Tabur, Merancang Ulu, Teluk Bayur, Labanan, dan Batu Putih.Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Klinik Sanitasi yaitu belum tersedianya ruangan khusus untuk penyelenggaraan klinik sanitasi di puskesmas dan komitmen di puskesmas untuk melaksanakan klinik sanitasi masih kurang dimana pasien yang menderita penyakit yang berkaitan dengan faktor kesehatan lingkungan seharusnya direkomendasikan ke klinik sanitasi.namun sering tidak dilaksanakan.
- Secara umum capaian seluruh indikator kinerja utama seksi PL secara rata-rata masih dibawah target daerah. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai titik permasalahan antara lain :
  a. Masih kurang koordinasi dan integrasi lintas program di Puskesmas.
  b. Kerjasama lintas sektor yang masih kurang dari yang diharapkan.
  c. Masih adanya keterbatasan dana dalam kegiatan penyehatan lingkungan
  d. Masih kurangnya pemahaman beberapa sanitarian terhadap tugas pokok dan fungsinya di Puskesmas serta ruang lingkup tugas.

e. Masih kurangnya kompetensi beberapa sanitarian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Puskesmas.
f. Masih belum adanya pemahaman yang sesuai secara menyeluruh di kalangan sanitarian dalam menghitung cakupan realisasi program penyehatan lingkungan.
g. Masih kurangnya peralatan pendukung IS bagi sanitarian di Puskesmas.
h. Sistem pencatatan dan pelaporan belum sesuai yang diharapkan (ada yang tidak tercatat atau ada keterlambatan pengiriman laporan).
i. Belum adanya basis data yang memadai untuk memberikan gambaran mengenai program penyehatan lingkungan baik di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan.

Usulan Pemecahan Masalah:

1. Advokasi ke pemerintah daerah terkait penyediaan alokasi APBD yang memadai untuk kegiatan penyehatan lingkungan terutama memfasilitasi kegiatan sanitarian Puskesmas.
2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dengan membentuk Pokja Sanitasi atau yang sejenisnya yang merupakan wadah untuk menggalang kerjasama sehingga berbagi peran dalam mewujudkan Kabupaten Berau Sehat.
3. Meningkatkan koordinasi lintas program di level Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dalam mencapai Desa Siaga Aktif Purnama atau Mandiri, dengan program STBM sebagai unsur pendukungnya.
4. Meningkatkan pembinaan dengan menambah frekuensi MONEV oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas sehingga dapat meningkatkan pemahaman sanitarian tentang ruang lingkup tugasnya.

5. Meningkatkan kompetensi tenaga sanitarian dalam program penyehatan lingkungan dengan mengikutsertakan pada Pelatihan ataupun kursus-kursus yang terakreditasi.
6. Memberikan bantuan alat pendukung tugas sanitarian di Puskesmas.
7. Bagi Sanitarian Puskesmas, meningkatkan keaktifan pembinaan kader di Posyandu serta menggalang dukungan kader Posyandu dalam pendataan untuk wilayah kampung atau kelurahan.
8. Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.
9. Dinas Kesehatan membuat basis data yang terkoneksi dengan pihak Puskesmas maupun Provinsi dan Pusat.

Meningkatkatnya Promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dibidang kesehatan

Meningkatnya Kesadaran dan kemadirian masyarakat untuk hidup sehat menuju masyarakat yang sejahtera

Meningkatkatnya Promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dibidang kesehatan dengan indikator Rumah tangga ber perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS). Hasil data tabel PHBS tersebut diperoleh dengan menggunakan Survey terhadap Rumah Tangga. Berdasarkan data yang diambil secara ***total sampling*** sebanyak 11.378 Sampel Rumah Tangga yang dilakukan di 13 Kecamatan oleh Petugas Kesehatan di 18 Puskesmas. Capaian realisasi Rumah tangga Ber-PBHS 37.23 %, nilai ini masih jauh dari target yang diharapkan yaitu sekitar 55%. Penyebab utama rendahnya capaian:

- Meningkatnya Kesadaran dan kemadirian masyarakat untuk hidup sehat menuju masyarakat yang sejahtera Meningkatnya Kesadaran dan kemadirian masyarakat untuk hidup sehat menuju masyarakat yang sejahtera Meningkatnya Kesadaran dan kemadirian masyarakat untuk hidup sehat menuju masyarakat yang sejahtera

- Realisasi untuk Desa Siaga 100% karena semua Kampung telah dibentuk desa Siaga namun yang aktif baru ada 44 kampung (40%)
- Begitu pula untuk cakupan Posyandu Purnama Mandiri dari 240 posyandu yang masuk kategori purnama dan mandiri hanya 100 posyandu (41.67%). Posyandu Purnama Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu. Adapun Kendala yang dihadapi dalam peningkatan strata posyandu menuju purnama mandiri yaitu Kerjasama lintas sektor yang terkait masih kurang optimal serta rekrutmen kader baru sangat sulit, dan keinginan masyarakat untuk menjadi kader sangat rendah.
- Solusi : Memperkuat kelembagaan, Untuk memperkuat kelembagaan posyandu, di Tingkat Kab. Rutin diadakan rapat koordinasi Tim Pokjanal Posyandu. Tim ini secara berjenjang akan membina perkembangan posyandu secara berjenjang untuk meningkatkan strata posyandu menjadi purnama mandiri di tiap kampung. Pelatihan peningkatan kinerja kader.Mengikut sertakan tokoh masyarakat untuk memotivator masyarakat untuk mengunjungi posyandu.Menerapkan SMD dan MMD di posyandu yang tujuannya merumuskan masalah dan menetapkan cara penyelesaiannya, dalam rangka meningkatkan cakupan posyandu.

Meningkatnya sistem administrasi Kantor Dinas Kesehatan.

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan.

Terbangunnya manajemen kesehatan yang semakin sinergis.

Mengembangkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan.

Menyelenggarakan sistem keuangan Dinas Kesehatan Kab

a) **Meningkatnya sistem administrasi Kantor Dinas Kesehatan** khususnya pada tersedianya data perlengkapan dan aset (barang bergerak/ tidak bergerak) kantor Dinas kesehatan termasuk sarana pelayanan kesehatan yaitu : Kendala yang dihadapi dalam pencapaian
   - Belum adanya Kesinambungan Data
   - Beberapa Aset Dinas Kesehatan belum memiliki Dokumen kepemilikan yang resmi khususnya asset Tanah.
   - Data Aset/Inventris Khususnya pada Puskesmas dan Jaringannya belum berjalan dengan baik, tenaga yang ditunjuk sebagai pengelola barang pada puskesmas belum optimal pada umumnya memiliki tugas rangkap sehingga belum fokus

b) **Meningkatnya pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan.** Pengelolaan administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan Berau masih secara Manual.

c) **Terbangunnya manajemen kesehatan yang semakin sinergis**

   Salah satu indikatornya adalah Ketersediaan dokumen Perencanaan Program / Kegiatan Tahunan Pembangunan Kesehatan. Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan tentunya mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2011-2015 dengan mekanisme 1). Setiap tahun dilaksanakan evaluasi capaian Kegiatan/program dengan indikator sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) renstra, Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga diperoleh kondisi yang telah

dicapai , tantangan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi dan rencana pemecahan/tindak lanjut.setelah itu semuanya membuat rencana kerja termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (UPTD) menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang disampaikan ke Dinas Kesehatan pada Akhir Bulan Desember untuk Selanjutnya dikaji oleh masing-masing bidang dan menjadi salah satu masukan untuk menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan serta RUK tersebut akan diusulkan masing-masing puskesmas melalui Musrenbang Kecamatan. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesehatan tentunya mengikuti siklus perencanaan dan tahapan perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya.

Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) khususnya SOP administrasi Pemerintahan sesuai Peraturan menteri pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 Di Dinas Kesehatan dan UPTD sampai dengan akhir tahun 2012 telah dilakukan pendampingan penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan kerjasama dengan LAN Samarinda namun belum selesai semuanya. Sedangkan SOP Teknis setiap pelayanan kesehatan telah ada berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

d) **Mengembangkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan** dalam rangka meningkatkan Ketersedian data laporan Puskesmas maka dikembankan Sistem Informasi Kesehatan berbasis Tekhnologi yang pada tahun 2014 ditargetkan 20 namun sampai dengan saat ini belum berjalan maksimal karena :

- Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan berbasis teknologi masih terbatas, pada pengelola sistem Informasi Kesehatan di Kabupaten maupun di

puskesmas belum adanya tenaga teknis dibidang Teknologi Informasi.

- Komputer Jaringan dan perlengkapan jaringan Sistem Informasi Kesehatan Berbasis Teknologi sudah tersedia untuk 7 puskesmas, namun belum bisa berjalan dengan maksimal dikarenakan infrastruktur jaringan belum memadai dan masih dalam tahap pembenahan.

Usulan pemecahan masalah :

- Diperlukan adanya tenaga teknis dibidang Teknologi Informasi dalam pengelolaan sistem Informasi Kesehatan berbasis teknologi baik di kabupaten maupun di Puskesmas
- Diperlukan adanya pelatihan teknis bidang Teknologi Informasi bagi Pengelola Sistem Informasi Kesehatan di Kabupaten dan Puskesmas.
- Diupayakan untuk berkoordinasi dengan instansi teknis terkait dalam rangka mewujudkan pelaksanakan sistem informasi kesehatan berbasis teknologi agar bisa berjalan dengan maksimal.

e) **Menyelenggarakan sistem keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten** dilaksanakan dengan menggunakan SIMDA dan Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan masih perlu peningkatan baik dalam segih Kepatuhan terhadap Peraturan termasuk dalam hal Pembukuan , Penertiban Pajak, Ketepatan Pengelolaan dan penggunaan NPD , Administrasi pertanggung Jawaban Keuangan sehingga Peningkatan Pengetahuan Pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan dan UPTD sangat diperlukan termasuk Bimbingan dari Tim Audit Intern Inspektorat dan BPKP

Secara keseluruhan Persentasi Pencapaian Sasaran tahun 2014 adalah 83.55% meningkat dari tahun 2013 yaitu 81.34% dan tahun 2012 yaitu 80.81%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum ada peningkatan

dan perbaikan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau, meskipun ada hal-hal khusus yang perlu mendapatkan perhatian seperti Kematian Ibu, Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan dan lainnya.

SUMBER DAYA KESEHATAN

Dalam mencapai kinerjanya, Dinas Kesehatan didukung oleh beberapa sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Barang Milik Daerah.

1) SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan) adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan sedangkan Tenaga Kesehatan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan formal di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Secara Umum Kondisi SDM Kesehatan baik Secara Kuantitas maupun Kualitas termasuk Kategori Kurang hal tersebut dapat dilihat pada Jumlah SDM Kesehatan sampai dengan akhir tahun 2014 adalah 911 (Sembilan Ratus sebelas) orang yaitu PNS ada 599 (Lima ratus Sembilan puluh sembilan) orang dan Pegawai Non PNS / Tenaga Kontrak kegiatan 289 (Dua ratus delapan puluh sembilan) orang dan PTT Pusat 23 (dua puluh tiga).

Pemenuhan SDM Kesehatan di Puskesmas perlu mendapatkan perhatian lebih karena puskesmas merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarkat . Salah satu dasar untuk

menghitung kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 berdasarkan Standar minimal yaitu Kondisi minimal yang diharapkan terpenuhi agar puskesmas dapat terselenggaran dengan baik sebagaimana tabel berikut.

Tabel IV.1
Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan di Puskesmas
Berdasarkan Standar Minimal Tenaga Per Sarana/Kampung
Kabupaten Berau Tahun 2014

No	Uraian	Standar Minimal tenaga per sarana	Jumlah Sarana/Kampung	Kebutuhan
1	Puskesmas Perawatan wil. perkotaan	35	2	70
2	Puskesmas Non Perawatan Wil.Perkotaan	25	3	75
3	Puskesmas Perawatan Wil Terpencil/ST	31	9	279
4	Puskesmas Non Perawatan Wil Terpencil/ST	22	5	110
5	Kampung Pustu dan Poskesdes	2	110	220
Total Kebutuhan Tenaga				**754**
Total Tenaga PNS di Puskesmas				**481**
Total Kebutuhan Tenaga				**273**

Sumber : Subbag Umpeg, Dinkes 2014

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa Jumlah SDM Kesehatan Puskesmas yang PNS adalah 481 orang sementara tenaga yang dibutuhkan minimal 754 orang, kekurangan SDM tersebut diatasi melalui Tenaga Kontrak baik yang dibiayai oleh APBN Kementerian Kesehatan (PTT pusat) maupun yang dibiaya oleh APBD melalui pengadaan tenaga kontrak kegiatan, sampai dengan akhir tahun2014 tenaga Kontrak yang ditugaskan di Puskesmas

sejumlah 278 orang dengan rincian PTT Pusat dan Penugasan Khusus ada 23 orang dan Tenaga Kontrak kegiatan ada 255 orang.

Sedangkan dari segi jenis SDM Kesehatan masih ada jenis tenaga tertentu yang masih kosong di puskesmas seperti Tenaga D3.

a) SDM Kesehatan berdasarkan Pendidikan

Jumlah SDM Kesehatan PNS dan Non PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.2
Rekapitulasi Jumlah SDM Dinas Kesehatan Dan UPTD
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Kabupaten Berau Tahun 2014

	Uraian	Kualifikasi Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	D3	D1	SLTA	
	PNS	7	90	228	18	256	599
	Non PNS	0	49	178	0	85	312
Jumlah		7	139	406	18	341	911

Sumber : Subbag Umpeg, Dinkes 2014

b) SDM Kesehatan berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongannya SDM Kesehatan terdiri atas golongan I, golongan II, golongan III, golongan IV sebagai berikut :

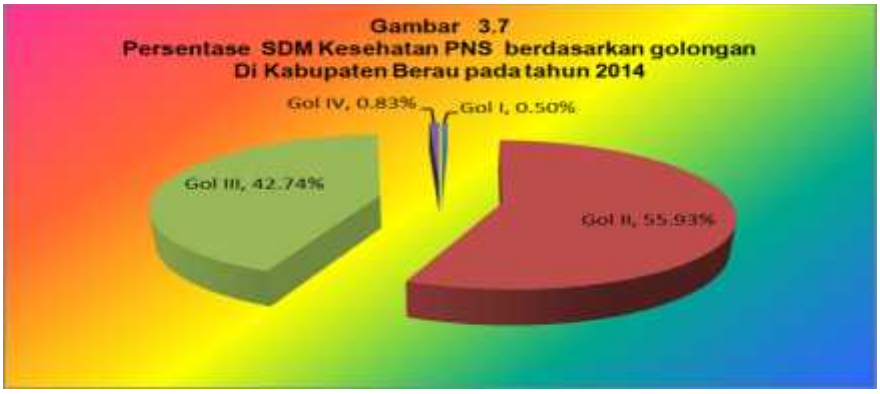

Sumber : Subbag Umpeg, Dinkes, 2014

c) Jumlah SDM Kesehatan berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jabatannya Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan UPTD dibedakan atas Jabatan Struktural Eselon II (Kepala Dinas), III (Sekretaris dan Kepala Bidang), IV (Kepala Seksi, Kasubbag, kepala UPTD) dan Jabatan Fungsional (Umum dan tertentu), dengan rincian sebagai berikut :

Jabatan Fungsional tertentu yang ada di UPTD Dinas Kesehatan ada 9 (Sembilan) yaitu :

1) Dokter
2) Dokter Gigi
3) Perawat
4) Bidan
5) Sanitian
6) Apoteker
7) Nutrionis
8) Asisten Apoteker
9) Perawat Gigi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasala 88 ayat 1 Tenaga kesehatan lulusan pendidikan dibawah Diploma Tiga yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkan UU ini tetap diberikan kewenangan untuk menjalangkan praktik sebagai tenaga kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, .ini berarti bahwa paling lambat oktober 2019 . Berdasarkan Data Kepegawaina Dinas Kesehatan Tenaga Kesehatan lulusan dibawah Diploma Tiga adalah sebagai berikut :

- Bidan → 17 orang
- Perawat (SPK)→ 123 orang.

- Tenaga Kesehatan Lainnya → (SPR,SPRG, SMF, SAA, SPAG, SMAK, PCPM, SPPH, Pekarya) ada 48 orang.

2) SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam mencapai kinerjanya pada tahun anggaran 2014 Dinas Kesehatan didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBD Kab. Berau :

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau adalah Rp **47.329.662.220,- dari alokasi Rp. 58.371.300.000 (81.08%**)

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau adalah Rp. **75.885.391.612,-** Dari alokasi Rp. **94.032.190.058, - (80.70%**

3) SARANA PRASARANA KESEHATAN

Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan (Kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, Peningkatan Kesehatan, Pengobatan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan oleh Pemerintah atau Masyarakat). Sarana kesehatan Pemerintah di Kabupaten Berau meliputi:

1. Pada akhir tahun 2014 bertambah 1 (satu) unit Rumah Sakit Pratama Talisayan.
2. Puskesmas secara keseluruhan berjumlah 19 unit yang tersebar di 13 kecamatan.
3. Pusmas Pembantu dan Poskesdes sesuai dengan Standar bahwa Setiap Kampung ditempatkan 2 tenaga yaitu Perawat dan Bidan sehingga harus dilengkapi dengan sarana Pustu (Tenaga

keperawatan) dan Poskesdes (Pelayanan Kebidanan) sampai dengan tahun 2014 dari 110 kel/Kampung yang memiliki Pustu 108 masih ada 3 Kampung yang belum ada Pustu yang direncanakan pada tahun 2014 dan Poskesdes yang ada baru 26 unit dari 110 kel/kampung (23.64%) sehingga masih kekurangan 76.36% akan dilengkapi secara bertahap.

4. Laboratorium Kesehatan daerah (Labkesda) sampai dengan akhir tahun 2014 sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang Alat Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah, Tenaga masih sangat terbatas.
5. UPTD Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sampai saat ini belum mempunyai Kantor tetap (masih menyewa) .
6. Instalasi Farmasi Kabupaten sarana Prasana yang dimiliki masih termasuk Kategori kurang termasuk Kondisi Bangunan /Gedung yang perlu untuk direhabilitasi.
7. Mobil Puskesmas Keliling (Puskel) digunakan puskesmas untuk melaksanakan Operasional Pelayanan Kesehatan Luar Gedung ke kampung dan Ambulance untuk merujuk pasien. Pada tahun 2014 terdapat tambahan mobil puskel 5 unit dan 3 unit mobil Ambulance rujukanyang bersumber dari APBN TP Kementerian Kesehatan RI dan 2 unit ambulance bersumber Bantuan Keuangan Propinsi serta 1 unit APBD.
8. Kendaraan Roda 2 juga sangat diperlukan di puskesmas, pustu dan poskesdes sebagai kendaraan operasional pelayanan kesehatan dilapangan.

   Demikian juga halnya dengan Alat Kesehatan yang ada pada sarana kesehatan tersebut pada umumnya masih kurang dari kebutuhan.

RSUD Dr A Rivai.

RSUD Dr.Abdul Rivai telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra RSUD Dr.Abdul Rivai. tahun 2011-2015. Evaluasi dan Analisa Pencapaian sasaran dapat dilihat dari table Kinerja Pelayanan Rumah Sakit dr.Abdul Rivai sebagai berikut:

Tabel IV.3

NO	INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Ket
1	Kunjungan Pasien R. Jalan	Orang	35.485	35.110	1,1%	turun
2	Kunjungan IGD	Orang	2.026	5.471	170,0%	naik
3	Rawat Inap	orang	8.801	9.145	3,9%	naik
4	BOR	%	68,3	70,5	3,2%	naik
5	BOR Kelas III	%	62,2	68,2	9,6%	naik
6	ALOS	Hari	3,9	3,9	0,0%	tetap
7	TOI	Hari	2,2	2,0	9,1%	turun
8	BTO	Kali	51,8	53,8	3,9%	naik
9	NDR	‰	6,8	17,8	161,8%	naik
10	GDR	‰	12,5	34,3	174,4%	naik

Dalam pencapaian sasaran pelayanan yang dijadikan dasar ukuran adalah indikator kunjungan Rawat Jalan, Kunjungan IGD Rawat Inap melalui perhitungan BOR, ALOS, TOI BTO, NDR dan GDR dengan menggunakan standar pelayanan Minimal (SPM) sebagai dasar ratio kelayakan.

Jumlah Kunjungan pasien baik kunjungan ke rawat jalan maupun IGD sangat berpengaruh terhadap kredibilitas rumah sakit dalam optimalisasi dan responsifitas pelayanan, sedangkan indikator BOR sangat menentukan tingkat kepadatan penggunaan tempat tidur, ALOS menggambarkan rata-rata lamanya perawatan, TOI menggambarkan interval pemakaian tempat tidur dengan kekosongannya, BTO menunjukan

frekuensi pemakaian tempat tidur dalam setahun, NDR merupakan gambaran angka kematian >48 jam artinya kinerja pelayanan rumah sakit setelah pasien dirawat diharapkan dapat menurunkan angka tersebut, demikian pula halnya dengan GDR dengan menggambarkan angka kematian umum diharapkan setiap tahunnya menurun.

1. Anggaran dan Realisasi Anggaran

   Realisasi anggaran belanja RSUD dr Abdul Rivai berdasarkan DPA Perubahan tahun 2014 yaitu dari total dana sebesar Rp. **35.497.079.895,00** direalisasikan sebesar Rp. **29.840.115.384,00**

   Keterangan:

   1. Perspektif pelanggan:

   a. Kepuasan pelanggan

   Secara umum realisasi pencapaian sasaran terhadap Indikator kinerja sudah mencapai sasaran hal tersebut tercemin dari indikator keberhasilan yaitu tersedianya dana dan sdm, terlaksananya pelayanan makan pasien, meskipun banyak indicator kepuasan pelanggan yang belum terukur.

   b. Terlayaninya pasien dengan obat dan perbekalan obat yang berkualitas dan harga yang terjangkau

   Untuk realisasi pencapaian sasaran ke dua terhadap indikator kinerja telah mencapai 100% hal tersebut terindikasi dari indikator keberhasilan yaitu tersedianya dana Rp 19.147.542.045,00 melalui anggaran BLUD program pengadaan obat beserta perbekalanya dengan realisasi anggaran sebesar Rp 18.123.297.107,00 yang dapat disimpulkan bahwa sasaran ini telah tercapai.

   c. Mengoptimalkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan spesialistik

Pencapaian sasaran yang ketiga terhadap indikator kinerja bahwa cakupan kunjungan pasien ada kenaikan pada kunjungan gawat darurat sebesar 170%, penurunan kunjungan rawat jalan 1,1%. Hal tersebut tidak terlepas dari kegiatan melaksanakan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan di dukung anggaran sebesar Rp 233.086.450,00 dengan realisasi anggaran Rp 176.167.850,00 (75,58)

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

a. Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran yang baik dan akuntabel

Pencapaian sasaran yang pertama pada perspektif ini di capai dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja yang mencapai 100% hal tersebut dapat tercemin dari input tersedianya dana dan SDM dengan out put terlaksananya administrasi perkantoran dan hasil terciptanya pelayanan administrasi perkantoran dengan dukungan dana Rp. 4.483.791.500 Yang bersumber dari APBD dengan Realisasi sebesar Rp 3.550.576.738 (79,19%)

b. Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit untuk mencapai tingkat kepuasan pelanggan

Pencapaian sasaran pada prespektif ini dapat di lihat dari beberapa indikator diantaranya Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 100%, Ketepatan waktu pemeliharaan alat (non medik) 100%, Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu 100% dengan dukungan dana sebesar Rp 1.488.361.900 dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.156.255.750 (77,69%) sumber

dana dari APBD sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai.

3. Perspektif Pertumbuhan Dan Pembelajaran

a. Meningkatnya mutu SDM dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit

Untuk melihat pencapaian sasaran ini dapat kita lihat dari dukungan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal sebesar Rp. 2.106.750.000 cakupan realisasi sebesar Rp 1.604.187.770 (76,15%) hal ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang dapat menambah pengetahuan bagi karyawan untuk mendukung perubahan pelayanan yang lebih bermutu sehingga berdampak pada kwalitas pelayanan, walaupun belum semua lini dapat tercapai namun dapat di prioritaskan pada bagian yang berdapak langsung bagi pelayanan rumah sakit.

b. Terciptanya Rumah Sakit sebagai pusat rujukan medis

Sasaran ini dapat kita lihat dari beberapa indikator diantaranya jumlah kunjungan Rawat jalan menurun1,1% yaitu dari 35.485 pada tahun 2013 menjadi 35.110 pada tahun 2014. Kunjungan Gawat darurat naik 170,0% yaitu dari 2.026 pada tahun 2013 menjadi 5.471 pada tahun 2014 . Pada sasaran ini di dukung dengan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan dan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 657.445.000 untuk dua kegiatan, realisasi anggaran ini sebesar Rp. 500.180.900 (76,08%). Sehingga disimpulkan sasaran ini telah tercapai yaitu rumah sakit sebagai rujukan medis.

c. Terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Dengan indikator terpenuhinya cakupan pelayanan instalasi rawat darurat sebesar 5.471 dan BOR (pemanfaatan tempat tidur) 70,5 % kunjungan rawat jalan sebesar 35.110, meningkatnya pendapatan dan jasa pelayanan kesehatan, memberikan gambaran sasaran ini tepat karena dengan dukungan sarana dan prasarana pelayanan dapat dilakukan untuk tahun ini Anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp 3.047.120.000 terealisasi Rp 2.422.329.997 (79.5%).

d. Terpenuhinya layanan spesialistik rumah sakit

Untuk memenuhi dokter spesilistik yang belum dimiliki oleh RSUD Dr, Abdul Rivai maka dilakukan kerja sama dengan Rumah Sakit Wahab Syahrani Samarinda yang memiliki dokter yang kita butuhkan seperti dokter jantung karena sangat diperlukan hal ini dapat disimpulkan dengan indikator terlaksananya kerjasama dengan RSUD Dr.Abd Wahab Syahranie untuk dokter spesialis jantung sehingga kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp 602.355.000 dan realisasi sebesar Rp 219.913.100 (36,5%).

4. Perspektif keuangan

Meningkatnya akuntabilitas publik kepada Stakeholder

Untuk mencapai sasaran ini di perlukan indikator terbuatnya laporan keuangan yang trasparan terbuatnya laporan kinerja terinventorinya asset dan SDM masuknya akuntan publik di dukung dengan anggaran sebesar Rp 30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.199.150,00 (83,99%) sasaran ini tercapai dengan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan yang terjabarkan menjadi dua kegiatan yaitu Penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah secara berkesinambungan RSUD Dr.Abdul Rivai Kabupaten Berau pada awal tahun 2011, dituntut harus lebih mandiri dalam melaksanakan fungsinya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak di Bidang Pelayanan Kesehatan. Hal ini tentunya sangat terkait dengan kemampuan keuangan/pendapatan fungsional yang diperoleh dalam Tahun Anggran 2014 maupun dalam pengalokasian anggaran perbelanjaan untuk kontinuitas penyelenggaraan fungsinya dalam memberikan layanan terhadap masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2014 merupakan lanjutan kebijakan dalam tahun 2013 yang secara bertahap harus mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dalam Kegiatan Peningkatan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang dapat diimplementasikan melalui berbagai jenis pelayanan dalam upaya peningkatan pendapatan dan mempertahankan kualitas/ kuantitas pelayanannnya melalui pengalokasian belanja yang efektif dan efesien dan berhasil guna untuk masyarakat secara optimal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang

dilengkapi dengan lampiran-lampirannya merupakan paket reformasi dibidang pengelolaan keuangan negara/daerah.

Paradigma perubahan yang sangat menonjol dalam pola Penyusunan Anggaran dari pendekatan Tardisional ke Penganggaran Berbasis Kinerja. Dimana dalam Anggaran berbasis Kinerja lebih berorientasi kepada proses apa yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan (output) sesuai Undang Undang Nomor 17 tahun 2003, dan bukan hanya sekedar membiayai /masukan (input).

Kebijakan Anggaran tahun 2014 yang telah disusun dan digali dengan top down secara manajemen dan buttem up dari setiap unit yang ada di RSUD Dr.Abdul Rivaiyang dikoordinir oleh Bidang/Bagian akan menjadi Pedoman dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, karena telah diselaraskan dengan Renstra dan RPJMD untuk jangka menengah maupun RKT dan RKPD untuk satu tahun anggaran.

1. **Pendapatan dan belanja RSUD Dr. Abdul Rivai**

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni RSUD Dr.Abdul Rivai Kabupaten Berau merupakan penjabaran Rencana Strategis yang diimplementasikan kedalam RKA & RBA SKPD tahun 2014 dan merupakan Rencana Kerja Tahunan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Anggaran Pendapatan merupakan kinerja revenue center dalam upaya mendapatkan penghasilan unit dimana realisasi empiris riil pada Bagian Keuangan Sebagai berikut:

   a. Sumber dana APBD untuk belanja Langsung mencapai Rp. 16.349.537.850, realisasi anggaran dari APBD Kabupaten Berau mencapai Rp. 11.716.818.277(71,66%) sehingga adanya efisiensi perbelanjaan sebesar Rp 4.632.719.573 (28,34%) .
   b. Sumber Dana APBD untuk belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 35.359.460.000, sedangkan Anggaran Belanja merupakan jumlah

kebutuhan setiap unit yang harus dipenuhi, realisasi mencapai Rp. 29.212.978.117 (82,62%) sehingga adanya efisiensi pembayaran sebesar Rp. 6.146.481.883 (17,38%).

c. Target (progres) Pendapatan Sumber dana BLUD tahun 2014 mencapai Rp 56.034.624.582 terdiri dari jasa pelayanan Rp.50.024.739.926, Hasil kerjasama dengan pihak ketiga 71.775.000, Lain-lain pendapatan BLUD yang sah Rp. 176.089.032. Pendapatan BLUD tahun 2014 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 19.788.172.583 (35,31%) dari tahun 2013 sebesar Rp. 36.246.451.999.00.

Arah kebijakan umum Pendapatan dan penambahan aset RSUD Dr.Abdul Rivai dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Optimalisasi pendapatan revenue center dari berbagai jenis layanan dan tindakan, serta diversifikasi layanan
b. Mempertahankan dan meningkatkan Pola Kerja Sama dan Kemitraan bersama Pihak Ketiga baik Pemerintah (Lintas Sektor), Swasta (Perusahaan), Organisasi maupun Masyarakat secara Perorangan.
c. Penetapan target penerimaan berdasarkan perhitungan berbagai tarif kelas pelayanan sesuai Perda (Kelas II dan III) dan atau Surat Keputusan Bupati (Kelas I dan VIP).
d. Memberdayakan dan meningkatkan peran SDM dengan memberikan pelayanan profesional
e. Melakukan upaya integrasi yang lebih intensif kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi untuk mendapatkan bantuan bantuan baik berupa bantuan keuangan maupun fisik sebagai sarana dan prasarana rumah sakit.

f. Melakukan upaya kreatifitas dengan pihak kedua (bank swasta atau bank pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan meningkatkan jasa penyewaan sarana berupa gedung/bangunan.

2. **Belanja RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau**.

Pada tahun 2014 RSUD Dr.Abddul Rivai mengelola anggaran belanja sebesar Rp 51.708.997.850 sumber APBD anggaran ini terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 16.349.537.850 Belanja Tidak langsungnya Sebesar Rp. 35.359.460.000 sedangkan BLUD sebesar Rp 56.034.624.582 Penyerapan anggaran RSUD Dr,Abdul Rivai untuk tahun 2014 sebagai berikut :

Dana yang bersumber dari APBD II Realisasinya belanja langsung sebesar Rp. 11.716.818.277 (71,66%) dan Realisasi belanja tidak langsung Rp. 29.212.978.117 (82,62%). Dana yang bersumber dari BLUD realisasi belanja sebesar Rp. 53.534.313.650,72 (95,54).

c. Pekerjaan Umum

Pencapaian Realiasasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau tahun 2014 menunjukkan perolehan nilai sebesar 58,15 %, perolehan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau

Tabel IV.4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
1	2	3	4	5	6	7
AGENDA II : Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing dan Berpihak Kepada Rakyat						
Tujuan 1 : Meningkatkan Pemenuhan infrastruktur dasar untuk membuka akses bagi setiap kegiatan, sebagai						

stimulasi bagi masyarakat agar mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup						
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum / Air Bersih	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	40,00	35,00	87.50%
2	jalan Poros Kecamatan Tuntas Pembangunannya	Jumlah Kecamatan Tuntas Jalan Poros	Kec	12	12	100%
3	Pada Tahun 2014 Telah Terbangun Secara Bertahap Jalan Menuju Ke Kawasan Sentra Produksi dan Jalan Produksi didalam Kawasan Sentra Produksi	Kawasan Produksi yang memiliki akses jalan baik	%	74,00	73.90	99.78%
4	Terbangunnya sarana dan prasarana dasar perumahan layak huni hingga tahun 2015 bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	2,00	1.65	82.50%
		Rumah Layak Huni	%	69,39	48.17	69.43%
Tujuan 3. Menciptakan Alam yang lestari melalui penegakan aturan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam dan koordinasi rencana tata ruang wilayah						
1	Terbangunnya saluran irigasi tersier, sekunder dan primer, pintu air dan waduk dilokasi kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	70.35	46.5122	66.12%
Tujuan 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil						
1	Tebangunnya Jalan, Jembatan	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	80.20	61.06	76.13%

Pencapaian Sasaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Adalah :

- **Indikator Kinerja Rumah Tangga Pengguna air Bersih**

  Pada capaian target kinerja ini didasari dari jumlah penduduk kabupaten dibagi dengan jumlah penduduk yang telah menggunakan air bersih hingga tahun 2014, dimana hal ini tidak tercapai sesuai target dari 40.00% dan terealisasi sebesar 35.00% maka presentase pada tahun 2014 ini sebesar 87.50%, dikarenakan adanya faktor teknis sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

- **Indikator Kinerja Jumlah Kecamatan Tuntas Jalan Poros**

  Dalam indikator berikut ini dimana jumlah kecamatan di Kabupaten Berau ada 13 Kecamatan, namun dalam hal target yang telah ditetapkan Dinas adalah capaian dalam 12 Kecamatan tuntas jalan poros ini dapat terlaksana 100 % dimana kecamatan-kecamata yang ditangani dalam tahun 2014 ini tersebar pembangunannya di beberapa kampung antaranya di kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Pulau Derawan, Biatan, Talisayan, Segah, Kelay, Biduk-biduk, Tabalar dan Batu Putih

- **Indikator Kinerja Kawasan Produksi Yang Memiliki Akses Jalan Baik**

  Untuk indicator kawasan produksi yang memiliki akses jalan baik ini dalam pembangunan jalan yang terlaksana dalam tahun anggaran 2014 untuk pembangunan jalan ke kawasan produksi hingga saat ini sebanyak 27921 ini didasari dari anggaran murni dan anggaran perubahan dibagi dengan jumlah jalan kekawasan produksi keseluruhan sebesar 322.036, 20 meter, maka pembangunan jalan untuk tahun 2014 sebesar 8.67% maka pencapaian saat ini dibagi dengan target yang ingin dicapai 74.00% dan yang tercapai dengan sampai tahun ini sebesar 73.90 % maka persentasenya 99.86%

- **Indikator Kinerja Lingkungan Pemukiman Kumuh**

  Indicator lingkungan pemukiman kumuh target yang ingin dicapai dalam tahun ini sebesar 2.00% dimana target yang dapat dicapai hanya sebesar 1.65 % ini didasarkan dari capaian yang dikerjakan sebesar 142 Ha dibagi jumlah luas wilayah 35.141,63 Ha jumlah 1.65% dan dibagi dengan target 2.00 % maka persentasi yang dicapai 87.50%

- **Indikator Kinerja Rumah Layak Huni**

  Capaian indikator untuk rumah layak huni pada tahun 2013 sebesar 46,59% berdasarkan dari data jumlah rumah yang terbangun sampai dengan tahun ini sebesar 969 Unit dibagi dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1535 orang maka capaian didapat sebesar 1.58% dengan target yang ingin dicapai Dinas sebesar 69,39%, Maka capaian yang dihasilkan untuk tahun ini ditambah dengan capaian Tahun Lalu maka untuk tahun 2014 sebesar 48.17% ini dikarenakan adanya kendala teknis dilapangan yang mengakibatkan terkendalanya pembangunan rumah layak huni

- **Indikator Kinerja Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**

  Capaian indikator dalam luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik ini dicapai dari pembangunan yang dilakukan dalam tahun 2014 sebanyak 3.000 Ha dibagi Jumlah sarana irigasi kabupaten, maka persentase yang tercapai sebesar 1.40% untuk tahun anggaran 2014. Capaian yang telah dicapai hingga tahun ini sebesar 46.52%, sedangkan target yang akan dicapai sebesar 66.12% ini disebabkan kondisi lapangan dibeberapa kecamatan yang kurang memadai inilah yang mengakibatkan terkendalanya pembangunan yang akan dilaksanakan.

- **Indikator Kinerja Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik**

  Dalam capaian kinerja ini untuk panjang jalan dalam kondisi baik, pada tahun 2014 pembangunan jalan adalah 58.844 Meter dibagi jumlah jalan dalam kondisi baik kabupaten adalah 1.733.617 Meter serta target

yang ditetapkan sebesar 80.20% untuk tahun 2014, tetapi hanya dapat tercapai sebesar 76.08% dan ini disebabkan kondisi teknis dilapangan yang kurang mendukung dalam pembangunannya.

Realisasi Keuangan

Anggaran dan realisasi keuangan baik dana dari rutin maupun dana pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut ;

Tabel IV.5
Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum 2014

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	Rp 16,026,128,000.00	Rp 13,856,396,046.00	Rp 2,169,731,954.00
	Belanja Barang	Rp 36,952,686,982.30	Rp 24,629,876,189.00	Rp 12,322,810,793.30
	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah	Rp 4,536,710,000.00	Rp 684,110,000.00	Rp 3,852,600,000.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 827,181,250.00	Rp 775,046,000.00	Rp 52,135,250.00
	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp 121,518,689,650.00	Rp 95,905,774,830.00	Rp 25,612,914,820.00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 1,097,772,271,443.12	Rp 610,216,154,585.30	Rp 487,556,116,857.82
	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 582,652,650.00	Rp 49,700,000.00	Rp 532,952,650.00
	JUMLAH	Rp 1,278,216,319,975.42	Rp 746,117,057,650.30	Rp 532,099,262,325.12

d. Perumahan

Dinas Perumahan dan Tata Ruang

Dinas Perumahan dan Tata Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp**.** 3.728.979.200,00 dan realisasinya sebesar Rp. 3.280.967.036,00 atau 87,99%.

Kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Berau kesemuanya telah terealisasi dengan baik yaitu 99%, sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan diharapkan. Mengenai Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja sebagai berikut.

1. Penyuluhan dan pengawasan kualitas pemukiman sehat perumahan telah terealisasi 100 %, karena telah terlaksana penyuluhan dan pengawasan dengan baik.

2. Tertatanya Bangunan Perumahan, telah terealisasi 100 %, karena pengawasan Bangunan Perumahan telah dialaksanakan dengan baik.

3. Tersedianya data kawasan industri dan perumahan se Kab. Berau telah terealisasi 100 %, karena kawasan industri dan perumahan sudah terdata dengan baik.

4. Tersedianya Informasi Data Base Perumahan dan Permukiman telah terealisasi 100 %, karena telah tersedianya data Base Perumahan dan Permukiman.

Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran

1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi Aggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 pada Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran Kabupaten Berau adalah sebesar Rp.6.220.594.867,00,-atau 79,21% dari dana yang tersedia dalam DPPA sebesar Rp.7.853.652.000,00,-dengan perincian sebagai berikut :

Tabel IV.6
Realisasi Belanja Tak Langsung Kantor Kebersihan, pertamanan dan pencegahan kebakaran

No	Belanja Tidak Langsung	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Sisa (Rp.)
			(Rp.)	%	
1	Belanja Pegawai	7.853.652.000,00	6.220.594.867,00	79,21	1.633.057.133,00

2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Pada tahun anggaran 2014, realisasi belanja langsung pada Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran Kabupaten Berau adalah sebesar Rp. 16.913.277.400,00,- atau 73,17% dari dana yang tersedia dalam DPPA tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 23.116.602.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.7
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kantor Kebersihan, pertamanan dan pencegahan kebakaran

NO	Belanja Langsung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp.)
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	5.748.994.000.00	5.057.914.250,00	87,98	691.079.750,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600,000.00	480.000.00	13,33	3.120.000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145,000,000.00	70.227.400.00	48.43	74.772.600,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.915.770.000.00	1.508.608.000.00	78.75	407.162.000.00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	196.120.000.00	183.590.000,00	93.61	12,530,000.00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20,000,000.00	17.485.000,00	87.43	2.515,000.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.795.000,00	32.608.250,00	99,43	186.750,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.399.000.00	24.434.000.00	39,16	37.965.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238.710.000.00	227.310,000.00	95.22	11,400,000.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	9.978,000.00	99.78	22.000.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	60,000,000.00	8.280,000.00	13,80	51.720,000.00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	190,000,000.00	137.428.300.00	72.33	52.571.700.00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	180,000,000.00	142.885.300.00	79.38	37.114.700.00
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	2.694.600,000.00	2.694.600.000.00	100.00	0,00
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	220.000.000,00	218.317,000.00	99.24	1.683,000.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100,000,000.00	99.357,000.00	99.36	643.000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	120,000,000.00	118.960,000.00	99,13	1.040,000.00
III	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	35,000,000.00	34.363.000.00	98,18	637.000.00
	Pengadaan Pakaian Dinas	35,000,000.00	34.363.000.00	98,18	637.000.00

	Beserta Perlengkapannya				
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	408,000,000.00	339.421.100.00	83,19	68.578.900.00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40,000,000.00	31.640.000.00	79,10	8.360.000.00
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	368,000,000.00	307.781.100.00	83,64	60.218.900.00
V	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	30,000,000.00	6.904.000.00	23,01	23.096,000.00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000.00	0.00	0.00	5.000,000.00
	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	25,000,000.00	6.904,000.00	27.62	18.096,000.00
VI	**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahaan Bahaya Kebakaran**	631.520,000.00	433.168.000,00	68,59	198.352.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	300.000,000,00	107.090.000,00	35,7	192.910.000,00
	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	331.520.000,00	326.078.000,00	98,36	5.442.000,00
VII	**Program Pengelolaan Areal Pemakaman**	1.922.540.000,00	1.885.169.000,00	98,06	37.371.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1.922.540.000,00	1.885.169.000,00	98,06	37.371.000,00
VIII	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00
IX	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**	2.139.442.000,00	2.081.193.800,00	97,28	58.248.200,00
	Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK dan Pendamping TA 2014)	2.139.442.000,00	2.081.193.800,00	97,28	58.248.200,00

X	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	6.005.386.000,00	4.154.303.600,00	69,18	1.851.082.400,00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan	5.915.386.000	4.154.303.600,00	70,23	1.761.082.400,00
	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
XI	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	5.225.720.000,00	2.702.523.650,00	51,72	2.523.196.350,00
	Penataan RTH	2.776.480.000,00	906.434.200,00	32,65	1.870.045.800,00
	Pemeliharaan RTH (Swakelola)	1.307.040.000,00	978.018.450,00	74,83	329.021.550,00
	Normalisasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase (Swakelola)	1.142.200.000,00	818.071.000,00	71,62	324.129.000,00
	Total Belanja Langsung (I – XI)	23.116.602.000,00	16.913.277.400,00	73,17	6.203.324.600,00

e. Penataan Ruang

Dalam penyelanggaraan urusan penataan ruang Pemerintah Kabupaten Berau mengambil kebijakan strategis yaitu meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang yang efektif dan efisian dengan peran serta masyarakat dan swasta. Kebijakan tersebut terimplementasi dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Tersusunnya Penyempurnaan Raperda RDTR telah terealisasi 100 %, karena telah tersselesaikan denganj baik dan tepat waktu.
2. Terpunuhinya kebutuhan masyarakat terhadap peraturaan perundang – undangan tentang rencana tata ruang telah terealisasi 100 %, karena telah terlaksananya Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Rencana Tata Ruang.

3. Tersedianya profil inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) telah teralisasi 100 %, karena telah tersusunnya Profil Inovasi Manajemen Perkotaan.
4. Pengawasan Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang telah terealisasi 90 %, karena pengadaan peta tidak dapat dikerjakan.
5. Semakin tertatanya Bangunan Umum telah terealisasi 100 %, karena pengawasan Bangunan umum telah dialaksanakan dengan baik.
6. Tersedia dan terpasangnya Patok GSB telah terealisasi 100 %, karena telah tersedia dan terpasangnya Patok GSB dengan baik
7. Tersusunnya Perencanaan Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan telah terealisasi 100%. Karena sudah tersusunnya Dokumen Perencanaan.

f. Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada tahun 2014 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau telah dianggarkan dana sebesar Rp. 19.076.370.070,- sampai dengan akhir tahun 2014 telah terealisasi sebesar Rp. 15.077.940.240,- atau sebesar 79.04%.

Untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan perencanaan pembangunan, maka dapat diukur dengan beberapa indikator yang diuraikan sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan yang dihasilkan.
   - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 dan Tahun 2014 diselesaikan tepat waktu.
   - Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2014 telah diselesaikan.
   - Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 telah diselesaikan tepat waktu.

2. Persentase kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan Indikator tersebut menggambarkan efektifitas perencanaan, pengendalian, dan koordinasi pelaksanaan pembangunan secara umum.

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap tahunnya telah dilaksanakan musrenbang kecamatan rata-rata setiap tahunnya meliputi sebanyak 13 kali di 13 kecamatan, musrenbang kabupaten 1 kali, musrenbang propinsi 1 kali, dan musrenbang nasional 1 kali.

g. Perhubungan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau untuk membiayai kegiatan selama Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 61.735.751.600,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp 38.727.795.000,- atau 62,73%.

Perolehan capaian kinerja terhadap sasaran selama tahun 2014 cukup variatif yaitu menggambarkan adanya capaian cukup tinggi, sedang dan ada pula tingkat capaian rendah.

Berikut ini perolehan capaian kinerja tahun 2014 beserta evaluasi dan analisis capaiannya :

1. Terpenuhinya standar kualitas pendidikan teknis bidang perhubungan kepada para aparatur.

   Sumber daya aparatur menjadi isu strategis pada SKPD teknis. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi teknis dibidang perhubungan, kominfo terkadang menimbulkan lemahnya kinerja dimasing-masing bidang. Untuk itu pendidikan dan latihan/bimbingan teknis pada dinas Perhubungan, Kominfo Kab.Berau terus dilaksanakan.

Tabel IV.8
Rencana & Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya standar kualitas pendidikan teknis bidang perhubungan kepada para aparatur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2014			Target Akir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2014 terhadap 2015
		Target	Realisasi	Persen		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(3)*	*(5)*		
Terpenuhinya standar kualitas pendidikan teknis bidang perhubungan kepada para aparatur.	Jumlah pegawai/aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan atau bimbingan teknis	74 orang	69 Orang	93%	223	73, 5%

Untuk tahun 2014 pencapaian kinerja sebesar sembilan puluh tiga persen atau 93%, dengan capaian ini maka capaian target RPJMD sebesar 73,5%. Ada 3 Program/Kegiatan yang mendukung tercapaianya sasaran ini yaitu :

1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
   - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal.
   - Kegiatan Pelatian bidang perhubungan darat

Tingkat capaiannya sebesar 93%, menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan harapan yaitu terlaksananya diklat dan bimbingan teknis seperti in house training, pendidikan & pelatihan bagi petugas avsec, administrasi, teknis perhubungan darat, teknis ASDP, perencanaan, keuangan, pelaporan dan evaluasi, .

Anggaran pendukung untuk sasaran ini sebesar Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 268.878.600,- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan tarus

tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) atau mencapai 74,7 %. Sehingga diperoleh efisiensi anggaran sekitar 25,3 % atau sebesar 136.121.400,-

Perbandingan Anggaran, Realisasi dan Capaian 4 Tahun Terakhir

Sedangkan perbandingan anggaran, realisasi dan capaian dari Sasaran 1 tahun 2011 s/d 2014 kami tampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.9
Perbandingan Anggaran, Realisasi & Capaian
Tahun 2011 s/d 2013

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	2011	Rp 100.000.000	Rp 96.595.905	100%	Capaian 13 orang dari target 13 orang
2	2012	Rp 675.000.000	Rp616.833.700	91%	Capaian 58 orang dari target 64
3	2013	Rp 244.000.000	Rp239.522.600	100%	capaian 18 orang dari target 18
4	2014	Rp 404.000.000	Rp.268.878.600	93%	Capaian 69 dari target 74

Lebih jelas perbandingan anggaran dan realisasi sasaran dapat juga diiihat pada diagram dibawah ini :

Grafik IV.1
Grafik Anggaran & Realisasi Th 2011 s/d 2014

- **Hambatan**
  - Bimbingan Teknis khususnya untuk keahlian dibidang perhubungan sering kali tidak dapat diikuti karena adanya beberapa persyaratan bahwa peserta diklat harus memiliki kopentensi dan latar belakang pendidikan tertentu.
  - Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis bidang perhubungan dimutasi ke SKPD lain.
- **Solusi**
  - Hambatan bahwa peserta diklat harus memiliki kopetensi dan latar belakang pendidikan tertentu dapat diatasi dengan mengikuti diklat-diklat tingkat dasar bidang perhubungan.
  - Untuk masalah mutasi pegawai yang telah memiliki kompetensi teknis dibidang perhubungan, dapat dilakukan dengan koordinasi ke BKPP Kab.Berau.

2. Meningkatnya Prasarana & Sarana dan fasilitas pelayanan administrasi bidang Perhubungan, Kominfo

Tabel IV.10 Indikator Dinas Perhubungan, Kominfo

Indikator Kinerja	Tahun 2014		
	Target	Realisasi	Persen
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Jumlah Sarana & Prasarana aparatur yang tersedia -Pemeliharaan Gedung & Mebeler	1 Jenis	1 Jenis	100%
- Peralatan & perlengkapan kantor	10 Jenis	10 Jenis	100%
- Kendaraan Dinas	2 Unit	2 Unit	100%

Persentase Realisasi Kegiatan Administrasi Perkantoran, Pelaporan, & Sosialisasi SKPD	100 %	100 %	84%

”Jumlah Sarana & Prasarana aparatur yang tersedia yang meliputi Jumlah Pemeliharaan gedung & mebeler, Jumlah Peralatan & perlengkapan kantor, jumlah kendaraan dinas” tingkat capaian sebesar 100%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Untuk indikator kinerja ”Persentase realisasi kegiatan administrasi perkantoran, pelaporan & sosialisasi SKPD” capaian 100%.

Analisa Input, Output, Outcomes, Efesiensi & Efektifitas

Total anggaran (input) yang mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 11.939.479.000 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan serapan Rp. 9.760.881.558 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) atau sebesar 82% (delapan puluh dua persen). Untuk anggaran diperole efesiensi sebesar 18% delapan belas persen.

Dari program dan kegiatan pendukung sasaran ini hal-hal yang diperoleh atau dapat dirasakan manfaatnya oleh aparatur dinas perhubungan meliputi, tertibnya administrasi pendukung perkantoran, tersedianya peralatan & perlengkapan kantor sekaligus dirasakan manfaatnya untuk mendukung proses kerja meliputi komputer/pc, printer, kamera, handycam, almari, papan pengumunan, ac dll. Untuk kedisiplinaan aparatur telah tersedia seragam dinas harian, dan batik tradisional. Untuk kenyamanan lingkungan kerja telah dilakukan pemeliharaan gedung kantor.

Proses pengadaan barang dan jasa program dan kegiatan pendukung kebanyakan dilakukan dengan metode pengadaan langsung, kelancaran dan bahkan keterlambatan masing-masing perkerjaan terkadang terjadi karena pemlihaan penyedia barang/jasa.

Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan :** Untuk program pelayanan administrasi perkantoran secara keseluruhan berjalan lancar sesuai dengan target, tetapi sering kali capain indikator terjadi diakhir-akhir tahun anggaran walaupun degan syarat administrasi keuangan dilaksanakan secara tertib,
- **Solusi :** Agar program dan kegiatan pendukung sasaran 2 dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan rencana kerja dan sesuai dengan alokasi anggaran per semester.
- Sehingga capain indikator tidak terfokus pada semester 4 (empat).

Kondisi dan capaian diatas, merupakan hasil dari serangkaian program/kegiatan yang telah dilakukan, yang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur

3. Mewujudkan pelayanan jasa bidang perhubungan yang optimal.

Tabel IV.11 Indikator Bidang Pelayanan Jasa

Indikator Kinerja	Tahun 2014			Target Akir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2015 teradap 2015
	Target				
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor (uji KIR)	2216 Unit	3516 unit	159%	-	-
Kegiatan pengendalian disiplin di jalan raya -Jumlah Razia bersama	24 Kali	12 Kali	50%	60	-

Jumlah Kapal yang tambat dan melaksanakan aktifitas bongkar muat barang di dermaga lokal	140	Kapal	263	Kapal	188%	-	-

Secara umum keberhasilan pada bidang ini dapat diliat dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan, Kominfo tahun 2014 dengan capaian diatas seratus. Hal ini dapat dicapai berkat kerjasama yang baik meliputi kesadaraan pengguna jasa bidang perhubungan akan kewajiban mereka kepada Pemda Kabupaten Berau dan kinerja yang baik dari tim retribusi dimasing-masing bidang. Untuk target akhir RPJMD dan capaian RPJMD sampai dengan tahun 2014 belum dilakukan. Karena IKU baru disesuaikan pada tahun ke-3 (tiga) RPJMD pada proses reviuw Resnstra.

Program pendukung tercapainya sararan ini meliputi

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dengan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya tingkat capaiannya sebesar 50%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan belum tercapai sesuai dengan harapan. Tujuan dari Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya salah satunya adalah menertibkan kendaraan bermotor untuk uji KIR, dan Retribusi parkir di tepi jalan umum.

4. Mewujudkan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai dan sesuai standar perhubungan

Empat indikator keberhasilan sasaran ini semuanya termasuk kedalam IKU Dinas Perhubungan, Kominfo Kabupaten Berau. Dari 4 (empat) IKU 3 (tiga) dengan capain target 100% dan 1 (satu) target dengan capaian 80%.

Program dan kegiatan pendukung sasaran ini meliputi :

- Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ

Pencapaian indikator didukung oleh keberhasilan pelaksanaan masing-masing kegiatan, berikut ***analisa input, output, outcomes, efektivitas & efisiensi*** dari kegiatan-kegiatan di tahun 2014 :

- Indikator "Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana & Prasarana Fasilitas Perhubungan". Didukung oleh dua kegiatan yaitu kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan (Dermaga Dumaring) & Perencanaan Pembangunan Bandara Maratua. Dengan capain masing-masing 100% artinya bahwa telah tersusunya dokumen untuk pembangunan dermaga Dumaring di Kecamatan Talisayan, dan selesainya dokumen perencanaan pembangunan bandara Maratua. Dokumen perencanaan merupakan prasyarat untuk proses pembangunan fisik, dengan hasil dokumen ini di tahun 2015 akan diproses untuk pembangunan fisik bandara maratua.

  Alokasi anggaran (input) untuk mendukung tecapainya indikator ini sebesar Rp.561.040.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 414.650.000,- (empat ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp.146.390.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Hal ini dianggap efiensi karena target dari kegiatan tercapai 100%. Dokumen perencanaan telah tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk proses lebih lanjut.
- Indikator "Jumlah Pembangunan sarana dan fasilitas angkutan sungai, danau dan penyeberangan" capaian 80%. Dengan capain ini maka target pembangangunan sarana & fasilitas ASDP berupa dermaga dari 5 (lima) unit yang ditargetkan ada 4 (empat) unit yang terbangun dan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat disekitar, yaitu terbangunnya dermaga di kampung pesayan kecamatan

Sambaliung, terbangunnya dermaga di kampung Tepian buah kecamatan Segah, terbangunnya dermaga Batu-batu di kecamatan Pulau Derawan dan terbangunnya ruang tunggu pelabuhan di kecamatan Gunung Tabur. Dengan adanya dermaga-dermaga ini aktifitas masyarakat umum dan nelayan seperti tambat labuh, bongkar muat, dan penghubung antar desa menjadi lebih mudah dan lancar serta terjamin kenyamanannya.

Gambar 3.4 Dermaga Lamin Kamp.Tepian Buah Segah

- Indikator ”Jumlah Rehabilitasi Saranan dan Fasilitas Sungai, Danau dan penyeberangan” capaian 100%. Dengan capain ini maka target rehabilitasi sarana & fasilitas ASDP berupa 2 (dua) unit dermaga terlaksana kedua-duanya, diharapkan hasilnya dapat dimanfaatkan lebih baik oleh masyarakat sekitar. Dermaga yang mengalami rehabilitasi/pemugaran yiatu dermaga kampung tasuk kecamatan Gunung Tabur, pemugaran secara garis besar dilakukan pada lantai dermaga, hasilnya kini aktifitas penyebrangan menjadi lebih nyaman. Rehabilitasi juga dilakukan di dermaga Teluk Semanting, dengan begitu saat ini aktifitas nelayan seperti tambat labuh kapal dan bongkar muat hasil tangkapan nelayan menjadi lebih mudah dan lancar serta terjamin kenyamanannya.
- Indikator ”Jenis rehabilitasi & pemeliharaan prasarana & fasilitas LLAJ)

  Pencapain Indikator ini didukung dengan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target dan tujuan, capaian kegiatan 100%. Kegiatan ini meliputi pemugaran/pemeliharaan rambu-rambu yang ada diseluruh kabupaten Berau, pelaksanaan kegiatan dimulai dari Januari 2014 s/d Desember 2014. Kegiatan ini dilaksanakan secara kontinue

setiap tahun, dengan adanya kegiatan ini diharapkan fungsi rambu menjadi lebih optimal.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Dukungan Input/anggaran untuk sasaran ini dari tahun ke tahun masih belum terserap secara maksimal.
2. Proses pengadaan barang dan jasa memakan waktu yang lama karena proses gagal lelang sehingga proses diulang, tidak adanya penawaran.
3. Penyelesaian pekerjaan rata-rata terfokus pada semester 4 (empat).

Solusi :

1. Serapan input/anggaran yang belum maksimal dapat diminimalisasi dengan perencanaan yang matang dari masing-masing bidang pada proses pengusulan/penetapan anggaran selain itu untuk pekerjaan fisik perlu adanya tinjauan lapangan.
2. Proses pengadaan barang jasa dilakukan dengan prinsip efektif, efesien dan akuntabel dan bebas KKN.
3. Agar pihak pengelola masing-masing kegiatan dapat mengawasi penyedia secara teliti dan selalu berpatokan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan. Sehingga tidak ada tahapan yang pelaksanaannya terlambat.

Disadari bahwa beberapa indikator yang ada ini masih perlu banyak perbaikan, karena belum dapat terukur secara lebih jelas, dan lebih menggambarkan urusan intern SKPD, bukan tugas pokok secara luas kepada masnyarakat.

5. Meningkatnya dan dikembangkannya pelabuhan dan dermaga penyeberangan di Kecamatan terpenuhi fasilitas keselamatan pelayaran disetiap pelabuhan.

Tujuan dari sasaran ini meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk membuka akses bagi setiap kegiatan, sebagai stimulan bagi masyarakat agar mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup, dengan agenda Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berpihak kepada rakyat. Indikator kinerja daerah yaitu ”jumlah pelabuhan dan dermaga yang ditingkatkan” capain sampai dengan tahun ke 4 (empat) RPJMD sebesar . Salah satu kegiatan pendukung indikator kinerja daerah pada tahun 2014 adalah kegiatan pembangunan dermaga Maratua, kegiatan ini merupakan pekerjaan Multi Years Contract (MYC) dengan nota kesepakatan Pemerintah Kabupaten Berau dan DPRD Kabupaten Berau no.180/16-PRJJ/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan pagu dana sebesar Rp. 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar rupiah). Dimana pelaksanaan fisik dimulai sejak bulan Desember 2013 dan sampai saat ini Januari 2015 fisik pekerjaan telah mencapai 63%, dengan serapan dana sebesar Rp. 29.934.389.900 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

6. Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

   Indikator sasaran ini terdiri atas 2 IKU. Capaian IKU tahun 2014 mencapai 100%. Indikator ”Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas” dan ”Jumlah Pemasangan traffic light back up battery & count down” dengan ***input***/anggaran sebesar Rp. 3.525.320.000, (tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), serapan dana sebesar Rp. 3.477.110.700,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 98%, dengan efesiensi anggaran sebesar 2%.

   Hasil/output dari kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat berupa rambu lalu lintas tunggal, rambu petunjuk jurusan, rambu kawasan tertib lalu lintas, marka, zebra cross, zoss (zona selamat

sekolah), guardril(pagar pengaman), dan pita penggetar yang letaknya tersebar di kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung, Segah, Batu Putih, Talisayan, dan Biduk-biduk.

Untuk pemasangan traffic light ada 3 unit, yang terpasang di 2(dua) kecamatan yaitu Tanjung Redeb (di Simpang Jalan Pemuda dan Jl. Mangga I, Simpang Pemuda Jalan Pulau Panjang) dan 1(satu) unit di Kecamatan Sambaliung Jalan Simpang Raja Alam.

7. Terpenuhinya target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan.

Tabel IV.12

Berikut Capaian Kinerja Penerimaan PAD dari Sektor Perhubungan

NO	JENIS PELAYANAN	TARGET	TOTAL	%
1	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	Rp 367,644,000	Rp 444,008,000	121%
2	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Rp 111,820,000	Rp 174,220,000	156%
3	RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL	Rp 12,000,000	Rp 7,700,000	64%
4	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN	Rp 79,159,900	Rp 194,463,450	246%
5	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	Rp 24,000,000	Rp 21,228,000	88%
6	SUMBANGAN PT. PELINDO	Rp -	Rp 171,220,000	-
	JUMLAH TOTAL	Rp577,143,900	Rp1.012.839.450	135%

Indikator Kinerja Utama “Penerimaan PAD >= 100%” didukung dengan Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Target terdiri dari 5 jenis retribusi yaitu Retribusi parkir di tepi jalan umum, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi terminal regional, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi izin trayek. Rata-rata pencapaian retribusi telah memenuhi target yang

ditentukan yaitu sebesar 135%, perhitungan belum termasuk sumbangan PT.PELINDO.

Secara umum, pencapian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2014 telah diupayakan untuk memenuhi sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan. Namun dalam implementasinya masih terkendala dengan masalah teknis dan non teknis.

h. Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 10.022.620.500 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung = Rp. 3.966.260.500
2. Belanja Langsung = Rp. 6.056.360.000

Sampai akhir Tahun Anggaran 2014 realisasi dana tersebut dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung di atas secara keseluruhan sebesar Rp 8.114.984.447 atau 81 persen dari jumlah dana sebesar Rp.10,022.620.500,-

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau Tahun 2014, baik terhadap pengukuran indikator kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran dapat di laksanakan dengan baik. Secara umum dapat digambarkan bahwa dari 44 program kegiatan yang direncanakan dengan dana sebesar Rp. 6.056.360.000,-. Dari Belanja Langsung dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.723.334.985 atau 77 persen.

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, hambatan dan kendala yang sangat dominan adalah kegiatan pemantauan kerusakan

lingkungan hidup 44,80 % karena batal lelang, kegiatan CSR 52,83% adanya honor yang tidak dicairkan karena sudah terkaper didinas pertambangan, kegiatan peningkatan peran serta masyarakat 52,71% perjalanan dinas tidak dilaksanakan, dan anggaran forum ditiadakan, kegiatan Proper 52,24% pendampingan tahap pertama tahun 2014 ditunda ke januari 2015.

Pada sasaran meningkatnya jumlah penanganan kasus lingkungan yaitu pada indikator kerja jumlah penambang liar yang ditertipkan 0 persen, ini disebabkan di Kabupaten Berau tidak ada tambang liar atau belum ditemukan, sedangkan indikator kerja pengesahan SPPL cukup tinggi dari targat yang di rencanakan ini disebabkan banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang mengurus izin SPPL yang targetnya hanya 80 ijin tetapi realisasinya 113 izin yaitu pada usaha kecil. Sasaran pelayanan pencemaran air sebagian persen lebih dari 100 persen ini disebabkan banyaknya usah dan/atau kegiatan mengurus ijin pembuangan air limbah. Sedangkan untuk sasaran pelayanan informasi setatus kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa pada indikator kerja lahan yang ditetapkan dan diinformasikan setatus kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa untuk persennya 0 di sebabakan ketika diadakan lelang tidak ada peserta yang mengikuti lelang. Untuk indikator Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan adminitrasi teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak persenrtasenya 0 ini belum dilakukan sebab peralatan yang digunakan belum ada untuk pengujian udara emisi, sedangkan untuk pengujian udara embient pada tahun 2013 telah dilakukan dengan persentase 100 % sedangkan pada tahun 2014 dilakukan hanya 1 kecamatan talisayan saja disebabakan alat yang digunakan pada kecamatan lain rusak. Sedangkan untuk indikator kerja data pemantauan kualitas air sungai pada tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah lokasi yang di lakukan pemantauan air. Dan untuk

indikator kerja peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat (adiwiyata) pada tahun 2013 targetnya pada jumlah bantuan yang diberikan sedangkan pada tahun 2014 targetnya diarahkan kepada jumlah sekolah yang mengikuti penilaian adiwiyata, dari jumlah target yang di inginkan 7 sekolah.

i. Pertanahan

Bagian Pertanahan Setda Berau

Urusan pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Berau dengan mengimplementasikan program-program sebagai berikut :

1. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
2. Program pengendalian pemanfaatan ruang

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana

Penyebaran penduduk Kabupaten Berau sampai tahun 2014 masih menunjukkan penyebaran yang tidak merata, sebagian besar penduduk menetap di perkotaan, dimana di daerah tersebut pada umumnya kondisi sosial ekonomi relatif lebih baik dibanding daerah pedalaman atau pedesaan. Untuk uraian tentang penduduk telah diuraian di BAB I pada Laporan Pertanggungjawaban ini.

Realisasi keuangan baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung Dinas Kependudukan san Catatan Sipil Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung

Tabel IV.13
Anggaran Belanja Tak Langsung Dinas Kependudukan, Capil, dan KB

Kode Rek	Belanja Tidak Langsung	Besarnya Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
01	Belanja Pegawai	3.885.933.000.00	3.615.812.560.00	93
01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.800.000.000.00	1.686.248.878.00	93
01.02	Tunjangan Keluarga	205.000.000.00	183.074.476.00	89

01.03	Tunjangan Jabatan	177.900.000.00	165.165.000.00	92
01.05	Tunjangan Fungsional	65.900.000.00	58.825.000.00	89
01.06	Tunjangan Beras	138.000.000.00	118.918.080.00	86
01.07	Tunjanga PPh/Tunjangan khusus	12.000.000.00	12.000.000.00	100
01.08	Pembulatan Gaji	33.000.00	14.335.00	43
01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	62.000.000.00	40.881.791.00	65
02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kerja	1.425.100.000.00	1.350.685.000.00	94
		3.88.993.000.00	3.615.812.560.00	93

2. Anggaran Belanja Langsung

Tabel IV.14

Anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan, Capil, dan KB

Kode Rek	Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	%
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.965.162.000	1.820.058.909	92
01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.350.000	90
01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.700.000	137.656.109	81
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	183.005.000	118.345.600	64
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	162.710.000	130.901.000	80
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.000.000	1.749.000	87
01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000	9.880.000	98
10.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.500.000	14.133.000	97
10.11	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	12.900.000	12.660.000	98
10.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.482.400	98
10.13	Penyediaan Jasa Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	854.779.000	842.279.400	98
10.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000	6.732.000	96
01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.000.000	12.939.500	99
01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	274.000.000	270.839.450	98
01.19	Rapat-rapat Koodinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	225.968.000	225.511,450	99
01.20	Penyediaan Jasa Administrasi/Tehnis Perkantoran	33.600.000	33.600.000	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	230.000.000	225.593.000	98
02.01	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.950.000	99
02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000	24.693.000	98
02.10	Pengadaan Meubeler	185.000.000	181.040.000	97
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26.660.000	21.970.000	82
03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	26.660.000	21.970.000	82
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000	27.650.000	92
06.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	5.000.000	2.850.000	57
06.05	Sosialisasi Kinerja SKPD	25.000.000	24.800.000	99
15	Program Penataan Administrasi	5.753.414.400	4.875.230.934	84

	Kependudukan			
15.03	Implementasi SIAK (membangun, updating dan pemeliharaan)	856.950.000	838.160.894	97
15.06	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	57.290.000	33.513.000	58
15.07	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	2.708.500.000	1.506.637.580	72
15.08	Pengembangan Data Base Kependudukan	378.552.000	297.018.000	78
15.10	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	221.800.000	201.450.800	90
15.11	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	185.000.000	168.895.000	91
15.14	Monitoring Evaluasi Dokumen Penerbitan Akta-Akta Capil	286.575.000	274.325.610	95
15.15	Peningkatan Pelayanan Dalam Bidang Pencatatan Sipil	1.197.540.000	1.186.533.800	99
15.16	Pengawasan dan Pengendalian Penduduk	125.000.000	95.702.700	76
15.17	Peningkatan pelayanan pencatatan akta perkawinan dan perceraian, adopsi,pengesahan dan pengakuan anak	366.207.400	272.993.550	74
	Jumlah	8.005.236.400	6.970.502.843	87

Dari data realisasi anggaran tersebut diatas, maka realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 93 % dan Anggaran Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 87 %

k. Pemberdayaan Perempuan.

Untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan meningkatnya peran perempuan, diukur dengan menggunakan indikator yaitu meningkatnya peran perempuan. Pemerintah Kabupaten Berau sangat mendukung dan menunjang penuh usaha-usaha untuk meningkatkan peran perempuan.

Pemberdayaan perempuan dimaksudkan meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan. Dan untuk mendukung hal ini, pada tahun 2014 telah diprogramkan sebagai berikut :

1. Program keserasian kebijakan peningktan kualitas anak dan perempuan.
2. Program Penguatan kelembagaan Pengurustamaan Gender dan anak
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
4. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kantor Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana.

Urusan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, Keluarga berencana dimaksudkan untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk, sehingga dengan keluarga berencana diharapkan kesejahteraan keluarga meningkat.

Untuk mencapai tujuan mengontrol laju pertumbuhan penduduk tersebut, pemerintah Kabupaten Berau telah memprogramkan sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana
2. Program kesehatan reproduksi remaja.
3. Program Pelayanan Kontrasepsi.
4. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
5. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

m. Sosial

Dinas Sosial

Urusan sosial pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan tata kehidupan serta tata penghidupan sosial, materiil dan sprituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi seseorang, keluarga maupun masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban sebagai manusia.

Adapun dari aspek keuangan, pada tahun 2014, Dinas Sosial dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran Belanja Langsung

   Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2014 Dinas Sosial Kabupaten Berau adalah sebesar : Rp *11.175.326.000*.- Realisasi sebesar : Rp.*6.993.641.436*,- -Sisa dana sebesar Rp.*4.181.684.564*,-

2. Realisasi Anggaran Belanja Tidak langsung

   Anggaran Belanja Pembangunan APBD (DASK) Dinas Sosial Kabupaten Berau sebesar Rp.*3.465.111.412,34*.- Realisasi sebesar : Rp.2.808.851.579.-Sisa dana : Rp.*656.259.833,34*.-

Dari data Dinas Sosial perkembangan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain sebagai berikut :

Tabel IV.15
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2010 - 2013

PMKS	2010 Orang/KK	2011 Orang/KK	2012 Orang/KK	2013 Orang/kk
1. Anak balita terlantar	25	9	25	25
2. Anak terlantar	89	32	39	39
3. Anak korban tindak kekerasan	50	0	21	21
4. Anak nakal	0	0	1	1
5. Anak jalanan	15	0	0	0
6. Wanita rawan social ekonomi	320	102	47	47
7. Lanjut usia terlantar	1.560	1.783	1.857	1.857
8. Penyandang Cacat	232	264	435	435
9. Penyandang Cacat eks koronis	0	0	0	-
10. Wanita tuna susila	50	0	0	0
11. Pengemis	8	0	0	0
12. Bekas narapidana	28	78	278	278
13. Korban penyalahgunaan narkotika	5	0	65	65
14. Keluarga fakir miskin	13.018	572	7130	6.614
15. Keluarga berumah tidak layak huni	620	0	263	263
16. Komunitas adat terpencil (KAT)	250	105	741	741
17. Masyarakat yng tinggal di daerah bencana	250	0	0	-
18. Korban bencana alam	0	0	0	1.979

Sumber data : Dinas Sosial 2013

Tabel IV.16
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2010-2013

No	PSKS	Satuan	2010	2011	2012	2013
1	Panti asuhan	Buah	4	4	4	-
2	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	195	195	240	240
3	Organisasi sosial (orsos)	Organ	26	26	6	12
4	Karang Taruna Indonesia (KTI)	Organ	110	110	45	45
5	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Orang	113	113	113	-
6	Satuan tugas penanggulangan bencana alam (PBA)	Buah	25	25	25	-
7	Instruktur satgas PBA	Buah	25	25	25	-
8	Kader rehabilitasi berbasiskan kemasyarakatan	Buah	90	90	90	-

Sumber data : Dinas Sosial 2013

Adapun data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Anak Balita Terlantar 25 orang
- Anak Terlantar 39 org
- Anak Nakal 38 org
- Anak Jalanan
- Lanjut Usia Terlantar/miskin 1857 orang
- Wanita rawan sosial ekonomi 47 org
- Korban tindak kekerasan 21 org
- Penyandang Cacat 435 orang
- Wanita Tuna Susila (PSK) 0 org
- Pengemis 0 org
- Gelandangan 0 org
- Bekas Narapidana (Eks Napi) 278 orang
- Keluarga fakir miskin 7130 KK
- Keluarga berumah tidak layak huni 263 KK

- Keluarga bermasalah sosial psikologis
- Komunitas adat terpencil (KAT) 741 KK
- Korban bencana alam 1979 KK
- Korban bencana sosial 0 org
- Penyandang HIV/Aids 0 org
- Keluarga rentan sosial ekonomi
- Korban Penyalahgunaan Nafza 65 orang
- Pekerja migran bermasalah sosial

Sedangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah sebagai berikut :

- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 240 orang
- Organisasi Sosial (Orsos) 6 organisasi
- Karang Taruna Indonesia (KTI) 45 orang
- Wahana Kessos Berbasis Masyarakat (WKBSM)
- Dunia Usaha yang melakukan UKS
- Keperintisan dan Kepahlawanan.
- Panti Asuhan 5 buah

n. Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja ini diwujudkan dengan pelaksanaan berbagai macam pelatihan keterampilan yang dianggap penting dimasa sekarang ini. Pelatihan yang telah dilaksanakan tersebut adalah :

- Pelatihan Montir Sepeda Motor, yang diikuti oleh 26 orang peserta
- Pelatihan Service Elektronik yang diikuti oleh 10 orang peserta

- Pelatihan menjahit yang diikuti oleh 30 orang peserta

Dengan total 66 peserta selama tahun 2014, kegiatan ini menyerap anggaran belanja sebesar Rp. 968.003.000,00

2. Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan

   Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya seleksi pra penempatan tenaga kerja, serta terbentuknya usaha produktif guna mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Berau, kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp. 244.209.250,00

3. Sosialisasi berbagai pelaksanaan peraturan tentang ketenagakerjaan

   Kegiatan ini bertujuan agar karyawan dan unsur manajemen perusahaan dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kegiatan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Lembaga Kerja melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan yang tersebar di 13 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Berau. Selama tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 250 perusahaan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 281.361.400,00,-

4. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

   Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Bentuk dari kegiatan ini yaitu pengumpulan data normative perusahaan, Pemeriksaan dan pengujian peralatan dan perlengkapan kerja serta perlengkapan produksi perusahaan, dan penyelesaian kasus Norma Kerja dan Norma Jamsostek.

   Selama tahun 2014 telah dilaksanakan pengumpulan data normative terhadap 300 perusahaan, pengujian 150 peralatan serta penyelesaian

40 kasus norma kerja dan norma jamsostek. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp.322.733.570,00

5. Pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan Hubungan Industrial dan Syarat-syarat kerja

   Melalui kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi timbal balik serta meningkatnya produktifitas lembaga ketenagakerjaan ini menyerap anggaran belanja sebesar Rp. 214.378.100,-

6. Pelatihan Pengelola Koperasi Daerah Transmigrasi se Kabupaten Berau

   Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kawasn eks.Pemukiman transmigrasi yang berkembang secara berkesinambungan, melalui pengawasan dan evaluasi berkala perkembangan kawasan Eks. Pemukiman Transmigrasi dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.264.086.950,00,-

Realisasi Keuangan dan Fisik

Selama tahun 2014, berdasarkan pagu anggaran yang diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, telah dilaksanakan 7 Program yang mencakup didalamnya 27 Kegiatan, dari total 8 Program dan 31 Kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja tahun anggaran 2014.

Dari Total dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau yaitu sebesar Rp. 6,058,511,600 terealisasi sebesar 87,23% atau sejumlah Rp. 5,284,850,784,00. Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 773,560,816,00 menjadi Silpa tahun 2014.

o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada Tahun 2014 adalah sebanyak 11 (sebelas) sasaran. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing – masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum rata-rata sasaran yang dicapai dalam tahun 2014 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan belum sinkronnya perencanaan dengan penetapan program dan kegiatan. Secara rinci 11 (sebelas) sasaran tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM Aparatur yang professional dengan pemenuhan kualifikasi pendidikan sesuai dengan job description

   Pada sasaran ini indikator yang menunjukkan keberhasilan nya adalah meningkatnya tingkat pendidikan aparatur sebanyak 3 orang. Pada tahun 2014, ada 4 pegawai Dinas Koperindag Kab. Berau yang melakukan penyesuaian ijazah dari sebelumnya SLTA menjadi Strata 1 (S1) sehingga pada sasaran ini realisasi pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Tersedianya SDM Aparatur dengan keterampilan yang professional di bidang Koperindag

   Indikator sasaran ini adalah bertambahnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis sebanyak 7 orang. Selama tahun 2014 jumlah diklat yang diikuti oleh aparatur sebanyak 10 orang dengan rincian 5 orang mengikuti diklat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, 3 orang mengikuti diklat Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan 2 orang mengikuti diklat Penilaian Kesehatan Koperasi. Dengan realisasi sebanyak 10 orang

3. Tercapainya peningkatan peran UKM

Pada sasaran ini, indikator yang menunjukkan keberhasilannya adalah tumbuhnya wirausaha baru sejumlah 800 UMKM. Realisasi pencapaiannya 54 UMKM atau sebesar 6,75% hal ini disebabkan bahwa beberapa pelatihan kewiarusahaan yang diselenggarakan dengan peserta 90 orang, yang dapat membuka usaha baru hanya sebanyak 54 orang.

4. Meningkatkan peluang usaha bagi koperasi

   Indikator pada sasaran ini terdiri 2 yaitu meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas dengan target jumlah sebanyak 120 unit koperasi dan terjadinya kemitraan antara koperasi dengan BUMN, BUMD dan swasta sebanyak 40 unit koperasi. Realisasi pencapaian indikator pertama sebanyak 130 koperasi atau 108,33%. Hal ini disebabkan makin bertambahnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan pada indikator kedua, realisasi pencapaiannya adalah 44 unit koperasi atau 110%. Keberhasilan pencapaian pada indikator ini dikarenakan makin meningkatnya kemitraan yang terjadi antara koperasi dengan pihak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, lingkar tambang dan jasa bongkar muat. Tentu secara umum keberhasilan pada sasaran ini dikarenakan makin intensnya pembinaan yang dilakukan oleh aparat koperasi terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Berau.

5. Meningkatnya struktur permodalan UKM 10% per tahun

   Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator. Yang pertama meningkatnya omset pemasaran produk koperasi dan UMKM dengan target 10% dan meningkatnya modal koperasi dan UKM sebesar Rp 11.500.000.000,-. Indikator pertama menunjukkan realisasi pencapaiannya sebesar 12%. Pada indikator ini terjadi kenaikan sebesar 2% dari target yang ada dikarenakan adanya peningkatan even-even promosi yang diikuti oleh para pelaku UKM baik ditingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional

yang diselenggarakan event organizer di berbagai wilayah sehingga transaksi penjualan dapat terealisasi langsung kepada pelaku usaha. Indikator yang kedua yaitu meningkatnya modal koperasi dan UKM sebesar Rp 11.500.000.000,-. Pada indikator ini realisasi pencapaiannya Rp 13.525.302.496,- atau sebesar 117,61%. Terjadi kenaikan melebihi target yang ada disebabkan tingkat transaksi usaha baik koperasi dan UKM mengalami kenaikan sebagai bentuk meningkatnya kesadaran berkoperasi dan pemahaman para pelaku UKM

6. **Aspek Keuangan**

Sumber pendanaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2014 melalui Belanja Daerah yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan nilai sebesar Rp. 23.791.665.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA DAERAH	Rp.	23.791.665.000,00
1. Belanja Tidak langsung	Rp.	6.976.220.000,00
- Belanja Pegawai	Rp.	6.976.220.000,00
2. Belanja Langsung	Rp.	16.815.445.000,00
- Belanja Pegawai	Rp.	5.590.195.000,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.	10.115.175.000,00
- Belanja Modal	Rp.	1.110.075.000,00

Alokasi Anggaran Belanja Daerah baik Anggaran Belanja Tidak Langsung maupun Anggaran Belanja Langsung Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 23.791.665.000,00 dengan realisasinya adalah sebesar

Rp. 21.174.634.575,50 atau sebesar 89 %. Adapun realisasi Anggaran tersebut dapat diuraikan sebagai berkut :

Realisasi Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2014 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau adalah sebesar Rp 6.440.274.339,00 atau sebesar 92,32 % dari anggarannya sebesar Rp. 6.976.220.000,00

Realisasi Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung tahun 2014 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau sebesar Rp. 14.734.360.236,50 atau sebesar 87,62 % dari anggarannya sebesar Rp. 16.815.445.000,00,-.

p. Penanaman Modal

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau adalah sebesar Rp. 3.033.691.578,00 atau 91,41% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 3.318.846.000,00.

Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau adalah sebesar Rp. 4.042.781.580,00 atau 80,76% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp 5.005.936.500,00.

Adapun pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.17
Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Real	%Pencapaian target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Profesional dalam memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Persentase Aparatur yang bersertifikat keahlian	orang	35	35	100%	

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa jumah aparatur pada BPPT ada 35 (tiga puluh lima) orang dimana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus profesional dan transparan dan tepat waktu proses penyelesaian perizinan.

Tabel IV.18
Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Real	%Pencapaian target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi, Investasi dan Penanaman Modal	2	Bertambahnya pendapatan Asli Daerah melalui retribusi, investasi dan penanaman modal	Rupiah	2,5 M	3,9 M	100%	

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa dalam peningkatan Pendapat Asli Daerah dalam Target Retribusi Tahun 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan realisasi retribusi sebesar Rp. 3.994.188.500,- bahwa penerimaan retribusi meningkat dari 2 (dua) izin yaitu IMB (Izin Mendirikan Bangunan) izin yang diterbitkan 267 izin dan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) izin yang diterbitkan 1043 izin.

Tabel IV.19
Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Real	%Pencapaian target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan	3	Terlaksananya Tertib Administrasi Pelayanan Perizinan	Unit	49	49	100%	

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa dalam menunjang kegiatan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang sebanyak 49 Unit untuk BPPT.

Tabel IV.20
Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Real	%Pencapaian target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
4	Meningkatnya Kinerja dan Realisasi Keuangan	4	Tersusunnya Laporan kinerja dan realisasi keuangan setiap tahunnya	Dok	10	10	100%	

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa dalam peningkatan Kinerja dan Realisasi perlu disusun Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan dalam bentuk dokumen.

Tabel IV.21
Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Real	%Pencapaian target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
5	Terjalinnya Koordinasi yang Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Perizinan	5	Terkoordinasinya proses perizinan dengan efektiv dan efisien	Tahun	1	1	100%	

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa dalam berkoordinasi tentang penyelenggaraan perizinan dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tabel IV.22
Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Real	%Pencapaian target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
6	Tertibnya Pelaksanaan Pelayanan Perizinan	6	Tercapainya Pelayanan Perizinan sesuai dengan keinginan Daerah	Tahun	1	1	100%	

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa dalam pencapaian pelaksanaan perizinan sudah tercapai dan sesuai dengan keinginan Pemerintah Daerah.

Tabel IV.23
Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Real	%Pencapaian target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
7	Tertibnya Administrasi Pelayanan Perizinan	7	Tersedianya dokumen perizinan sesuai dengan keinginan masyarakat	Dok	3573	2845	79,63%	

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa pelayanan perizinan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 dimana target untuk penerbitan izin adalah 3573 sedangkan realisasi izin sebanyak 2845 izin dari 11 (sebelas izin) seperti, Izin Spanduk, IMB, SITU, IUJK, Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan, SIUP, TDP, TDI/IUI, Izin Petik SBW dan Izin Angkut SBW, Izin Jagal serta Pendaftaran Penanaman Modal.

Tabel IV.24
Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Real	%Pencapaian target	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8
8	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	8	Evaluasi Pelayanan Perizinan	Buku	30	10	50,00%	

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa untuk mengatahui tingkat kepuasan masyarakat BPPT Kab. Berau memberikan quisioner kepada pemohon izin dan membuat buku sebagai pedoman untuk kedepannya.

Tabel IV.25
Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Real	%Pencapaian target	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Tersedianya data perizinan dan investasi	9 Terlaksananya kegiatan monitoring	Kec	13	13	100%	

Pencapaian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Realisasi Kinerja Sasaran bahwa dalam penyediaan data perizinan dimana dilaksanakan kegiatan monitoring di 13 (tiga belas) Kecamatan.

PENERIMAAN RETRIBUSI

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau dalam memberikan Pelayanan Perijinan dibedakan menjadi empat bidang, yaitu Bidang Perekonomian dengan 4 jenis perizinan, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan 3 jenis perizinan, Bidang Perizinan Tertentu, Bidang Pelayanan Umum dengan 4 jenis perizinan dan Bidang Penanaman Modal dengan 1 jenis perizinan.

Sepanjang tahun 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau menerbitkan perizinan dan penerimaan retribusi sebagai berikut :

Tabel IV.26
Penerbitan izin dan Penerimaan Retribusi
Tahun 2014

No	Jenis Perizinan	Jumlah Izin	Jumlah Penerimaan Retribusi
1.	Spanduk, Reklame, Baleho	182	0,00
2.	I M B	267	2.688.522.000,00
3.	S I T U	1043	1.305.666.500,00
4.	I U J K	77	0,00
5.	Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan	16	0,00
6.	S I U P	659	0,00
7.	T D P	546	0,00
8.	TDI	19	0,00
9.	IUI	1	0,00
10.	Ijin Petik Sarang Burung Walet	24	0,00
11.	Ijin Angkut Sarang Burung Walet	6	0,00
12.	Ijin Jagal	4	0,00
13.	Pendaftaran Penanaman Modal	1	0,00
	T o t a l	2845	3.994.188.500,00

q. Kebudayaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Urusan Kebudayaan diarahkan pada peningkatan mengenalan kekayaan budaya daerah dan kecintaan masyarakat terhadap budaya. Nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial digunakan untuk memperkuat identitas daerah.

Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau diuraikan sebagai berikut :

“Bertambahnya koleksi benda cagar budaya”

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Bertambahnya koleksi benda cagar budaya dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah koleksi benda cagar budaya menunjukkan capaian kinerja sasaran sebesar 89,70 % dengan predikat sangat ***berhasil***

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diperoleh dari besarnya prosentase Benda Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Berau sebagai warisan sejarah masa lampau yang dapat dilestarikan, oleh karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau terus melakukan upaya untuk mengumpulkan Benda Cagar Budaya sebagai koleksi Museum Batiwakkal dan Museum Keraton Sambaliung.

Sasaran tersebut dicapai melalui Program Pengelolaan Kekayaan Budaya , dengan melaksanakan kegiatan pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah dengan dukungan dana Rp. 282.753.100,00 (89,70%) dari target Rp. 315.230.000,00

Hambatan/Masalah :

Minimnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan Benda Cagar Budaya peninggalan Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung

Strategi/pemecahan masalah :

Sosialisasi terhadap masyarakat tentang Benda Cagar Budaya

“Meningkatnya kegiatan seni dan budaya”

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kegiatan seni dan budaya dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah kegiatan/event seni dan budaya di dalam dan luar daerah memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 89,44 % dengan predikat ***sangat berhasil***

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penetapan beberapa situs sejarah di Kabupaten Berau antara lain :
    a) Keraton Gunung Tabur
    b) Keraton Sambaliung
    c) Makam Sultan M. Hadi Jalaluddin
    d) Makam Sutan M.H. Bayanuddin
    e) Makam Sultan M. Kaharuddin

f) Makam Sultan M. Aminuddin
g) Makam Sultan M. Zainal Abidin
h) Makam Sultan Amiril Mukminin
i) Makam Sultan Asyik Syarafuddin
j) Makam Sultan M. Salehuddin
k) Makam Kubah Syech M. Ali Junaidi Al Banjari
l) Makam Keramat Syarif Husen
m) Makam Kuda, Ligadung Makalli
n) Makam Saba'ani
o) Sisa Bangunan Pabrik Penggergajian Peninggalan Belanda
p) Makam Belanda
q) Kamar Bola/Ball Room
r) Pelabuhan Batu Bara Peninggalan Belanda
s) Rumah Tua Rumah Kayu Milik Agus Hairuddin,SE

2. Pengembangan keragaman seni budaya di Kabupaten Berau seperti mamanda,hadra,gambus, sastra karang-karangan,badiwa,taria-tarian, lomba lagu daerah, pawai budaya.
3. Pelestarian Nilai-nilai adat seperti pesta adat bakudung batiung, meja panjang, buang naas.

Sasaran mendapatkan dukungan realisasi dana Rp.5.889.671.905,00 atau (89,44%) dari target Rp.6.585.060.000,00.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
2. Meningkatnya kualitas seni budaya lokal
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya.

Hambatan/Masalah :

Kegiatan kesenian dan kebudayaan belum dilaksanakan secara rutin dan masih terkesan monoton dan sulit berkembang, masyarakat kurang mampu memanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian

Strategi/pemecahan masalah :

Melakukan pembinaan agar masyarakat mampu memahami fungsi dan arti kegiatan upacara adat dan tradisi budaya serta dapat memeanfaatkannya untuk peningkatan taraf hidup

"Bertambahnya usaha jasa sarana pariwisata"

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Bertambahnya usaha jasa sarana pariwisata dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah usaha jasa sarana pariwisata memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 74,31 % dengan predikat ***berhasil.***

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya usaha jasa pariwisata di Kabupaten Berau di Sektor Pariwisata khususnya dalam usaha Akomodasi dan Rumah Makan.
2. Meningkatnya daya serap tenaga kerja di sektor Pariwisata

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Berau
2. Mudahnya proses perijinan usaha sektor pariwisata

Sasaran tersebut dicapai melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan melaksanakan kegiatan pengembangan , sosialisasi , dan penerapan serta pengawasan standarisasi dengan realisasi dukungan dana Rp.365.597.860,00 atau (74,31%) dari target Rp.492.020.000,00.

Hambatan/Masalah :

Kurangnya kesadaran pelaku usaha jasa pariwisata untuk mendaftarkan usahanya

Strategi/pemecahan masalah :

Lakukan sosialisasi dan pengawasan usaha jasa pariwisata

"Meningkatnya pelayanan administrasi"

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah aparatur yang sesuai dengan beban pelayanan administrasi memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 93,74 % dengan predikat ***Sangat Berhasil.***

Sasaran tersebut dicapai melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , dengan melaksanakan 15 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp.1.842.439.285,00 atau (93,74) dari target Rp.1.965.520.000,00.

Hambatan/Masalah :

Belum optimalnya pengelolaan administrasi kegiatan dan penatausahaan keuangan

Strategi/pemecahan masalah :

Sosialisasi tentang pengelolaaan administrasi kegiatan dan penatausahaan keuangan

"Meningkatnya kualitas SDM aparatur"

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas SDM aparatur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 76,35 % dengan predikat ***berhasil.***

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Tersedianya aparatur yang terampil dan terlatih
2. Tingkat Prosentase kecepatan penyelesaian tugas

Sasaran tersebut dicapai dengan dukungan realisasi dana Rp.848.426.698,00 atau (76,35%) dari target Rp.1.111.170.000,000,00

Hambatan/Masalah :

Kegiatan pelatihan SKP di lingkup dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak dilaksanakan karena tidak tersedia narasumber

Strategi/pemecahan masalah :

Menyiapkan aparatur yang menguasai cara penyusunan SKP

"Meningkatnya sarana dan prasarana kantor"

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana kantor dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah sarana dan parasarana yang optimal dan memadai memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 94,18 % dengan predikat ***sangat berhasil.***

Indikator sasaran pencapaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan umur ekonomisnya (optimal).
2. Tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai.

Sasaran tersebut dicapai melalui Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan dukungan realisasi dana Rp.354.510.150,00 atau (94,18%) dari target Rp.376.400.000,00

Hambatan/Masalah :

Belum tersedianya gedung kantor yang representatif untuk mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Strategi/pemecahan masalah :

Melaksanakan rehab ringan eksterior dan interior Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau mengelola anggaran belanja untuk kegiatan sampai dengan anggaran perubahan sebesar Rp 22.278.055.000,00, dengan rincian :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah : Rp. 4.192.405.000,00
b. Belanja Langsung sejumlah : Rp.18.085.650.000,00

r. Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pemuda dan Olahraga

Sasaran urusan Pemuda dan Olah Raga diarahkan pada peningkatan kapasitas pemuda di berbagai bidang dan naiknya derajat kesehatan fisik dan mental para pemuda serta berkembangnya diversifikasi dan prestasi oleh raga. Kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna meningkatkan kualitas manusia. Tahun 2014 Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.080.291.350 dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.925.636.037 atau 72.17%,

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesbang Politik dan Linmas

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan antara lain untuk:

1) Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, jati diri dan indentitas bangsa melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya yang mempunyai potensi unggul.
2) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.

3) Mewujudkan kenyamanan, ketertiban dan kepatuhan masyarakat (stakeholders) dengan melalui peningkatan kepatuhan aparat pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan daerah.
4) Terlaksananya peran dan fungsi lembaga politik dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tahun 2014 anggaran pada Badan Kesbangpollinmas sebesar Rp**.** 16.296.744.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 15.200.146.040 atau 93,27%.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau menetapkan 6 (Enam) kebijakan untuk tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan Dan Pengendalian;
2. Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Secara Rutin;
3. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Dalam Menjaga Lingkungan Sosial;
4. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Lingkungan Sosial.
5. Meningkatkan Kemampuan/Kompetensi Sumber daya Aparatur;
6. Meningkatkan Fasilitas Pendukung Pelaksanaan Tugas.

Sasaran yang akan dicapai pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2014 adalah sebanyak 3 (Tiga) sasaran. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran-sasaran yang dicapai dalam tahun 2014 dapat dicapai dengan cukup baik sesuai target pada sasaran yang telah direncanakan.

Sedangkan dari kinerja kegiatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2014 sebanyak 22 (dua

puluh dua) kegiatan dan 7 (Tujuh) program. Bila dilihat pada tingkat pencapaian program yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja kegiatan, maka dapat dicapai sesuai dengan target.

Realisasi Belanja

Belanja Tidak Langsung

Target Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau sebesar Rp. 5.168.150.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp.3.945.683.048,00

Belanja Langsung

Target Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014 untuk membiayai 7 program adalah sebesar Rp 8.036.479.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.771.633.393,00-

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sekretariat Daerah

Anggaran pada Sekretariat Daeah meliputi beberapa bagian yakni : Bagian Pembangunan, Bagian Humas dan protokol, Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan, Bagian Pertanahan, Bagian organisasi, Bagian Pemerintahan, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Ekonomi, Bagian Tekhnologi Informasi.

Dari total anggaran sebesar Rp. 145.520.982.695 untuk tahun 2014, di Sekretariat Daerah Kabupaten Berau telah terealiasasi sebesar Rp. 106.480.932.694 atau 73.17%.

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD bertugas memberikan pelayanan dalam rangka menunjang tugas-tugas DPRD, telah dilaksanakan setiap tahunnya adalah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; Hearing/dialog dan koordinasi dng pejabat pememerintah dan tokoh masyarakat/tokoh agama; Rapat - rapat alat kelengkapan dewan; Rapat-rapat paripurna; Kegiatan Reses; Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah; Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD; Sosialisasi peraturan perundang-undangan; Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah; Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kab. Berau.

Untuk tahun anggaran 2014, Sekretariat DPRD mendapat alokasi dana sebesar Rp. 41.172.184.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.273.677.849,- atau 63,81%

Sekretariat Dewan Korpri

Sekretariat Dewan Korpri untuk tahun anggaran 2014 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 4.059.292.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.017.550.674,-Anggaran tersebut untuk menunjang program-program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program pengembangan perumahan
4. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga
5. Program penataan peraturan Per UU

Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Dinas pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Kekayaan mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu: sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2011 – 2015 Strategi Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada upaya sebagai berikut :

1. Penggalian potensi pendapatan daerah
2. Peningkatan partisipasi publik dalam pendapatan daerah
3. Peningkatan Kualitas aparatur pendapatan daerah
4. Optimalisasi system organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah
5. Peningkatan Keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah
6. Penegakan Peraturan bidang pendapatan daerah
7. Peningkatan kualitas hubungan dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait

Upaya Peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara kontinue dan memperhatikan kemampuan daerah, dengan demikian perlu tahapan prioritas sebagai berikut :

1. Penetapan dasar hukum Pajak Daerah,Retrebusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain dan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu
2. Penataan Administrasi Pajak Daerah dan retrebusi daerah dan Pendapatan lain-lain
3. Perumusan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
4. Koordinasi Konsultasi dan Pembinaan pengelolaan pendapatan daerah
5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pendapatan daerah
7. Peningkatan Kompetensi aparatur pemungutan pendapatan
8. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

9. Penataan bidang perencanaan,pelaporan dan evaluasi pendapatan
10. Pengembangan sumber- sumber pendapatan

Berdasarkan tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau dapat diketahui 4 (Empat) Sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu :Tercapainya Penerimaan daerah yang Optimal

1. Terwujudnya Anggaran Belanja berbasis kinerja yang efesien, efektif dan ekonomis
2. Tercapainya Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah yang wajar tanpa pengecualian
3. Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas dengan didukung sarana prasarana yang memadai

Tercapainya Penerimaan daerah yang optimal

Sasaran ini dapat dicapai melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber PAD
- Penyusunan Potensi Pajak Daerah, Retrebusi Daerah dan Lain-lain PAD yg Sah
- Pendataan PBB
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2014 dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Sedangkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran secara umum dapat diatasi.

Tercapainya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Wajar tanpa pengecualian

Sasaran ini dapat dicapai melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan

- Penyusunan Rancangan Pertanggung Jawaban APBD
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH.tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD
- Pembinaan SIMDA dan BMD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2014 dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Sedangkan Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran secara umum dapat diatasi.

Terkelolanya Aset daerah dan Sumber daya Aparatur yang berorientasi pada kepentingan public

Sasaran ini dapat dicapai melalui Program Pembinaan Simda BMD, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan – kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Kepegawaian

Urusan Kepegawaian dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima serta birokrasi yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan kualitas dan kapabilitas aparatur Pemerintah Kabupaten Berau. Urusan ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, peningkatan disiplin pegawai, serta peningkatan layanan bagi aparatur pemerintah, sejak tahun 2008 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Berau telah berubah nomenklaturnya sesuai PP No 41 tahun 2008 menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dengan visi yaitu Mendorong Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Berau yang

Berkualitas dan Sejahtera pada tahun 2012 telah mengelola anggaran daerah sebesar Rp. 17.596.196.850,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 12.229.917.284,- atau 69,00%.

Realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014 dapat dilihat dari capaian kinerja yang dapat digunakan sebagai ukuran peningkatan kualitas SDM aparatur berdasarkan laporan kinerja dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dapat dilihat pada uraian berikut :

A. Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran ***Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah*** dapat dilihat pada tabel

Tabel IV.27
Indicator *Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Pejabat struktural kabupaten berau yang mengikuti Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV	22	19	86.36	Sangat Berhasil
Pejabat struktural kabupaten berau yang mengikuti Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	80	0	0	Tidak Berhasil
PNS yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional Pra pensiun	60	60	100	Sangat Berhasil
PNS BKPP Kabupaten Berau yang mengikuti Bimtek/pelatihan	15	17	113.33	Sangat Berhasil
Meningkatnya pengetahuan dan keahlian PNS dalam pengadaan barang dan jasa	Orang	80	0	Tidak Berhasil

Capaian sasaran (kategori Cukup berhasil)=(3x92,5)/5=55,5

Capaian sasaran (kategori tidak berhasil)=(2 x 27,5)/5=11

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1 adalah 66,5

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran I diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 66,5 dengan kategori

cukup Berhasil. Pada sasaran I terdiri dari 5 (lima) indikator dengan nilai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1. Pejabat struktural Kabupaten Berau yang mengikuti Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan realisasi sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Diklat Kepemimpinan Tingkat II, 7 (tujuh) orang Diklat kepemimpinan Tingkat III dan 12 (dua belas) orang Diklat kepemimpinan Tingkat IV. Sampai dengan tahun 2014 pejabat structural eselon II, III dan IV sebanyak 814 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan Tingkat II, III dan IV sebanyak 785 orang atau 96%. Pejabat Struktural eselon II, III dan IV yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan terdiri dari Eselon II sebanyak 2 (dua) orang dan Eselon IV sebanyak 26 (dua puluh enam) orang atau 28%.

Tabel IV.28
Pejabat Eselon

Uraian	Yang sdh diklat	Yang blm Diklat
Eselon II	34	2
Eselon III	170	0
Eselon IV	582	26
Jumlah	**786**	**28**

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Pejabat struktural kabupaten berau yang mengikuti Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV mengalami peningkatan dari 84% pada tahun 2013 menjadi 86,36% pada tahun 2014.

2. Pejabat struktural Kabupaten Berau yang ditargetkan untuk mengikuti Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2014 sebanyak 80 (delapan puluh) orang dengan realisasi 0%

dengan kategori tidak berhasil. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Pejabat struktural kabupaten berau yang mengikuti Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV mengalami penurunan dari 100% pada tahun 2013 menjadi 0% pada tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya perubahan peraturan bidang kediklatan sesuai dengan Perka LAN RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan lampiran Perka LAN RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Perubahan tersebut antara lain : Jam pelajaran, Sarana dan prasarana kediklatan seperti Ruang belajar, asrama, mushala, ruang makan dan lain-lain.

Tabel IV.29
Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pejabat struktural kabupaten berau yang mengikuti Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	40	40	80	0

3. Sejak tahun 2014 telah dianggarkan kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional Pra pensiun yang diikuti oleh 60 (enam puluh) orang PNS atau 100%. Hasil yang diharapkan dari Diklat Teknis dan fungsional Pra Pensiun ini adalah terpenuhinya/meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan untuk bekal usaha para PNS yang akan purna tugas.
4. PNS BKPP Kabupaten Berau yang telah mengikuti Bimtek/pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal tahun 2014 sebanyak 17 (tujuh belas) orang atau 113% dari 15 (lima belas) orang yang ditargetkan. Adapun diklat/pelatihan yang diikuti antara lain : Lakip, Renstra, IKM, Pengelolaan Aset dan barang, Keuangan dll.

Tabel IV.30
Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNS BKPP Kabupaten Berau yang mengikuti Bimtek/pelatihan	10	10	15	17

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja PNS BKPP Kabupaten Berau yang mengikuti Bimtek/pelatihan mengalami peningkatan dari 100% pada tahun 2013 menjadi 113,33 % pada tahun 2014.

5. Pada Anggaran Perubahan Tahun 2014 dianggarkan kegiatan Bimtek Impementasi Peraturan Perundang undangan (Bimtek Pengadaan Barang dan jasa) ditarget 80 (delapan puluh) orang dengan realisasi 0. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan jumlah hari pelaksanaan dan jam pembelajaran dari 2 (dua) hari menjadi 5 (lima) hari. Dengan adanya perubahan hari pelaksaan bimtek tersebut maka ujian sertifikasi pengadaan barang dan ujian dinas saja yang dapat diselenggarakan. Dalam pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan baran/jasa ditargetkan diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta, dan yang mendaftar sebanyak 40 (empat puluh) orang. Pada pelaksaan ujian tersebut peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti adalah 29 (dua puluh Sembilan) peserta. Dari hasil ujian yang diadakan oleh Lembaga Kajian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), 1 (satu) orang peserta yang lulus ujian dan berhak untuk mendapatkan sertifikat.

B. Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran ***II Terwujudnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS*** dapat dilihat pada tabel

Tabel IV.31
Capaian Sasaran Kinerja II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan	25	25	100	Sangat Berhasil

Capaian sasaran (kategori Cukup berhasil)=(1x92,5)/1=92,5

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis II adalah 92,5

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran II diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori ***Sangat Berhasil***. Pada sasaran II terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut :

1. Berdasarkan data tersebut di atas, realisasi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tahun 2014 sebanyak 25 kasus atau 100%. Berdasarkan data tahun tahun 2013, ada peningkatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. Hal ini dikarenakan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tahun sebelumnya yang masih dalam proses penyelesaian dan pada tahun 2014 sudah diproses untuk penyelesaiannya. Adapun kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang ditindaklanjuti tahun 2014 antara lain :
   - Pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebanyak 5 (lima) kasus
   - Pelanggaran Disiplin sebanyak 8 (delapan) kasus
   - Tindak pidana sebanyak 5 (lima) kasus
   - Pengunduran diri sebagai PNS sebanyak 2 (dua) kasus
   - Proses status kepegawaian sebanyak 5 (lima) kasus.

Tabel IV.32
Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan	10	10	25	25

C. Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran III ***Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan aparatur*** daerah dapat dilihat pada tabel

Tabel IV.33
Capaian Sasaran Kinerja III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
PNS yang menerima SK Pensiun dan Klaim Tepat Waktu	80	42	52.50	Tidak Berhasil
PNS yang menerima Karpeg	50	90	180	Sangat Berhasil
PNS yang menerima Karis/Karsu	100	100	100	Sangat Berhasil
PNS yang menerima Taspen	50	97	194	Sangat Berhasil
Terpenuhinya pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan & Perceraian bagi PNS	12	12	100	Sangat Berhasil
PNS yang menerima penghargaan SLKS 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun dilingkungan pemerintah Kabupaten Berau	175	189	108	Sangat Berhasil

Capaian sasaran (kategori Sangat berhasil)=(5x92,5)/6=77

Capaian sasaran (kategori tidak berhasil)=(1 x 27,5)/6=4,6

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1 adalah 81,6

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran III diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 81,6 dengan kategori ***Berhasil***. Pada sasaran III terdiri dari 6 (enam) indikator dengan nilai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1. PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim tepat waktu Tahun 2014 ditargetkaan sebanyak 80 (delapan puluh) orang dengan realisasi sebanyak 42 (empat puluh dua) orang atau 52,2%.

   Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim tepat waktu mengalami penurunan dari 100% pada tahun 2013 menjadi 52.52 % pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana pada Pasal 90 disebutkan bahwa batas usia pensiun ASN adalah :

   - 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi
   - 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi

Tabel IV.34
Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim tepat waktu	92	92	80	42

2. PNS yang menerima Karpeg pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan realisasi sebanyak 90 (sembilan puluh) orang atau 180%.

Tabel IV.35
Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNS yang menerima Karpeg	300	400	50	90

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Jumlah PNS yang menerima Kartu Pegawai (Karpeg) mengalami peningkatan dari 300 orang atau 113% pada tahun 2013 menjadi 180 % pada tahun 2014

3. PNS yang menerima Karis/Karsu pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 100 (seratus) orang dengan realisasi sebanyak 100 (seratus) orang atau 100%.

Tabel IV.36
Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNS yang menerima Karis/karsu	148	248	100	100

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Jumlah PNS yang menerima Karis/karsu mengalami penurunan dari 167% pada tahun 2013 menjadi 100 % pada tahun 2014 hal ini dikarenakan jumlah PNS yang mengusulkan pengurusan karis/karsu berkurang.

4. PNS yang menerima Taspen pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan realisasi sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) orang atau 194 %. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Jumlah PNS yang menerima Taspen mengalami peningkatan dari 167% pada tahun 2013 menjadi 194% pada tahun 2014

Tabel IV.37
Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNS yang menerima Taspen	149	249	50	97

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Jumlah PNS yang menerima Taspen mengalami peningkatan dari 167% pada tahun 2013 menjadi 194% pada tahun 2014.

5. Terpenuhinya pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan & Perceraian bagi PNS pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 12 kasus dengan realisasi 9 (Sembilan) kasus atau 75%. Sedangkan 3 (tiga) kasus sudah ditindaklanjuti dan masih dalam proses penyelesaian.

6. PNS yang menerima penghargaan SLKS 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun dilingkungan pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 175 orang dengan realisasi mencapai 189 orang atau 108%.

   Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun dilingkungan pemerintah Kabupaten Berau mengalami peningkatan dari 164% pada tahun 2013 menjadi 108% pada tahun 2014.

Tabel IV.38
Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNS yang menerima penghargaan SLKS 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun dilingkungan pemerintah Kabupaten Berau	100	164	175	189

D. Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran **IV Meningkatnya pengembangan karier pegawai daerah** dapat dilihat pada tabel

Tabel IV.39
Capaian Sasaran Kinerja IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Terseleksinya pendaftar calon Praja IPDN untuk diterima menjadi Praja IPDN dan tersedianya aparatur yang berkualitas setelah lulus pendidikan	10	3	30	Tidak berhasil
Meningkatnya kompetensi kejenjang pendidikan lebih tinggi melalui pengiriman tugas belajar dan ikatan dinas	27	20	74.07	Berhasil
PNS eselon, II, III dan IV yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan eselon	90	120	133.33	Sangat Berhasil

Capaian sasaran (kategori Sangat berhasil)=(1x92,5)/3=30,83

Capaian sasaran (kategori berhasil)=(1 x 77,5)/3=25.83

Capaian sasaran (kategori tidak berhasil)=(1 x 27,5)/3=9,16

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis IV adalah 65,82

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran IV diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 65,82 dengan kategori ***Cukup Berhasil***. Pada sasaran IV terdiri dari 3 (tiga) indikator dengan nilai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1. Terseleksinya pendaftar calon Praja IPDN untuk diterima menjadi Praja IPDN dan tersedianya aparatur yang berkualitas setelah lulus pendidikan ditargetkan sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan realisasi 3 (tiga) orang atau 30%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Terseleksinya pendaftar calon Praja IPDN untuk diterima menjadi Praja IPDN dan tersedianya aparatur yang berkualitas setelah lulus pendidikan mengalami penurunan dari 6 (enam) orang atau 60% pada tahun 2013 menjadi 3 (tiga) orang atau 30% pada tahun 2014. Rendahnya target kegiatan penerimaan Calon Praja IPDN tahun 2014 disebabkan :
   - Pelaksanaan seleksi Calon Praja IPDN Tahun 2014 menggunakan Sistem CAT dengan standar kelulusan secara nasional. Dari 22 (dua puluh dua) orang calon peserta dari Kabupaten Berau, 3 (tiga) orang yang lulus dan diterima menjadi Praja IPDN.

Tabel IV.40
Perbandingan Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terseleksinya pendaftar calon Praja IPDN untuk	10	6	10	3

diterima menjadi Praja IPDN dan tersedianya aparatur yang berkualitas setelah lulus pendidikan				

2. Meningkatnya kompetensi kejenjang pendidikan lebih tinggi melalui pengiriman tugas belajar dan ikatan dinas pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 27 (dua Puluh Tujuh) orang dengan realisasi 20 (dua puluh) orang atau 74.07 %. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Meningkatnya kompetensi kejenjang pendidikan lebih tinggi melalui pengiriman tugas belajar dan ikatan dinas mengalami peningkatan dari 25 (dua puluh lima) orang atau 49% pada tahun 2013 menjadi 27 (dua puluh tujuh) orang atau 74,07% pada tahun 2014

Tabel IV.41
Capaian Sasaran Kinerja IV

Indikator Kinerja	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kompetensi kejenjang pendidikan lebih tinggi melalui pengiriman tugas belajar dan ikatan dinas	51	25	27	20

3. PNS eselon, II, III dan IV yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan eselon pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang dengan realisasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang atau 133,33 %. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja PNS eselon II, III dan IV yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan eselon mengalami peningkatan dari 60 (enam puluh) orang pada tahun 2013 menjadi 120 (seratus dua puluh) orang atau 133,33% pada tahun 2014.

Tabel IV.42
Perbandingan Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNS eselon, II, III dan IV yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan eselon	60	60	90	120

Adapun hasil yang diharapkan dengan adanya uji kompetensi bagi pejabat eselon II, II dan IV adalah tersedianya data atau gambaran yang jelas mengenai spesifikasi karakter dan kompetensi dari masing-masing individu pejabat. Sehingga dapat dijadikan suatu acuan pertimbangan yang tepat dalam proses penempatan atau promosi jabatan sehingga dapat menempatkan seseorang dalam posisi yang tepat sesuai kompetensi dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kabupaten berau secara menyeluruh.

E. Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran **V Terselenggaranya pengadaan CPNS berdasarkan spesifikasi keahlian** dapat dilihat pada tabel

Tabel IV.43
Capaian Sasaran Kinerja V

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan formasi	300	239	79,67	Berhasil

Capaian sasaran (kategori berhasil)=(1x77,5)/1=77,5

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis V adalah 77,5

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran V diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 77,5 dengan kategori ***Berhasil***. Pada sasaran 5 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan formasi ditargetkan sebanyak 300 (tiga ratus) orang dengan realisasi 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) orang atau 79,67%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan formasi mengalami peningkatan dari 92 (Sembilan puluh dua) orang atau 30,7% pada tahun 2013 menjadi 239(dua ratus tiga puluh sembilan) orang atau 79,67% pada tahun 2014

Tabel IV.44
Perbandiangan Kinerja Sasaran V

Indikator Kinerja	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan formasi	300	92	300	239

F. Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran **VI Terwujudnya pengelolaan data kepegawaian berbasis teknologi informasi** dapat dilihat pada tabel

Tabel IV.45
Capaian Sasaran Kinerja VI

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Data kepegawaian yang akurat dalam sistem aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	6000	5724	95,40	Sangat Berhasil
Data kepegawaian yang akurat dalam sistem tata naskah PNS	1500	1500	100	Sangat Berhasil
PNS yang naik pangkat tepat waktu	1500	1046	69,73	Cukup Berhasil
Tersusunya data analisis kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten berau	500	500	100	Sangat Berhasil

Capaian sasaran (kategori Sangat berhasil)=(3x92,5)/4=69,3

Capaian sasaran (kategori Cukup berhasil)=(1 x 62,5)/4=15,6

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 4 adalah 84,9

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran VI diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 84,9 dengan kategori ***Berhasil***. Pada sasaran 5 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1. Data kepegawaian yang akurat dalam sistem aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pada Tahun 2014 ditargetkan 6000 (enam ribu) pegawai yang diupdate dalam SAPK dan terealisasi sebanyak 5.724 (lima ribi tujuh ratus dua puluh empat) pegawai. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Data kepegawaian yang akurat dalam sistem aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) mengalami peningkatan dari 3.200 (tiga ribu dua ratus) orang pegawai atau 91,4% pada tahun 2013 menjadi 5.724 (lima ribu tujuh ratus dua puluh empat) orang pegawai atau 95,4% pada tahun 2014

Tabel IV.46
Perbandingan Kinerja Sasaran VI

Indikator Kinerja	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Data kepegawaian yang akurat dalam sistem aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	3500	3.200	6000	5.724

2. Data kepegawaian yang akurat dalam sistem tata naskah PNS pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1.500(seribu lima ratus) PNS dan terealisasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) PNS atau 100%.
3. PNS yang naik pangkat tepat waktu pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) PNS dan terealisasi sebanyak 1.046 (seribu empat puluh enam) PNS atau 69,7%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja PNS yang naik pangkat tepat waktu mengalami penurunan dari 1.263 (seribu dua ratus enam puluh tiga) PNS atau 153% pada

tahun 2013 menjadi 1.046 (seribu empat puluh enam) PNS atau 69,7% pada tahun 2014.

4. Tersusunya data analisis kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten berau pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 500 (lima ratus) orang dengan realisasi sebesar 500 (lima ratus) orang atau 100%.

G. Indikator keberhasilan dan capaian kinerja terkait pencapaian sasaran **VII Terwujudnya pengelolaan data kepegawaian berbasis teknologo informasi** dapat dilihat pada tabel

Tabel IV.47
Capaian Sasaran Kinerja VII

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensi dan latar belakang pendidikan	150	186	124%	Sangat Berhasil

Capaian sasaran (kategori Sangat berhasil)=(1x92,5)/1=

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis VII adalah 92,5

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran VII diketahui bahwa nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 77,5 dengan kategori ***Sangat Berhasil***. Pada sasaran VII terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai capaian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1. PNS yang ditempatkan berdasarkan ditargetkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dengan realisasi 186 (seratus delapan puluh enam) orang atau 124 %. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian terhadap indikator Kinerja Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan mengalami peningkatan dari 267 (dua ratus enam puluh tujuh) orang atau 75% pada tahun 2013 menjadi 186(seratus delapan puluh enam) orang atau 124% pada tahun 2014.

Tabel IV.48
Perbandingan Kinerja Sasaran VII

Indikator Kinerja	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNS yang ditempatkan berdasarkan	356	267	150	186

Ringkasan pencapaian sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2014, dengan menggunakan rata-rata pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel IV.49
Capaian Sasaran Kinerja BKPP Tahun 2014

No	Sasaran	Capaian Rata-rata%	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	66,5	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak, kewajiban dan disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	92,5	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan aparatur daerah	81,6	Berhasil
4	Meningkatnya pengembangan karier pegawai	65,8	Cukup Berhasil
5	Terselenggaranya pengadaan CPNS berdasarkan spesifikasi keahlian	77,5	Berhasil
6	Terwujudnya pengelolaan data kepegawaian berbasis teknologi informasi	84,9	Berhasil
7	Terpenuhinya penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional berdasarkan kompetensi dan latar belakang pendidikan formal	92,5	Sangat Berhasil

Uraian Tingkat Keberhasilan dan Kelemahan Pencapaian Kinerja

Secara umum dapat kami jelaskan bahwa dari beberapa sasaran yang telah diuraikan diatas terdapat 7 (tujuh) sasaran), 20 Indikator sasaran yang mempunyai 4 program yang tertuang dalam 20 kegiatan dengan rincian 2 (dua) sasaran kategori sangat berhasil, 3 (tiga) sasaran dengan capaian berhasil, 2 (dua) sasaran dengan kategori cukup berhasil

Dari seluruh Sasaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2014 dapat dikategorikan *Berhasil*.

Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena adanya kerjasama yang baik dari seluruh aparatur di BKPP Kabupaten Berau serta dukungan dari instansi terkait. Secara keseluruhan, Indikator Sasaran tersebut diatas tentunya masih memiliki kelemahan-kelemahan yang diakibatkan oleh perubahan peraturan perundangan undangan di bidang kepegawaian.

Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Berau yang sebelumnya adalah Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Daerah dalam bidang pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, pada tahun 2014 alokasi anggaran Inspektorat sebesar Rp. 13.788.292.050,- telah direalisasikan sebesar Rp. 11.402.399.803.,-

Kecamatan

Untuk urusan **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** pada SKPD kecamatan di Kabupoaten berau telah dilaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan kapsitas Sumber Daya Aparatur
   - Bimtek Implementasi peraturan per UU
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
   - Operasional PKK kecamatan dan Kelurahan
4. Program penataan administrasi kependudukan
   - Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
5. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan
   - Pelaksanaan MTQ Tingklat Kecamatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas, untuk tahun anggaran 2014 telah dialoaksikan dana sebesar Rp. 56.277.309.716,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 45.958.530.323,- atau 81,66%.

u. Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 adalah sebanyak 18 (delapan belas) sasaran strategis. Dilihat dari tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran-sasaran yang dicapai pada Tahun 2014 SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Berau tercapai dengan baik, hal ini dapat kita lihat pada realisasi kinerja anggaran tahun 2014 yaitu total anggran sebesar Rp. 8.488.947.000 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 7.326.229.754,- atau capian realisasi fisik keuangan sebesar 86,30 %.

Namun dari sekian bayak program kegiatan, ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya dan realisasi fisiknya tidak mencapai sesuai target-target yang direncanakan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Keg.	Angg. (000)	Target	realisasi	%
Ketersediaan Cadangan Pangan bagi Masyarakat	-Terukurnya pola konsumsi pangan harapan (PPH) masyarakat dan - Pelatihan pengolahan pangan lokal	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	400	13 Kec. 7 Kamp	13 Kec 7 Kamp.	76,96

1. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah jumlah alokasi dana (input) Rp. 400.000.000,- dengan realisasi capaian sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 257.509.150,- atau persentasi realisasi keuangan sebesar Rp. 64,38 % sementara target indikator kinerjanya adalah terukurnya pola konsumsi pangan harapan (PPH) masyarakat 13 Kecamatan dan Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal 7 kampung serta terlaksananya lomba cipta menu B2SA, capaian indikator kinerja adalah data PPH masyarakat dilaksanakan 13 kecamatan dan pelatihan pengolahan pangan lokal 7 kampung capaian fisik kegiatan adalah (output) 76,96 % hal ini di sebabkan karena kegiatan lomba cipta menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat Provinsi dan Kabupaten tidak dapat dilaksanakan karena dana transportasi peserta tidak tersedia di DPA.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keg.	Angg. (000)	Target	realisasi	%
Biaya operasional Penyuluh PNS dan THL	Penunjang kegiatan operasional penyuluh lapangan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	1.482	960 OB	927 OB	97,86

2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Kegiatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Jumlah alokasi dana (input) Rp. 1.482.000.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp. 1.162.500.000,- atau persentasi realisasi keuangan sebesar 78,44%. Keluaran (output) adalah tersedianya dana penunjang kegiatan operasional penyuluh lapangan, target indikator yang ingin dicapai adalah 960 OB atau sebanyak 80 penyuluh PNS dan THL-TB. Tetapi realisasi yang dicapai hanya sebesar 927 OB atau kurang lebih 78 penyuluh PNS dan THL-TB hal ini disebabkan karena ada satu orang penyuluh PNS dan satu orang penyuluh THL-TB yang tidak mencairkan dana BOPnya.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Angg. (000)	Target	realisasi	%
Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh	Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan bagi penyuluh	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluh	837,927	-1 Unit BPK - 6 Jns Brg	-1 Unit BPK - 6 Jns Brg	95,75

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Jumlah alokasi dana (input) Rp. 837.925.000,- dengan realisasi Rp. 677.982.930,- atau persentasi realisasi keuangan sebesar 80,91%. Keluaran (output) adalah terbangunnya sarana dan prasarana penyuluhan sebanyak (target) 1 unit BPP dan 6 jenis barang, capaian realisasi fisik 95.75 %. Hal ini disebabkan karena adanya dana SILPA pembangunan kantor BPP Gunung Tabur (nilai biaya pelaksanaan kontrak lebih kecil dari anggaran yang disediakan dalam pagu DPA), dan biaya konsultan perencanaan pembangunan kantor BPP Tanjung Batu tidak dilaksanakan kerena lokasi rencana pembangunan BPP tersebut masih dalam tahap pembebasan.

v. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung kinerja pada urusan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Berau untuk tahun anggaran 2014 telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 16.196.854.000,- dan terealisasi sebesar Rp.. 12.101.623.419,-

Adapun dana tersebut diatas, diarahkan untuk mencapai program-program yang telah ditetapkan yaitu :

1. Peningkatan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
3. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5. Program pengembangan Kecamatan
6. Program pengembangan perumahan

w. Statistik

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan statistik saat ini di tangani oleh instansi vertikal yang berada di daerah yakni Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. Namun dalam pelaksanaanya SKPD pemerintah kabupaten berau yang berkoordinasi dalam urusan statistik adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dalam hal ini melaksanakan program:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Program Pengambangan Data / Informasi
   - Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah
   - Penyusunan Profile Daerah

x. Kearsipan

Urusan kearsipan di Kabupaten Berau ditujukan untuk mengamankan dokumen/arsip untuk semua sektor di unit kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dan mempercepat proses pencarian dokumen. Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor PDE dan Kearsipan yang sejak tahun 2009 berubah namanya menjadi Kantor Arsip dan Dokumentasi

Alokasi anggaran pada Kantor Arsip dan Dokumentasi tahun 2014 sebesar Rp. 3.497.108.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.176.418.242,- dalam rangka melaksanakan urusan kearsipan, Kantor Arsip dan Dokumentasi telah melaksanakan penataan arsip/dokumen milik Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Berau. Selain Bagian Keuangan, urusan kearsipan masing-masing Satuan Kerja di Pemerintah Kabupaten Berau masih dilaksanakan oleh Satuan Kerja masing-masing.

y. Komunikasi dan informatika

Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Berau dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah dan Kantor PDE dan Kearsipan, serta beberapa Satuan Kerja terkait. Urusan komunikasi dan informatika diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi bagi kepentingan pelayanan publik serta meningkatnya sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik. Selain itu, urusan komunikasi dan informatika dimaksudkan untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan informasi bagi kepentingan publik. Pemanfaatan teknologi tinggi menjadi strategi dalam pembangunan urusan komunikasi dan informatika.

Melalui pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, diharapkan tersedia pusat data dan informasi dalam sistem jaringan berbasis Teknologi Industri (TI) yang terintegrasi. Hal tersebut menggambarkan hasil upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Berau dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mengelola informasi.

z. Perpustakaan

Kantor Perpustakaan Umum

Pelaksanaan urusan perpustakaan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepustakaan kepada masyarakat yang pada gilirannya bertujuan untuk menyediakan sumber ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat. **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.** Yang didukung alokasi dana pada tahun 2014 sebesar Rp. 8.699.855.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 7.608.749.657,-

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Kabupaten Berau pada umumnya adalah :

- Belum seluruh SKPD mencantumkan target kinerjanya secara jelas dan terukur sehingga pencapaian kinerjanya belum dapat secara handal dilaporkan.
- Tuntutan akan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional;
- Distribusi dan kualitas SDM kurang merata;

Untuk mengantisipasi agar hal tersebut di atas tidak terjadi lagi pada pelaksanaan di masa mendatang.

- Pemerintah Kabupaten Berau bertekad untuk menyusun APBD termasuk Perubahan APBD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga

koordinasi dan pembahasan dengan SKPD, tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan panitia anggaran legislatif dapat dilakukan tepat waktu. Diharapkan dalam perubahan APBD dihindari adanya tambahan pekerjaan fisik yang memerlukan pelaksanaan yang cukup lama, misalnya konstruksi.

- Perlunya bimbingan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi SKPD dalam penyusunan laporan kinerja, sehingga diharapkan laporan kinerja SKPD sesuai yang diharapkan dan lebih handal.
- Perlu adanya peningkatan kemampuan teknis dan administrasi aparat pelaksana kegiatan melalui pendidikan formal dan non formal misalnya diklat dan bimbingan teknis.

B. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Pertanian

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
   - Peningkatan kemampuan lembaga petani
   - Peningkatan infrastuktur dan daya dukung lahan kering
   - Pendampingan Kegiatan Prassarana dan Saran Pertanian (APBN)
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
   - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
   - Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
   - Pengembangan perbenihan/perbibitan padi sawah
   - Peningkatan Produksi produk pertanian
   - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
   - Pengumpulan, Pengolahan Data dan Statistik Pertanian
   - Pengembangan perbenihan/pembibitan hortikultura
   - Pendampingan Peningkatan Produksi Padi dan Palawija (APBN)

3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
   - Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
   - Peniongkatan Sub Terminal Agribisnis
4. ProgramPeningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
   - Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
   - Monitoring pupuk bersubsidi
   - Penyuluhan peningkatan produksi pertanian
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
   - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
   - Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
   - Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Pertanian
   - Pendampingan Pengembangan Holtikultura (APBN)

Dinas Perkebunan

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
   - Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
   - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan pembinaan pelaksanaan kemitraan / plasma masy dengna PBS
   - Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/ kelompok tani
   - Konservasi Lahan dengan komoditas perkebunan
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
   - Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
   - Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
   - Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Pendampingan pekebun dan pelaku agribisnis

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Perkebunan Tepat Guna
   - Penyuluhan Penerapan Teknologi Perkebunan Tepat Guna
   - Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Perkebunan Modern Bercocok Tanam
   - Pengembangan pengetahuan sarana dan prasarana perlindungan petani perkebunan
   - Kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Tepat Guna (SL-PHT)
4. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
   - Penyediaan sarana produksi perkebunan (bibit tanaman)
   - Pengembangan bibit unggul perkebunan
   - Pengolahan data statistik perkebunan
   - Pengendalian dan perlindungan tanaman perkebunan
   - Pembinaan dan pengendalian pengembangan perkebunan besar
5. Program Pengembangan perencanaan perkebunan
   - Konsolidasi pembangunan perkebunan
   - Penyusunan data Base komoditi unggulan perkebunan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
   - Pendataan Masalah Peternakan
   - Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
   - Pelayanan kesehatan hewan

- Penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis

2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
   - Pendistribusian bibit tenak kepada masyarakat
   - Pengembangan agribisnis peternakan
   - Pengembangan kawasan dan kelembagaan peternakan
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
   - Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
   - Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
   - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
   - Pengendalian zoonosis dan pengawasan kualitas bahan pangan asal ternak
   - Peningkatan sarana dan prasarana RPH dan RPU
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
   - Peningkatan penerapan teknologi pakan ternak
   - Peningkatan mutu genetik bibit ternak
5. Program perencanaan pembangunan bidang peternakan

   Sinkronisasi program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan

b. Kehutanan

Dinas Kehutanan

1. Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan
   - Monitoring dan evaluasi kegiatan TPTI dan PMDH pada IUPHHK

- Rekonsiliasi realisasi pembayaran iuran kehutanan PSDH, DR, IUPHH
- Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan
- Inventarisasi goa sarang burung walet
- Pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan hak/rakyat
- Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

2. Program rehabilitasi hutan dan lahan
   - Pembuatan bibit tanaman kehutanan
   - Penyusunan Rancangan teknis RHL (Luncuran)
   - Pelaksanaan reboisasi manual sistem jalur (luncuran)
   - Pelaksanaan pembuatan hutan rakyat murni (Luncuran)
   - Penyusunan rancangan pembuatan hutan rakyat pola kebun (luncuran)
   - Pelaksanaan pemeliharaan Tahap I reboisasi manual sitem jalur (luncuran)
   - Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh hutan
   - Pengembangan hasil hutan non kayu (luncuran)
   - Pendampingan kegiatan RHL Tahun 2014 di kabupaten Berau
   - Pemmbuatan penghijauan lingkungan
   - Pengembangan hasil hutan non kayu
   - Rencana tahunan RHL
   - Peboisasi (DAK)
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
   - Pengawasan dan pengamanan hutan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan ilegal loging
   - Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung/ kawasan konservasi
   - Penyuluhan dan sosialisasi kebijakan dan peraturan
   - Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan dan

pengamanan Hutan (DAK)

4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
    - Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan
    - Fasilitasi pembangunan hutan berbasis masyarakat
    - Sinkronisasi data batas IUPHHK-HA/HT antar wilayahan kab. Berau data provinsi dan kementerian puast
    - Monitoring dan evaluasi pembuatan/penggunaan koridor dan pelaksanaan IPK
    - Pendamping program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasi pemb. Masyarakat
    - Monitoring perencanaan pembukaan areal tambang
    - Penyebaran peta kawasan hutan ke kecamatan
    - Pendampingan program FORCLIME
5. Program pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH)
    - Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengguna kawasan pada wil KPHP model berau barat
    - Pengembangan perhutanan sosial di wil KPHP model berau barat
    - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional KPHP model berau barat (DAK)

c. Eenergi dan Sumberdaya Mineral

Dinas Pertambangan Dan Energi

1. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangab
    - Kegiatan penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan
    - Kegiatan pengelolaan administrasi perizinan usaha pertambangan
    - Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral dan batubara
2. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

- Pembangunan Jaringan Listrik
- Pengadaan dan pemasangan PLTS
- Survey potensi Sumber energi alternatif
- Pemeliharaan /perbaikan PLTS dan PLTMH

3. Program operasional dan pemeliharaan ketenagalistrikan
   - Operasional dan pemeliharaan ketenagalistrikan daerah
4. Program pembinaan dan pengawasan sektor hilir migas bagi perusahaan pertambangan
   - Pembinaan dan pengawasan sektor hilir migas
5. Program Pengembangan perencanaan bangunan
   - Konsolidasi perencanaan pertambangan dan energi
   - Mengikuti pameran/promosi di luar daerah
6. Program konservasi dan perlindungan lingkungan geologi
   - Monitoring dan evaluasi perijinan pemanfaatan air
   - Inventarisasi potensi galian tambang
   - Inventarisasi daerah rawan longsor
   - Kajian geo hidrologi

d. Keluatan dan perikanan

Dinas Perikanan Dan Kelautan

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyakat Pesisir
   - Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
   - Pendampingan nelayan dan pelaku agribisnis
   - Temu usaha perikanan pemberdayaan ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan
2. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
   - Pembinaan dan pembekalan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan SD Kelautan

3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
   - Penyuluhan hukum dan pendayagunaan sumber daya laut
4. Pengembangan budidaya perikanan
   - Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
   - Peningkatan wawasan perikanan
   - Pengembangan budidaya perikanan laut dan payau
   - Pengembangan budidaya perikanan air tawar
   - Pengembangan balai benih ikan air tawar
   - pengembangan balai benih ikan pantai
5. Pengembangan perikanan tangkap
   - Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
   - Pemeliharaan rutin/berkala TPI
   - Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
   - Pelatihan/Bimtek teknologi penangkapan ikan
   - Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan
6. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
   - Promosi potensi dan peluang usaha perikanan
   - Pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
   - Pengembangan pelayanan usaha perikanan
   - Bimbingan teknis teknologi pengelolaan hasil perikanan
7. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
   - Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
   - Monitoring hama dan penyakit ikan
8. Peningkatan sarana prasarana produksi
   - Peningkatan produksi dan sarana prasarana perikanan (DAK)
9. Pengembangan perencanaan bangunan kelautan & Perikanan
   - Konsolidasi pembangunan perikanan
   - Pengendalian dan evaluasi

10. Konservasi sumber daya perikanan
    - Resticking sumber daya ikan di perairan berau
    - Pengembangan dan penguatan lembaga pengelola kawasan perikanan kabupaten berau
    - Daerah perlindungan laut di perairan Berau
11. Pemutakhiran data potensi kelautan dan perikanan
    - Pendataan potensi desa kelautan dan perikanan
    - Bimbingan dan pelatihan statistik perikanan
12. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
    - rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
    - mitigasi bencana alam laut

e. Urusan Perdagangan

Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
    - Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
    - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
    - Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
    - Sosialisasi kebijakan dan peraturan tentang perlindungan konsumen
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
    - Peningkatan ekspor dan peningkatan investasi daerah
    - Forum komunikasi surat keterangan asal (SKA) bidang perdagangan luar negeri
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
    - Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha
    - Peningkatan jaringan informasi perdagangan
    - Kegiatan operasional pasar sanggam adji dilayas
    - Pelaksanaan pasar murah

4. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
   - Sosialisasi peraturan dan kebijakan tentang retribusi pasar
   - Sarana dan prasarana pasar

f. Urusan Perindustrian

Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
   - Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
   - Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri
   - Fasilitasi sertifikasi halal
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
   - Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri
   - Pembinaan dan inventarisasi sentra industri kecil menengah potensial

g. Urusan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
   - Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
   - Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam nusantara dan luar negeri.
   - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
   - Peningkatan pembangunan srana dan prasarana pariwisata
   - Pengembangan daerah tujuan wisata
   - Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan

standarisasi

- Program Pengembangan Kemitraan
- Pengembangan dan penguatan informasi dan data base
- Pengembangan SDM dan profesionalisme di budang pariwisata
- Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
- Pengembangan SDM dan profesionalisme di bidang pariwisata
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Konsolidasi lingkup budaya dan pariwisata
- Fasilitasi kemitraan daerah bidang pariwisata.

h. Urusan Ketransmigrasian

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Program pengembangan wil. Transmigrasi
   - Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
2. Program Pengembangan masyarakat dan kawasan Transmigrasi
   - Pelatihan pengelola koperasi daerah transmigrasi se kabupaten berau
   - Sosialisasi PP no 3 tahun 2014 tentang ketransmigrasian

2. REALISASI PELAKSAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Pertanian

Perolehan capaian indikator kinerja terhadap sasaran selama tahun 2014 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan prosentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan prosentase capaian yang cukup rendah. Berikut ini perolehan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 beserta evaluasi dan analisis capaiannya :

Tabel IV.50
Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2012	Target 2013	Capaian 2014	% Capaian 2014
Ketersediaan Pangan Utama	kg	35.381.000	104.143,78	44.776.000	42.994,41
Meningkatnya Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Ton/Ha	3,17	3,10	3,25	104,84
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	2,17	3,49	2,17	62,18

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran tercapainya kebutuhan pangan dengan 3 indikator kinerja utama pada tahun 2014 yaitu *pertama*, ketersediaan pangan utama capaiannya melebihi target dengan jumlah 44.776.000 kg atau 42.994,41%; *kedua*, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya capaiannya melebihi target dengan jumlah 3,25 ton/ha atau 104,84% dengan realisasi meningkat 2,52% dari tahun sebelumnya 2012; *ketiga*, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB capaiannya 62,18 % dari target yang telah ditetapkan 3,49 dengan realisasi sebesar 2,17 %.011.

Sekretariat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pada sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dengan 23 indikator kinerja secara umum dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 22 indikator kinerja nilai prosentase capaiannya pada tahun 2014 mencapai 100%.

Sekretariat mendapatkan alokasi dana untuk tahun 2014 sebesar Rp 2.115.561.500,- (Dua Milyar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 1.902.258.018,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Belas Rupiah) atau 89,92% (Tabel 9).

Bidang Bina Usaha

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pada Bidang Bina Usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Tahun 2014 dengan 4 indikator kinerja secara umum dapat terlaksana cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 2 indikator kinerja nilai prosentase capaiannya pada tahun 2014 mencapai 100%. Masing-masing indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

(1) *Meningkatnya pemberdayaan lembaga petani* prosentase capaian tahun 2014 mencapai 100%, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani melaksanakan 3 kali pembinaan kelompok tani di Tumbit Melayu, Tunggal Bumi dan Biatan Ilir; serta 1 kali Bimtek/Pembelajaran tentang kelembagaan petani ke Jawa Tengah untuk petani sebanyak 4 orang.

(2) *Tersedianya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil yang Semakin Baik,* Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai target kinerja pada tahun 2014 yaitu belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa mesin pengering buah 1 unit dan alat pengolah tepung singkong 6 unit. Tetapi kedua jenis mesin/alat tersebut tidak dapat direalisasikan semuanya karena ada perubahan harga sehingga pagu dana yang sudah ditetapkan di dalam DPA tidak mencukupi untuk pembelian mesin/alat tersebut.

(3) *Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian unggulan daerah* prosentase capaiannya hanya 33,33%. Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah ini pada tahun 2014 telah menargetkan kegiatan acara panen raya sebanyak 8 kali dan mengikuti acara PENAS 1 kali, yang terealisasi hanya acara panen raya sebanyak 2 kali yaitu di Kampung Maluang dan Kampung Tembudan serta mengikuti acara PENAS di Malang Propinsi Jawa Timur. Acara panen raya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan kondisi

petani/pertanian dibeberapa kampung di Kabupaten Berau masih belum memenuhi syarat untuk melaksanakan panen raya;

(4) *Meningkatnya Pendapatan Petani dan Pedagang* dapat terealisasi dengan baik dengan prosentase capaian di tahun 2014 adalah 100%, Kegiatan Peningkatan Sub Terminal Agribisnis sesuai target kinerja dapat terlaksana yaitu 1 paket kegiatan yaitu belanja pemeliharaan bangunan/gedung; dan mengirim 2 orang petani untuk mengikuti pelatihan penyerapan teknologi pengelolaan Sub Terminal Agribisnis di D. I. Yogyakarta.

Bidang Bina Usaha mendapatkan alokasi dana untuk tahun 2014 sebesar Rp 1.138.527.200,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 760.793.600,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 66,82% (Tabel 9).

Bidang Pengembangan Lahan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pada Bidang Pengembangan Lahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Tahun 2014 dengan 6 indikator kinerja secara umum dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 3 indikator kinerja nilai prosentase capaiannya pada tahun 2014 mencapai 100%. Masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut:

(1) *Meningkatnya infrastruktur dan daya dukung lahan kering (Jalan Produksi, JUT)* prosentase capaian pada tahun 2014 adalah 100%. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Daya Dukung Lahan Kering memiliki pekerjaan utama yang telah dilaksanakan dengan baik yaitu pembuatan jalan produksi 10.000 m pada 10 lokasi kampung di Kabupaten Berau yaitu di Suaran 1.000 m, Tumbit Melayu 1.000 m, Tubaan 1.000 m, Pandan Sari 1.000 m, Karangan 1.000 m, Eka Sapta

1.000 m, Sumber Mulya 1.000 m, Bumi Jaya 1.000 m, Suka Muria 1.000 m, dan Tembudan 1.000 m.

(2) *Meningkatnya Pemanfaatan Lahan dan Produktivitas Padi* prosentase capaian hanya 7,24%. Kegiatan Pendampingan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (APBN) tidak dapat terealisasi dikarenakan:

a. Pada Tahun 2014 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau hanya mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp 55.000.000,- (Rp 25.000.000,- untuk operasional PUAP dan Rp 30.000.000,- untuk penguatan KP3) sehingga dana dari APBD II tidak dapat digunakan untuk mendampingi kegiatan APBN.

b. Dana pendampingan yang sudah terserap sebesar Rp 26.905.500,- digunakan untuk evaluasi kegiatan APBN Tahun Anggaran 2013.

(3) *Meningkatnya Pemanfaatan Lahan dan Produktivitas Padi* dengan prosentase capaiannya pada tahun 2014 adalah 94,17%. Kegiatan optimasi lahan yang direncanakan adalah 120 ha, tetapi hanya dapat terlaksana 113 ha di 4 lokasi kampung yaitu Sambaliung (Limunjan) 30 ha, Tunggal Bumi 30 ha, Bumi Jaya 30 ha, dan Tasuk hanya 23 ha dari 30 ha target kinerja. Optimasi lahan yang dilaksanakan merupakan kegiatan padat karya oleh para petani setempat, di Tasuk terjadi kekurangan tenaga kerja sehingga hanya dapat dilaksanakan 76,66% dari rencana.

Selain optimasi lahan, pada kegiatan Peningkatan Produksi Produk Pertanian juga dilaksanakan kegiatan lain yaitu pembuatan saluran tersier sepanjang 3.000 m. Pelaksanaan pekerjaannya mencapai 100% yaitu di Tasuk 1.000 m dan Bebanir Bangun 2.000 m.

(4) *Tersedianya data dan informasi pertanian* prosentase capaian pada Tahun 2014 adalah 100%. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Data dan Statistik Pertanian khususnya untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura

dilaksanakan di 13 kecamatan di Kabupaten Berau selama 12 bulan setiap tahunnya.

(5) *Meningkatnya Jumlah Stok Benih Unggul di BBU Sei Bangun* dengan prosentase capaian adalah 100% pada Tahun 2014. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Padi Sawah yang dilaksanakan adalah perbanyakan benih padi sawah di lokasi BBU Sei Bangun dengan menanam padi pada Musim Tanam Gadu dan Rendengan. Tetapi yang dapat dilaksanakan secara maksimal hanya pada Musim Tanam Gadu. Pada Musim Tanam Rendengan hanya bisa dilaksanakan kegiatan sampai dengan menebas dan mengolah tanah saja karena terkendala LS honor untuk upah tenaga kerja.

Kendala lain yang dihadapi adalah turunnya produktivitas benih padi yang seharusnya bisa mencapai 2,5 ton/ha, pada Tahun 2014 hanya mencapai 2 ton/ha (Musim Tanam Gadu). Hal ini diakibatkan faktor alam disaat menanam dan panen, air pasang besar.

(6) *Meningkatnya Perbenihan / Perbibitan Hortikultura* mencapai prosentase pada Tahun 2014 adalah 66,67%. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura dilaksanakan di UPTD Balai Hortikultura di Kampung Birang. Pekerjaan yang telah direncanakan yaitu pengembangan benih jeruk citrus 1 kg, pembelajaran petugas ke Balai Hortikultura Jawa Tengah, dan pengadaan pameran sayur buah. Tetapi hanya pameran sayur buah tidak dapat terlaksana, dikarenakan dana tidak mencukupi untuk memenuhi faktor pendukung yang akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan pameran.

Bidang Pengembangan Lahan mendapatkan alokasi dana untuk tahun 2014 sebesar Rp 3.283.730.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 2.678.686.100,- (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) atau 81,57% (Tabel 9).

Bidang Produksi

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pada Bidang Produksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dengan 5 indikator kinerja secara umum dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari semua indikator kinerja nilai prosentase capaiannya pada tahun 2014 mencapai 100%. Masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut:

(1) *Meningkatnya Jumlah Stok Benih dan Produksi Padi, Palawija* prosentase capaian 100%. Kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija di Kabupaten Berau pada tahun 2014 seluas 975 ha dengan rincian yaitu **Perbanyakan benih padi sawah varietas unggul** 25 ha di Buyung-Buyung; **Pengembangan padi lahan kering/ladang** 300 ha di Tabalar Ulu, Batu Rajang, Punan Malinau, Bumi Jaya, Kayu Indah, Biatan Ulu, Bukit Makmur Jaya dan Ampen Medang; **Pengembangan padi nasional** 300 ha di Gunung Sari, Pandan Sari, Semurut, Tabalar Muara, Biatan Ilir, Karangan dan Sumber Mulya; **Pengembangan jagung hibrida** 250 ha di Ampen Medang, Sumber Mulya, Suka Muria, Bumi Jaya, Long Lanuk dan Harapan Maju; serta **Pengembangan kedelai** 100 ha di Kayu Indah dan Suka Muria.

(2) *Meningkatnya Luas Areal Budidaya Tanaman Pangan* prosentase capaian 100%. Kegiatan Pendampingan Peningkatan Produksi Padi dan Palawija (APBN) untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan dengan beberapa kegiatan yaitu SLPTT padi inbrida sawah seluas 1.000 ha (40 ha LL dan 960 ha SL) di Kecamatan Teluk Bayur, Gunung Tabur, Sambaliung dan Tabalar; SLPTT kedelai 240 ha (24 ha LL dan 216 ha SL) di Kecamatan Batu Putih, Talisayan dan Tanalar; SLPTT jagung hibrida 850 ha (34 ha LL dan 816 SL) di Kecamatan Talisayan, Biatan dan Segah.

(3) *Meningkatnya sarana dan prasarana produksi pertanian* prosentase capaian 100%. Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan bagi masyarakat/kelompok tani/GAPOKTAN/UPJA di Kabupaten Berau pada tahun 2014 berupa alat mesin pertanian sebanyak 62 unit dengan rincian yaitu **Hand Traktor** 23 unit di Merancang Ulu 1 unit, Merancang Ilir 1 unit, Melati Jaya 1 unit, Tanjung Perangat 2 unit, Sukan 2 unit, Bangun Bebanir 1 unit, Semurut 1 unit, Tabalar Muara 2 unit, Buyung-buyung 4 unit, Karangan 1 unit, Biatan Ilir 3 unit, Sumber Mulya 1 unit, Bumi Jaya 1 unit, Suka Muria 1 unit dan Harapan Jaya 1 unit; **Power Threser** 25 unit di Merancang Ilir 1 unit, Melati Jaya 1 unit, Birang 1 unit, Semurut 1 unit, Tabalar Muara 2 unit, Biatan Bapinang 1 unit, Bukit Makmur Jaya 1 unit, Biatan Baru 1 unit, Biatan Ilir 2 unit, Karangan 1 unit, Manunggal Jaya 1 unit, Bumi Jaya 1 unit, Dumaring 2 unit, Muara Lesan 1 unit, Siduung Indah 1 unit, Tembudan 1 unit, Buyung-buyung 3 unit, Bangun Bebanir 2 unit dan Suaran 1 unit; **Mesin Pemipil Jagung** 6 unit di Dumaring 1 unit, Eka Sapta 2 unit, Suka Muria 1 unit, Biatan Ilir 1 unit dan Bumi Jaya 1 unit; **RMU/Mesin Giling** 8 unit di Long Lamcin 1 unit, Pesayan 1 unit, Gunung Sari 1 unit, Karangan 1 unit, Semurut 1 unit, Buyung-buyung 1 unit, Bumi Jaya 1 unit dan Long Laai 1 unit.

(4) *Meningkatnya luas areal hortikultura* prosentase mencapai 100%. Kegiatan berorientasi pada Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan khususnya buah-buahan di Kabupaten Berau tahun 2014 seluas 83 ha dengan rincian yaitu Jeruk Keprok 26 ha di Maluang, Langsat 15 ha di Gunung Tabur, Lengkeng 10 ha di Suka Muria, Salak 6 ha di Gunung Tabur, Rambutan 10 ha di Rantau Panjang, Alpukat 6 ha di Sumber Agung dan Elai 10 ha di Kasai Pesayan.

(5) *Meningkatnya luas areal hortikultura* prosentase mencapai 100%. Kegiatan Pendampingan Pengembangan Hortikultura (APBN) untuk

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan dengan Pengembangan kawasan tanaman buah seluas 56 ha yaitu buah Jeruk Borneo Prima di Semurut 4.000 pohon, Tubaan 10.400 pohon, dan Harapan Maju 8.000 pohon.

Walaupun semua kegiatan di Bidang Produksi dapat berjalan dengan capaian prosentase 100%, ada kendala yang dihadapi yaitu proses lelang berjalan lambat sehingga semua kegiatan yang melalui kontrak kerja dengan rekanan baru bisa dimulai/dilaksanakan pada triwulan IV.

Bidang Produksi mendapatkan alokasi dana untuk tahun 2014 sebesar Rp 5.464.097.400,- (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 4.419.502.325,- (Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 80,88% (Tabel 9).

Bidang Perlindungan Tanaman

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pada Bidang Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dengan 3 indikator kinerja secara umum dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari keseluruhan indikator kinerja nilai prosentase capaiannya pada tahun 2014 mencapai 100%. Masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut:

(1) *Meningkatnya penerapan teknologi pertanian tepat guna tingkat petani* prosentase capaian kinerja tahun 2014 adalah 100%, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna dengan aplikasi demplot 3 ha (**Demplot pemupukan komoditas jagung** 1 ha di Eka Sapta 0,5 ha dan Suka Muria 0,5 ha; **Demplot pengapuran lahan sawah** 1 ha di Sukan 0,5 ha dan Semurut 0,5 ha; **Demplot pemupukan berimbang padi sawah** 1 ha di Melati Jaya 0,5 ha dan di Merancang Ulu 0,5 ha). Selain demplot juga

dilaksanakan penerapan teknologi PUTS 4 unit di Tabalar Muara 1 unit, Sukan 1 unit, Bebanir Bangun 1 unit dan Semurut 1 unit. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatannya yaitu kegiatan demplot yang tidak bisa dilaksanakan pada Musim Tanam Gadu/mundur ke Musim Tanam Rendengan karena ketersediaan air di lokasi baik irigasi dan curah hujan sangat terbatas.

(2) *Terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi dan pestisida* di Kabupaten Berau prosentase capaian kinerja tahun 2014 adalah 100%, dengan kegiatan Monitoring Pupuk Bersubsidi (pengawasan pupuk dan pestisida) di 12 kecamatan Kabupaten Berau dan bantuan pupuk NPK 11.000 kg di Gunung Tabur, serta herbisida 2.600 kg di Ampen Medang, Rantau Panjang, Birang, Biatan Bapinang dan Sumber Mulya.

(3) *Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani* prosentase capaian kinerja tahun 2014 adalah 100%, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian dengan SL-PHT 1 kelas di Biatan Ilir. Selain SL-PHT juga dilaksanakan tanggap darurat serangan hama penyakit tanaman padi, palawija dan hortikultura di 7 lokasi yaitu Kecamatan Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Segah, Tabalar, Talisayan dan Biatan. Kendala yang dihadapi pada kegiatan tanggap darurat ini seringkali tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di semua lokasi yang terserang hama dan penyakit karena adanya keterbatasan dana.

Bidang Perlindungan Tanaman mendapatkan alokasi dana untuk tahun 2014 sebesar Rp 1.667.027.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 1.460.852.450,- (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 87,63% (Tabel 9).

ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tahun 2014 realisasi anggaran belanja sebesar Rp 11.222.092.493,- dari Total Anggaran Rp 13.668.943.100,- sehingga pencapaian realisasi sebesar 82,10%.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada tahun 2014 Anggaran Belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau sebesar Rp 12.403.603.000 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2014 mencapai Rp. 9.674.561.325 atau 89,17%.

Adapun capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

1. Program Pengamanan Ternak dan Kesehatan Hewan

1. Program Pengamanan Ternak dan Kesehatan Hewan dilaksanakan Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari 13(Tiga Belas) sasaran dan Indikator Pencapaian Kinerja Sebagai Berikut:
    a. Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan untuk point (1) Revitalisasi Puskeswan target tahun 2014 2 unit hanya dapat di bangun sebanyak 1 unit atau 50 persen, kendala belum tersedianya lahan masih dalam proses penanggaran tahun 2015.(Point No.1).
    b. Pengawasan Obat Hewan Target sampel 100 realisasi 16 jenis sesuai peruntuknanya dan yang dapat di lakukan pengujian hanya 3 sampel atau 0,003 persen sisanya sudah habis masa regestrasi dari perusahaan obat hewan.(Point No.11).
    c. Pelayanan Aktif Kesehatan Hewan target 1 paket terealisasi 100 persen kurang lebih 10.500 dosis atau 5.025 populasi ternak yang terobati.(Point no.12).

d. Hal-hal lain untuk jangkauan lokasi pelayanan kesewan sebanyak 54 Kampung baik untuk kegiatan Survailance, Jembrana, Bucelosis, Rabies, AI, Antrax dan Sura atau 50 persen dari kampung yang ada di Kabupaten Berau.

e. Secara khusus untuk vaksinasi rabies dilanjutkan pada bulan Januari terutama di seputar Kota Tanjung Redeb.

f. Permasalahan yang dihadapi yaitu untuk mencapai target penyehatan hewan dengan jumlah populasi hampir 12.000 ekor maka dana yang tersedia belum terpenuhi, hal ini sebabkan karena dana yang tersedia digabungkan dengan pekerjaan fisik. Solusinya untuk kegiatan fisik dibuat RKA tersendiri sehingga kegiatan pelayanan penyehatan hewan dapat mencapai sesuai jumlah pupulasi yang ada.

2. Pendataan Masalah Peternakan

   a. Pengawasan Lalu Lintas Ternak terealisasi 390 pencapaian target hanya 97,5 persen, hal ini disebabkan kurangnya informasi tentang ternak yang datang dari luar(Point No.6).

   b. Kegiatan yang lain terpenuhi sesuai target bahkan melebihi dari target sasaran .

3. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Manular Ternak

   a. Untuk vaksinasi SE tidak dilaksanakan untuk tahun anggaran 2014 karena vaksinasi yang disubsidi dari Provinsi adalah vaksin Jembrana(Point no.9).

   b. Vaksin yang disubsidi dar Provinsi masa berlakunya /kadaluwarsa terlalu pendek sehingga tidak dapat diserap semua droving vaksin Jembrana (Point no.8).

   c. Untuk vaksin Rabies, sebelum dilaksanakan vaksinasi sangat diperlukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga pelaksanaan vaksinasi dilapangan dapat lebih maksimal.

d. Kegiatan yang lain tercapai 100 persen bahkan melebihi dari target yang menjadi sasaran, untuk itu perlu penambahan anggaran untuk sosialisasi Vaksin Rabies.

2. Program Peningkatan Sarana Produksi Peternakan

a. Bertambahnya populasi ternak sapi dari pengadaan sumber dana APBD II sebanyak 218 ekor dan APBD I Kaltim sebanyak 300 ekor

b. Bertambahnya area penggembalaan dari sektor perkebunan kelapa sawit milik rakyat dan perusahaan

c. Kebun HMT yang bersumber dari Anggaran APBD II dan APBN serta masyarakat dan kelompok

d. Bertambahnya biogas pada tahun 2014 sebanyak 39 unit dari berbagai sumber dana antara lain :
   - APBD II sebanyak 8 unit
   - APBD I sebanyak 20 unit
   - PLN sebanyak 7 unit
   - Perindagkop sebanyak 2 unit

e. Pengadaan Kambing dibatalkan karena terkendala non teknis yaitu masa berlaku rekomendasi mendatangkan dari provinsi asal sudah tidak berlaku lagi.

3. Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan

1. Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan dilaksanakan oleh Bidang Kawasan Usaha Peternakan yang terdiri dari 13(Tiga Belas) sasaran dan Indikator Pencapaian Kinerja Sebagai Berikut:

   a. Sentra ternak sesuai potensi wilayah difokuskan dikampung, Sukan Kecamatan Sambaliung, Kampung Sumber Mulya, Purnasari Jaya, Eka Sapta Kecamatan Talisayan.

b. Studybanding agribisnis dilaksanakan di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
c. Kontribusi Kelembagaan dalam pembangunan peternakan tahun 2014 direalisasikan pada Kelompok tani ternak dan Kemitraan ayam ras pedaging yang sampai saat ini dapat memenuhi bukan hanya di Kabupaten Berau tapi sudah mensuplay ke provinsi Kalimantan Utara (KALTARA)
d. Pemberdayaan masyarakat lingkar tambang dilaksanakan di 4 Kampung (Tumbit Melayu, Birang, Melati Jaya dan Maluang)
e. Prestasi kelembagaan kelompok ternak pada tahun 2014 dapat diinformasikan bahwa 3 kelompok ternak mendapat nominasi juara provinsi antara lain :
    - Kelompok ternak Sarwodadi Kampung Kayu Indah, Juara I kategori ternak kambing
    - Kelompok ternak Tunas Harapan Kampung Eka Karya Juara II kategori ternak sapi
    - KWT Eka Karya Kampung Teluk Bayur juara III kategori unggas
f. Untuk memenuhi kebutuhan telur ayam ras di Kabupaten Berau, terdapat penambahan populasi ayam petelur dari masyarakat mandiri antara lain :
    - Bambang Samirat Kampung Labanan Makarti sebanyak 100 ekor
    - Bunyamin Slamet Kampung Bangun sebanyak 3500 ekor
    - Abudzar Kampung Samburakat sebanyak 5000 ekor
g. Penambahan populasi ternak sapi sebanyak 35 ekor pada Tahun 2014 dengan sumber APBN

4. Program Pembinaan Pasca Panen dan Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner

1. Reviltalisasi dalam rangka pelayanan UPT Rumah Potong Hewan pada tahun 2014 adalah dibangunan imstalasi dan penampungan air bersih serta pengadaan meja daging serta pengadaan baha pembersih dan pengecatan gedung RPH serta pagar depan.
2. Dalam rangka meningkatkan fasilitas RPU pada tahun 2014 telah dibangun kandang penampungan unggas sebalum dipotong.
3. Untuk menjami produk peternakan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) secara berkala dilaksanakan pengambilan dan pemeriksaan sample serta inspeksi mendadak dipusat-pusat penjualan produk peternakan.
4. Untuk menjamin halal disektor hulu di RPH telah ada juru potong yang mempunyai sertifikat halal
5. Untuk memperkenalkan ragam produk peternakan telah diikuti moment expo tingkat lokal, provinsi dan nasional
6. Untuk menjamin kualitas produk ASUH pada momen Ibadah Qurban, setiap tahun dilaksanakan penyuluhan dari tingkat penjual hewan dan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong diseluruh wilayah Kabupaten Berau.

Dinas Perkebunan

Pada tahun 2014 anggaran pada Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp. 16.649.630.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.408.454.935,00 atau 80,53% dari anggaran.

Adapun capaian kinerja untuk tahun 2014 pada Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Capaian kinerja dari Program Peningkatan Kesejahteraan Petani adalah sebesar 75,03% yang bermakna Program berhasil dilaksanakan, namun terdapat dua kegiatan yang menunjukkan **kurang berhasil** dilaksanakan yaitu Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, capaian kinerjanya hanya sebesar 32,71% dan Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani / Kelompok Tani yang capaian kinerjanya hanya sebesar 48,92%.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Capaian kinerja dari Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dapat berhasil dilaksanakan dengan pencapaian sebesar 85,03%.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Capaian kinerja dari Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dapat berhasil dilaksanakan dengan pencapaian sebesar 77,20%, namun terdapat satu Kegiatan yaitu Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam yang pencapaiannya hanya sebesar 66,95 yang bermakna cukup berhasil.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Capaian kinerja dari Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dapat berhasil dilaksanakan dengan pencapaian sebesar 75,10%, namun terdapat dua kegiatan yang menunjukkkan Pelaksanaan Kegiatan **Kurang Berhasil** yaitu Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan dengan capaiana kinerja hanya 47,31% dan Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dengan capaian kinerja sebesar 55,18% .

Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan

Capaian kinerja dari Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga pencapaian berkategori 87,59%.

b. Kehutanan

Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Berau tahun 2014 sebesar Rp. 320.883.882.247,- untuk membiayai Program-program dengan realisasi sebesar Rp. 30.834.127.945,- atau hanya 9,61%.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2014 adalah sebanyak 11 (sebelas) sasaran. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran-sasaran yang dicapai dalam tahun 2014 dapat dicapai dengan cukup baik sesuai target pada sasaran yang telah direncanakan.

Sedangkan dari kinerja kegiatan yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2014 sebanyak 92 (Sembilan puluh dua kegiatan) kegiatan dan 10 (sepuluh) program. Bila dilihat pada tingkat pencapaian program yang didasarkan pada pencapaian masing-masing indikator kinerja kegiatan, maka dapat dicapai sesuai dengan target, terkecuali pada beberapa kegiatan yang belum tercapai termasuk kegiatan pembiayaan DAK-DR Tahun 2014 belum terealisasi khususnya yang sifatnya luncuran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi capaian Dinas Kehutanan yakni keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta penurunan Kerusakan Kawasan Hutan pada wilayah kelolanya.

Untuk IKU Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, diketahui pada tahun 2010 luas hutan dan lahan kritis di Kabupaten Berau seluas 238.401,06 Ha, dan pada tahun 2011 telah berhasil dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 100 Ha pada daerah pesisir pantai dengan penanaman mangrove, sehingga secara otomatis akan mengurangi luas kerusakan kawasan hutan. Dan pada tahun 2012 telah berhasil melaksanakan Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 600. Namun pada tahun 2013 Kinerja Utama Rehabilitasi Hutan dan lahan tidak dapat tercapai (nol persen) hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2013 proses lelang baru dapat dilaksanakan, sehingga secara otomatis fisik

kegiatannya dilaksanakan pada tahun 2014 dan mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 19.590.007.820,- pada kegiatan antara lain :

Kode Kegiatan 16.48 Pembuatan Hutan Rakyat Murni Pola Kebun (Luncuran)

Kode Kegiatan 16.49 Pegembangan Hasil Hutan Non Kayu (Luncuran)

Kode Kegiatan 16.50 Reboisasi (Luncuran).

Namun Dinas Kehutanan Kab. Berau terkendala dalam kegiatan penyusunan Perencanaan Tahunan RHL hal ini disebabkan belum terbentuknya Tim Teknis Penilai Perencanaan Tahunan RHL hingga akhir tahun.

Diharapkan dengan IKU ini SKPD Dinas Kehutanan mempunyai sasaran terencana dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang prosentasenya direncanakan mengalami kenaikan, sedangkan luas kerusakan hutan prosentasenya dapat diturunkan.

Adapun untuk Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK-DR) belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan sebagai berikut :

1. Masalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang masih belum jelas pengesahan Tata Ruangnya.
2. Pada Tahun 2013 kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah penyusunan rencana pengelolaan RHL dan monev penyusunan rancangan kegiatan RHL, serta proses pelelangan kegiatan. sehingga kegiatan-kegiatan fisiknya baru dapat dilaksanakan di tahun 2014.
3. Pada tahun 2014, Dinas Kehutanan terkendala melaksanakan pelelangan kegiatan perencanaan tahunan RHL untuk kegiatan 2015 hal ini sebabkan oleh regulasi / peraturan persyaratan dibentuknya Tim Penilai Perencanaan yang belum dibentuk hingga berakhirnya masa pelelangan terkait kendala teknis.

4. Kesulitan mencari kawasan hutan yang kritis, dimana dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 14/Menhut-V/2008 dipersyaratkan Proporsi Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam kehutanan Dana Reboisasi (bagian 40%) diatur sebagai berikut:
   a. Minimal 60% dari jumlah anggaran seluruhnya pada tahun yang bersangkutan digunakan untuk kegiatan RHL di dalam kawasan Hutan;
   b. Maksimal 40% dari jumlah anggaran seluruhnya pada tahun yang bersangkutan untuk kegiatan RHL di luar kawasan hutan.
5. Standar harga pengadaan bibit harus disesuaikan dengan harga standar lokal, untuk itu perlu revisi ke kementerian kehutanan.
6. Beberapa Kegiatan RHL yang sifatnya Luncuran, baru mengalami perubahan/penyesuaian item/nilai pekerjaan sesuai dokumen perencanaan, dan baru diusulkan pada tahun anggaran 2014.

c. Energi dan Sumberdaya Mineral

Dinas Pertambangan dan Energi

Perolehan capaian indikator kinerja terhadap sasaran selama tahun 2014 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian sangat rendah di bagian rutin. Berikut ini perolehan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2014 beserta evaluasi dan analisis capaiannya :

Pencapaian Sasaran 1 :

Secara umum realisasi pencapaian sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau, tahun anggaran 2014 dapat terlaksana. Hal ini tercermin dari dapat dicapainya indikator capaian program tepat pada sasaran.

Sedangkan realisasi pencapaian sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bidang Sekretariat tahun anggaran 2014 dapat terlaksana 100%.

Walaupun dari aspek pelaksanaan ada beberapa kegiatan dengan target waktu tidak dapat dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor realisasi keuangannya Rp. 0,- atau 0 %.
2. Kegiatan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, realisasi Rp. 50.485.642,- atau 47,43 %.
3. Kegiatan Penyediaan sewa gedung/kantor, realisasi Rp. 60.000.000,- atau 66,67 %.

Hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain :

1. Tidak terdapat permasalahan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor, penyerapan anggaran tidak di realisasikan karena gedung kantor masih terikat kontrak pemeliharaan dengan pembuat gedung.
2. Tidak terdapat permasalahan pada Kegiatan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana SPJ kegiatan tersebut selama TA. 2014.
3. Tidak terdapat permasalahan pada Konsolidasi Pertambangan dan Energi, penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana SPJ kegiatan tersebut selama TA. 2014.

Tabel IV.51
Pencapaian sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
21	Penertiban dan Pengawasan terhadap kegiatan Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan	Tertibnya Izin Pertambangan	13 Kecamatan 13 Lokasi	13 Kecamatan 13 Lokasi	100 %
22	Pengelolaan Administrasi Perizinan Usaha Pertambangan	Pengelolaan administrasi perizinan sesuai dengan peraturan	1 Paket	1 Paket	100 %
23	Monitoring dan	Tertibnya	9 Kecamatan	9 Kecamatan	100 %

	pengendalian kegiatan pertambangan mineral dan batubara	pengusahaan mineral dan batubara			

Pencapaian Sasaran 2 :

Pada Tahun Anggaran 2014 Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Berau memperoleh alokasi anggaran APBD Murni sebesar Rp.474.040.000,-

Sedangkan realisasi anggaran Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Berau Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 419.643.575,- dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Penertiban dan Pengawasan terhadap kegiatan Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan dengan realisasi Rp. 159.959.075,- atau 91,05 %.
2. Pengelolaan Administrasi Perizinan Usaha Pertambangan dengan realisasi Rp. 129.490.600,- atau 84,53 %.
3. Monitoring dan Pengendalian kegiatan pertambangan mineral dan batubara dengan realisasi Rp. 130.193.900,- atau 89.68 %.

Hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain :

1. Tidak terdapat permasalahan pada Kegiatan Penertiban dan Pengawasan terhadap kegiatan Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan, penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana SPJ kegiatan tersebut selama TA. 2014.
2. Tidak terdapat permasalahan pada Kegiatan Monitoring dan Pengendalian kegiatan pertambangan mineral dan batubara, sumber daya air dan listrik, penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana SPJ kegiatan tersebut selama TA. 2014.

Tabel IV.52
Pencapaian Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
24	Pembangunan Jaringan Listrik	Perolehan kebutuhan listrik masyarakat	SUTM SUTR Gardu Distribusi 15 paket Jarlis	SUTM SUTR Gardu Distribusi 15 paket Jarlis	100 % 100 % 100 % 100 %
25	Pengadaan dan Pemasangan PLTS dan PLTS Komunal	Terpenuhinya listrik pedesaan	336 unit plts PLTS KOMUNAL 2 UNIT	336 unit plts PLTS KOMUNAL 2 UNIT	100 % 100 %
26	Pemeliharaan/Perbaikan PLTS dan PLTMH Redisign pembangkitan daya PLTMH	Terpenuhinya listrik pedesaan	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	100 % 100 %
27	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	Terpenuhinya listrik pedesaan	3 Paket	3 Paket	100 %
28	Operasional dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan	Beroperasinya dan terpeliharanya ketenagalistrikan dan lampu penerangan jalan	12 kecamatan 2 Ls 1 unit	12 kecamatan 2 Ls 1 unit	100 % 100 % 100 %

Pencapaian Sasaran 3 :

Untuk Bidang Ketenagalistrikan dan Migas, Pencapaian untuk indikator kinerja Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik tahun 2014 dengan realisasi Rp. 8.715.769.350,- atau 84,17 %, untuk indikator kinerja Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Komunal dengan realisasi Rp. 14.22.654.899,- atau 98.86 %, untuk indikator kinerja Kegiatan Pemeliharaan / Perbaikan PLTS dan PLTMH tahun 2014 dengan realisasi Rp. 814.057.125,-atau 93,57, untuk indikator kinerja Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan tahun 2014 dengan realisasi Rp. 2.075.282.818,- atau 92,33 %.

Tabel IV.53

Pencapaian Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
29	Konsolidasi Pertambangan dan Energi	Sinkronisasi program dengan instansi terkait dan peningkatan SDM	108 buku 9.000 lembar 1 unit	108 buku 9.000 lembar 1 unit	100 % 100 % 100 %
30	Mengikuti Pameran/Promosi di Luar Daerah	Terwujudnya ikut serta dan berpartisipasi pada pameran/promosi diluar daerah	1 paket 300 lembar	1 paket 300 lembar	100 % 100 %

Pencapaian Sasaran 4 :

Untuk Bidang Sekretariat, Pencapaian indikator kinerja Kegiatan Konsolidasi Pertambangan dan Energi dengan realisasi Rp. 244.006.300,- atau 82,36 %, untuk Kegiatan Mengikuti Pameran/Promosi di Luar Daerah dengan realisasi Rp. 158.653.500,- atau 91,07 %.

Tabel IV.54
Pencapaian Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
31	Monitoring Evaluasi dan Perizinan Pemanfaatan Air	Tersedianya sumber daya air di Kabupaten Berau	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100 %
32	Inventarisasi Potensi Galian Tambang	Terpenuhinya data-data sumber daya air	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %
33	Inventarisasi Daerah Rawan Longsor	Terpenuhinya data-data	5 Kecamatan	5 Kecamatan	100 %
34	Kajian Geo Hidrologi	Terpenuhinya data-data	1 Kecamatan	1 Kecamatan	100 %

Pencapaian Sasaran 5 :

Untuk Bidang Geologi Pencapaian untuk indikator kinerja Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Perizinan Pemanfaatan Air tahun 2014 dengan

realisasi Rp. 309.747.050,- atau 98,75 %, untuk indikator kinerja Kegiatan Kajian Geo Hidrologi dengan realisasi Rp. 436,563,400,- atau 84,59 %.

Aspek Keuangan

Perhitungan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dengan Pendapatan Rp.0,00 realisasi Rp. 0.00 capaian 0,00 % dan untuk Belanja Rp. 38.600.944.500,- realisasi Rp.34.906.288.156,- capaian 90,43 % serta Belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan Belanja Tidak Langsung Rp. 4.094.239.000,- realisasi Rp. **3.521.377.692,-** capaian 86,00% sedangkan Belanja Langsung Rp. **34.506.705.500,-** realisasi Rp. **31.384.910.464,-** capaian 90,95 %.

d. Kelautan dan Perikanan

Perolehan capaian indikator kinerja utama terhadap sasaran selama tahun 2014 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan kategori sangat berhasil dan sasaran yang menunjukkan kategori berhasil. Berikut ini evaluasi dan analisis capaian indikator utama dari sasaran tahun 2014:

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja pertama yaitu produksi perikanan terhadap sasaran meningkatnya Ekspor Komoditas Perikanan memperlihatkan capaian sebesar 101,14 % dengan predikat sangat berhasil. Target produksi tahun 2014 sebesar 18.702,2 ton dengan realisasi produksi sebesar 18.914,9 ton. Produksi perikanan tersebut diperoleh dari hasil kegiatan budidaya dan tangkap dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.55
Kegiatan budidaya dan tangkap

No	Kegiatan	Volume (ton)
1	Penangkapan perikanan laut	16.075,01
2	Penangkapan perikanan perairan umum	1.245,75
3	Budidaya tambak	710,90
4	Budidaya laut	411,80
5	Budidaya kolam	311,63
6	Budidaya keramba	159,80
		18.914,89

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indiator kinerja :

Peningkatan hasil produksi perikanan tahun 2014 didukung oleh program pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan penangkapan dan budidaya ikan. Selain itu potensi produksi hasil perikanan masih dapat terus dikembangkan mengingat daya dukung sumberdaya alam yang besar dengan mengembangkan teknologi penangkapan dan budidaya dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam.

Hambatan/Masalah :

a. Armada penangkapan relatif kecil, sehingga daerah penangkapan sangat terbatas
b. Rendahnya pengetahuan /teknologi penangkapan ikan
c. Terbatasnya kesediaan benih lokal, khususnya benih ikan laut
d. Tingginya harga pakan
e. Terbatasnya akses permodalan
f. Rendahnya kultur kewirausahaan yang dimiliki pembudidaya

Strategi/Upaya Pemecahan :

Untuk meningkatkan produksi perikanan dilaksanakan melalui 3 program yaitu :

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, terdiri dari 6 kegiatan :

a. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
b. Peningkatan wawasan perikanan
c. Pengembangan budidaya perikanan laut dan payau
d. Pengembangan budidaya perikanan air tawar
e. Pengembangan balai benih ikan air tawar
f. Pengembangan balai benih ikan pantai

2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, terdiri dari 6 kegiatan :
   a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
   b. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
   c. Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap
   d. Pelatihan/bimbingan teknis teknologi penangkapan ikan
   e. Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan
3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Produksi, dengan 1 kegiatan yaitu:
   - Kegiatan Peningkatan produksi dan sarana prasarana perikanan (DAK)

Indikator Kinerja kedua yaitu konsumsi ikan memperlihatkan pencapaian 100,04 % dengan predikat sangat berhasil. Target konsumsi ikan tahun 2014 adalah 36,70 kg/kapita/tahun sedangkan realisasinya mencapai 36,72 kg/kapita/tahun.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja :

- Meningkatnya produksi perikanan sehingga ketersediaan ikan di pasar lokal dapat terjamin
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya makan ikan

Hambatan/Masalah :

Ketersediaan ikan untuk konsumsi tidak sekedar tersedia secara kuantitas tetapi juga memenuhi kualitas yang baik.

Strategi/Upaya Pemecahan :

Untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat dilaksanakan melalui program yaitu :

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan 4 kegiatan yaitu

a. Promosi potensi dan peluang usaha perikanan
b. Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
c. Pengembangan Pelayanan Usaha Perikanan
d. Bimbingan teknis pengolahan hasil perikanan

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama yaitu nilai tukar nelayan terhadap sasaran Peningkatan Kehidupan Nelayan memperlihatkan capaian sebesar 91,70 % dengan predikat sangat berhasil. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dan kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhannya. Target NTN tahun 2014 sebesar 111 namun baru bisa terealisasi sebesar 101,79 atau sebesar 98,25 % sehingga bisa disimpulkan bahwa nelayan Kabupaten Berau yang didominasi oleh nelayan skala kecil (menggunakan kapal di bawah 5 GT) produktivitasnya masih rendah namun masih bias ditingkatkan mengingat potensi sumberdaya perikanan yang masih berpeluang untuk pemanfaatannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja:
Dalam hal ini ada beberapa hal yang mempengaruhi yaitu musim, hasil tangkapan (produksi), biaya operasional nelayan, intensitas penangkapan oleh nelayan dan harga jual hasil tangkapan nelayan.
Hambatan/Masalah :
Hambatan yang umumnya masih dihadapi dalam upaya peningkatan nilai tukar nelayan adalah hasil tangkapan nelayan yang belum optimal ditambah biaya operasional yang masih cukup tinggi terutama biaya bahan bakar minyak.
Strategi/Upaya Pemecahan :
Upaya pemecahan yang penting dilakukan dalam upaya peningkatan kehidupan nelayan dengan indikator kinerjanya nilai tukar nelayan yaitu

peningkatan kemampuan nelayan agar dapat beroperasi lebih jauh lagi tidak hanya di daerah pantai yang memang telah cukup padat nelayan beroperasi, untuk itu sangat penting dilakukan pengembangan armada kapal nelayan yang lebih besar dan alat tangkap yang sesuai. Dengan strategi yang dilakukan tersebut diharapkan produksi hasil tangkapan meningkat dan tentunya sangat menentukan peningkatan kehidupan nelayan.

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja ke-4 yaitu jumlah ijin usaha yang diterbitkan terhadap sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas perijinan usaha perikanan memperlihatkan capaian sebesar 116.59 %. Dengan predikat sangat berhasil Pada tahun 2014 surat ijin usaha perikanan yang ditargetkan sebanyak 1459 buah dan realisasinya sebesar 1.701 buah. Surat ijin usaha perikanan tersebut terdiri dari :

- Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Kapal Perikanan sebanyak 45 buah
- Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya sebanyak 26 buah
- Surat Ijin Usah Perikanan (SIUP) Penampung sebanyak 76 buah
- Surat Ijin Kapal Perikanan (SIKPI) sebanyak 31 buah
- Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 145 buah
- Surat Pendaftaran Kapal Perikanan (SPKP) sebanyak 1281 buah
- Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA) sebanyak 30 buah
- Surat Keterangan Asal Ikan (SKA) sebanyak 67 buah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja:

a. Tingkat kesadaran masyarakat atau nelayan sudah mulai meningkat dilaksanakannya kegiatan sosialisasi peraturan perikanan di beberapa kampung atau kecamatan
b. Melakukan kegiatan penertiban izin usaha perikanan secara intensif di setiap kampung/sentra nelayan

c. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan atau patrol laut yang dilakukan oleh petugas perikanan sudah lebih intensif

Hambatan/Masalah :

1. Kurangnya petugas perikanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khususnya Wilayan III dan IV yaitu Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Biduk-Biduk dalam membantu melaksanakan kegiatan pelayanan izin usaha perikanan.
2. Khususnya untuk Surat Izin Usaha Perikanan dibidang Budidaya Tambak masih sangat rendah ini terkendala dalam hal status lahan tambak yang tidak memiliki sertifikat tanah atau surat dari pejabat resmi.

Strategi/Upaya Pemecahan :

1. Menempatkan petugas perikanan di Unit Pelaksana Teknis Daeran (UPTD) khususnya Wilayah III dan IV yaitu Kec. Talisayan dan Kec. Biduk-Biduk dalam membantu melaksanakan kegiatan pelayanan izin usaha perikanan.
2. Melakukan sosialisasi kepada petambak ikan atau udang dalam rangka syarat-syarat pembuatan izin usaha perikanan dan sertifikat lahan tambak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama ke-5 yaitu jumlah produk olahan hasil perikanan yang dipasarkan terhadap sasaran meningkatnya jumlah produk olahan perikanan memperlihatkan capaian sebesar 166,67 dengan predikat sangat berhasil. Beberapa jenis produk olahan hasil perikanan yang sudah dipasarkan di Kabupaten Berau sebanyak 18 jenis meliputi : ikan asin, udang papay, udang kering, kerang kering, teripang kering, teri kering, pari asap, terasi, kerupuk, amplang, abon, keripik ikan keju, bakso ikan, nugget, mpe-mpe, snack duri ikan lele, ikan lele asap, bandeng presto. Beberapa produk seperti kerupuk, amplang dan terasi sudah dipasarkan ke luar daerah Kabupaten Berau yaitu Bulungan, Samarinda dan Balikpapan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja:

a. Pembinaan dari pemerintah dalam hal ini KKP, DKP Provinsi Kaltim dan DKP Kabupaten Berau melalui kegiatan diversifikasi produk olahan dan bimbingan teknis teknologi pengolahan hasil perikanan kepada atau pelaku usaha perikanan.
b. Adanya sosialisasi Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan)
c. Tingginya motivasi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dalam berinovasi produk olahan hasil perikanan yang mana pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya pengolah hasil perikanan.
d. Peran media baik cetak dan elektronik yang menampilkan produk-produk olahan hasil perikanan yang sudah terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Berau.
e. Adanya bahan baku yang cukup tersedia.

Hambatan/Masalah :

a. Kurangnya modal usaha
b. Jangkauan pemasaran yang masih terbatas
c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai atau ketersediaan teknologi dalam hal ini mesin pengolah modern yang masih terbatas di Kabupaten Berau.
d. Pengemasan produk yang belum optimal, dikarenakan tidak adanya sarana dan pabrik kemasan yang memadai di Kabupaten Berau
e. Beberapa produk belum bersertifikasi

Strategi/Upaya Pemecahan :

a. DKP Kab. Berau memberikan paket bantuan alat pengolahan dan pemasaran melalui Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
b. DKP Kab. Berau mengakomodir usulan POKHLASAR dalam hal sarana dan prasarana pengolahan ke DKP Provinsi Kaltim dan KKP

c. Mengupayakan produk untuk masuk ke swalayan-swalayan dan melakukan promosi di ajang pameran/expo
d. Memberikan paket bantuan mesin pengemas kepada POKHLASAR
e. Menjajagi pengajuan tata cara sertifikasi produksi pangan olahan yang baik ke BPOM Samarinda.

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama ke-6 yaitu menurunnya tingkat pelanggaran terhadap sasaran menurunnya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan memperlihatkan capaian sebesar 100 % dengan predikat sangat berhasil. Realisasi menurunnya pelanggaran sesuai dengan target sebesar 20 %.

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama ke-7 yaitu meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengawasan terhadap sasaran menurunnya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan memperlihatkan capaian sebesar 114,94 % dengan predikat sangat berhasil. Realisasi jumlah masyarakat yang terlibat sebanyak 100 sedangkan jumlah yang ditargetkan sebesar 87 orang

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:

1. Meningkatnya peran serta partisipasi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) sumberdaya kelautan dan perikanan dalam membantu pengawasan baik pelaporan dan peran aktif di tingkat kampung/kecamatan dalam kegiatan perikanan.
2. Adanya dukungan kegiatan Pemerintah Pusat melalui Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan dukungan Pemerintah Propinsi Kaltim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal pembinaan pokmaswas, dukungan proses penyidikan, dukungan anggaran

dan peningkatan wawasan melalui bimtek dan sosialisasi, pembinaan pengawas perikanan dan lainnya.

3. Adanya dukungan dari TNI AL dan POLRI dalam mendukung personil dalam hal pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.
4. Dukungan kelompok pengelola Kawasan Konservasi dalam meningkatkan peran serta menjaga dan melindungi kawasan yang telah mereka tetapkan.

Hambatan/Masalah :

1. Luasnya wilayah pengawasan perairan laut dan umum Kab. Berau tidak didukung oleh personil yang memadai dan tidak adanya petugas perikanan yang menempati beberapa wilayah kerja di kecamatan wilayah selatan yang dianggap rawan
2. Biaya operasional masih belum mencukupi, terutama untuk pengawas perikanan yang berada di UPT. DKP Wilayah II
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar hukum khususnya di bidang usaha perikanan
4. Peraturan perikanan yang kadang penerapannya tidak sama antara satu daerah dengan yang lainnya.
5. Peraturan/Perundang-undangan yang sering berubah-ubah
6. Adanya oknum yang memperkeruh situasi
7. SDM pengawas perikanan masih minim
8. Pokmaswas masih pasif dan cenderung tidak berani melaporkan kegiatan destruktif kepada penegak hukum.

Strategi/Upaya Pemecahan :

1. Dilengkapi dengan personil paling tidak untuk kecamatan yang rawan kegiatan destruktif ada pengawas perikanan sesuai dengan luas wilayah dan beban kerjanya.

2. Biaya operasional ditingkatkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah pengawasan masing-masing.
3. Sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat untuk taat dan tunduk pada hukum lebih ditingkatkan, terutama kepada pelaku destruktif fishing karena merubah perilaku masyarakat bukanlah hal yang mudah, sehingga bentuk pembinaan dan sosialisasi harus tetap dilaksanakan.
4. Adanya kesesuaian peraturan yang berlaku di semua daerah yang tak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Adanya ketetapan hukum sehingga petugas dapat bertindak tegas di lapangan.
6. Lebih ditingkatkannya koordinasi lintas sektoral sehingga dapat menekan isu-isu dan hal-hal yang tidak diinginkan bersama seperti koordinasi dengan TNI-AL atau POLRI.
7. Mengikutsertakan dalam setiap kesempatan para staf pengawas perikanan dalam pelatihan dan diklat yang berkenaan dengan pengawas perikanan dan PPNS Bidang Perikanan, serta bimtek yang berkaitan tentang perikanan dan kelautan secara umum, karena lingkup pengawas perikanan mencakup semua bidang baik itu perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan/pemasaran.
8. Peningkatan peran serta kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) SDKP, karena pokmaswaslah yang merupakan ujung tombak kegiatan pengawasan yang langsung berada di tengah masyarakat.

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja ke-8 terbentuknya lembaga pengelola kawasan konservasi perairan terhadap sasaran meningkatnya penataan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan memperlihatkan capaian sebesar 200 %, pembentukan lembaga pengelola KKP yang ditargetkan sebesar 20 % tahun 2014 dan baru selesai di tahun 2015 ernyata terealisasi sebesar 40 % atau telah selesai tahun 2014 sehingga lembaga tersebut sudah bisa difungsikan pada tahun 2015. Hal ini

disebabkan karena sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Berau Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Bupati Berau Nomor 49 tahun 2009, tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau. Dimana pada Perbup No. 49 Tahun 2009 hanya memuat UPTD DKP Wilayah I (Kec. Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur dan Teluk Bayur), II (Kec. Pulau Derawan dan Maratua), III (Kecamatan Tabalar, Biatan dan Talisayan) dan IV (Kec. Batu Putih dan Biduk-Biduk) dengan tupoksi secara umum membantu Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat Lapangan.

Dengan telah dicadangkannya Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Taman Pesisir Kepulauan Derawan dengan SK Bupati Berau No. 516 tahun 2013 dan SK Bupati Berau Nomor 202 tahun 2014 tentang perubahan lampiran TPKD, dan untuk mendukung TPKD tersebut perlu segera dibentuk Lembaga Pengelola TPKD dalam bentuk UPTD. Pada Perbup No. 34 tahun 2014, menjadi 5 UPTD DKP, yaitu pada UPTD DKP II dipecah menjadi UPTD DKP Wilayah II (Kec. Pulau Derawan) dan UPTD DKP Wilayah III (Kec. Pulau Maratua), dengan pertimbangan karena pada masing-masing kecamatan tersebut, terdapat Zona Inti . sedangkan UPTD DKP Wilayah III menjadi UPTD DKP Wilayah IV dan UPTD DKP Wilayah IV menjadi UPTD DKP Wilayah V. karena mengakomodir TPKD, Pada masing-masing UPTD terdapat Zona Pemanfaatan Terbatas

Sesuai degan Perbup 34 tahun 2014, untuk tupoksi pada masing-masing UPTD selain tupoksi umum juga dimasukkan tupoksi secara khusus untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap zona yang ada pada masing-masing UPTD, sesuai dengan fungsi dari masing-masing zona.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja:

- Taman Pesisir Kepulauan Derawan
- Dukungan Pemerintah Kabupaten Berau
- Dukungan dari masyarakat

- Dukungan dari Mitra Kerja (NGO)

Hambatan/Masalah :

- Berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Kepala UPTD di tingkat Kabupaten /Kota hanya setingkat eselon IV , sehingga mempunyai kewenangan yang terbatas dalam mengelola TPKD, terutama dalam pemberian ijin.
- Kurangnya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pengelolaan TPKD
- Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan lembaga pengelola (UPTD)
- Keterbatasan Anggaran , karena UPTD belum mempunyai anggaran sendiri melalui DIPA, padahal secara struktural UPTD bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas

Strategi/Upaya Pemecahan :

- Kedepan akan coba dibentuk Balai Konservasi Taman Pesisir Kepulauan Derawan, yang diharapkan akan memiliki kewenangan penuh untuk pengelolaan TPKD
- Perlu adanya penambahan petugas pada masing-masing UPTD, yang ditempatkan pada masing-masing Kecamatan (terutama yang kecamatan yang masuk TPKD), yang diangkat secara kontrak dengan melibatkan warga setempat, karena kalau hanya mengandalkan pengangkatan CPNS belum dapat terakomodir, dan kalau yang diangkat bukan warga setempat dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena tidak memahami situasi dan kondisi di tempat tersebut.
- Untuk meningkatkan kualitas SDM DKP bekerjasama dengan mitra (NGO) akan mengadakan pelatihan tentang Konservasi dengan mendatangkan narasumber dari luar Berau di Tahun 2015

- Sapras untuk mendukung kegiatan UPTD, selain pondok jaga / kantor, juga perlu sarana pendukung lainnya, yang mungkin dapat diperoleh baik melalui APBD maupun APBN
- Dengan dibentuknya UPTD yang tupoksinya termasuk mengelola TPKD, sesuai dengan arahan Bapak Asisten IV (Drs. H. Syamsul Abidin) pada tanggal 22 September 2014, bahwa UPTD dapat mengajukan anggarannya sendiri sesuai dengan kebutuhannya dalam satu tahun dengan syarat harus ada SOP.

Pada tahun 2014 beberapa pencapaian keberhasilan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.56
Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Urusan	Tingkat	Nama Prestasi
1	Kelautan dan Perikanan	Propinsi Kaltim	Panji Kelautan dan Perikanan
2	Kelautan dan Perikanan	Propinsi Kaltim	Juara II Lomba Masak Serba Ikan
3	Kelautan dan Perikanan	Propinsi Kaltim	Juara III Lomba Masak Serba Ikan

Keuangan

Realisasi anggaran belanja tidak langsung dan langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau tahun 2014 adalah sebesar Rp. 23.266.846.000,00 atau sebesar 84,74 % yang dapat diuraikan sebagai berikut;

1. **Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung**

   Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau adalah sebesar Rp 5.116.627.970 atau sebesar 87,52 % dari anggarannya sebesar Rp 5.846.250.000. Anggaran dan realisasi belanja rutin tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut:

Tabel IV.57
Anggaran dan Realisasi Belanja Rutin Th. 2014

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
1	Belanja Pegawai	5.846.250.000,00	5.116.627.970	87,52
	JUMLAH	5.846.250.000,00	5.116.627.970	87,52

2. **Realisasi Anggaran Belanja Langsung**

   Pada tahun 2014, untuk melaksanakan 17 program 53 kegiatan, Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 17.420.596.000,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Berau. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2014 terealisasi sebesar Rp 14.600.186.056,- **(83,81%)**.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai unit ekonomi yang memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau yaitu dari Retribusi Hasil Perikanan, Retribusi Kapal > 5GT dan Pemanfaatan Aset Daerah. Capaian penerimaan PAD pada tahun 2014 sebesar Rp 233.534.200,- mengalami peningkatan sebesar 42,97 % dari tahun 2013 dengan PAD sebesar Rp. 163.342.600,-. Hal tersebut disumbang oleh pendapatan dari Pangkalan Pendapatan Ikan (PPI) dan Balai Benih Ikan (BBI)

Tabel IV.58
Perkembangan PAD Thn. 2012 s.d 2014

e. Urusan Perdagangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian salah satunya adalah dalam rangka upaya tersedianya barang dan jasa pokok kebutuhan masyarakat. Ketersediaan barang kebutuhan pokok harus pula diringi dengan upaya perlindungan konsumen sebagai pengguna langsung barang tersebut tahun 2014, Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2014 antara lain :

1. Terciptanya kawasan perdagangan di 4 kecamatan

   Indikator pada sasaran ini terdiri 5 indikator yang akan dijelaskan sebagai berikut :

   a. Tertatanya kawasan pusat perdagangan dengan target 1 kawasan, realisasi pencapaian sesuai target yaitu 1 kawasan sebagai pusat perdagangan yang dalam hal ini adalah Pasar Sanggam Adji Dilayas. Keberhasilan ini disebabkan telah tersedianya pasar yang representatif dengan tempat/kios berdagang cukup untuk mengakomodir pedagang yang ada
   b. Pembangunan pusat informasi (bisnis center) untuk promosi dan pemasaran komoditi, target tidak ada

c. Pembangunan unit post tera ulang, target tidak ada
d. Penataan PKL sebanyak 200 orang, realisasi pencapaian sesuai target sebanyak 200 PKL telah tertata dengan dipindahkan ke Pasar Sanggam Adji Dilayas
e. Terwujudnya kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar sebesar 100%, realisasi pencapaian 100% artinya kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar dapat terwujud dikarenakan telah tersedianya tenaga teknis harian lepas yang bertanggungjawab menciptakan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar

2. Meningkatnya produktivitas dan peran serta UKM pada pameran

   Indikator pada sasaran ini adalah meningkatnya omset penjualan produk melalui pemasaran sebesar Rp 300.000.000. Realisasi pencapaiannya adalah sebesar Rp. 450.000.000 atau sebesar 150 persen. Target capaian ini dapat terpenuhi sesuai harapan, hal ini dapat direalisasikan karena Anggaran Dana yang tersedia untuk mengikuti Event promosi yang dilaksanakan baik dalam kabupaten, propinsi dan tingkat Nasional, namun disadari bahwa keikutsertaan para pelaku UKM dalam Event Promosi di luar Kabupaten berau terbatas sehingga penjualan produk terbatas. Dari data laporan pelaksanaan Even yang dilaksanakan di Kabupaten Berau melalui Berau Expo rata-rata omset penjualan per UKM mencapai Rp. 12.000.000,- yang diikuti oleh 30 peserta UKM yang berati total omset penjualan pada Even Promosi Berau Expo sebesar Rp. 360.000.000,- karena itu perlu menyiapkan anggaran dana peserta UKM untuk mengikuti Event promosi yang ada di luar Kabupaten atau tingkat Nasional.

3. Tersebarnya informasi etika usaha pada 50 KUKM

   Indikatornya adalah masyarakat memahami informasi etika usaha/tertib usaha dengan targetnya sebanyak 50 KUKM. Realisasi ditahun 2014 sebanyak 150 KUKM memperoleh informasi etika usaha melalui pembinaan yang dilakukan aparat Dinas Koperindag Kabupaten Berau

khususnya aparat Bidang Pemberdayaan UMKM. Realisasi tersebut melampau i target yaitu sebesar 300 persen, hal ini dapat terjadi oleh karena telah melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan UMKM antara lain adalah menginformasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang Undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dan Kebijakan Indagkop terkait pembinaan langsungan ke lapangan baik dalam bentuk pelatihan maupun dengan tatap muka temu usaha kepada para pelaku Usaha Kecil Menengah.

4. Tersebarnya informasi harga pada 13 kecamatan

   Indikator sasaran ini adalah dimanfaatkannya informasi harga oleh masyarakat dengan target capaian 100%. Pada indikator ini realisasi pencapaiannya adalah sebesar 77% hal ini dikarenakan terbatasnya dana dalam anggaran tahun 2014 sehingga kegiatan jaringan informasi hanya mencapai 10 kecamatan dari 13 kecamatan yang ditargetkan

5. Terciptanya tertib hukum niaga, ukur bagi pelaku usaha dan konsumen 5% per tahun

   Indikator sasaran ini terdiri dari :

   a. Terlindunginya hak-hak konsumen dengan target capaian 80%, di tahun 2014, terealisasi 85% sehingga memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 80% namun realisasinya belum mencakup seluruh kecamatan
   b. Terawasinya barang dan jasa yang beredar dengan target capaian 6 jenis barang dan jasa beredar terawasi, realisasi pencapaiannya 6 jenis barang dan jasa yang beredar dapat diawasi dikarenakan adanya tim yang dibentuk oleh Bupati untuk secara rutin melakukan pengawasan
   c. Meningkatnya sadar hukum untuk memiliki legalitas usaha dengan target capaian ijin SIUP 1600 perusahaan, TDP 1600 perusahaan, TDI 10 perusahaan, IUI 2 perusahaan dan Badan Hukum Koperasi 15. Di

tahun 2014 masing-masing ijin realisasi pencapaiannya adalah SIUP 1336 perusahaan atau 83,5%, TDP 1391 perusahaan atau 86,94, TDI 20 perusahaan atau 200%, IUI 1 perusahaan atau 50% dan Badan Hukum Koperasi 27 Badan Hukum yang diterbitkan. Secara umum, dari 5 ijin tersebut 2 diantaranya mencapai target yann ditetapkan. Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran para pelaku usaha IKM dan koperasi akan pentingnya legalitas usaha sebagai hasil efektifnya pembinaan yang dilakukan apparat Dinas Koperindag Kab. Berau. Adapun 3 ijin yang belum mencapai target disebabkan belum terjangkaunya pembinaan ke 13 kecamatan hal ini disebabkan masih terbatasnya dana untuk mendukung kegiatan tersebut. Selain itu untuk Ijin Usaha Industri (IUI) belum mencapai target dikarenakan pertumbuhan industri di Kabupaten Berau masih berskala industri kecil, sedangkan IUI lebih dikhususkan untuk ijin usaha industri yang berskala besar.

f. Perindustrian

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Urusan perindustrian yang juga dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, pada tahun 2014, realisasi capaian kinerja adalah :

Terciptanya unit usaha industri yang kuat sebanyak 50 unit per tahun

Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator. Indikator pertama adalah pengusaha/ IKM dapat menerapkan antara lain teknologi tepat guna, GKM, Sertifikasi halal, standardisasi dan desain kemasan sejumlah 160 unit IKM. Pada indikator ini, realisasi pencapaiannya sebanyak 57 unit IKM atau 35,63%. Indikator kedua yaitu penyerapan tenaga kerja sejumlah 800 orang. Realisasi pencapaian pada indikator kedua sejumlah 103 orang dari 800 orang yang ditargetkan atau

sebesar 12,88%. Kecilnya realisasi pencapaian target secara umum disebabkan adanya kesalahan dalam penetapan target

g. Urusan Pariwisata

Untuk mewujudkan sektor pariwisata di Kabupaten Berau menjadi sektor andalan yang mampu menunjang pembangunan ekonomi maka diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap kepariwisataan.

"Tersedianya informasi mengenai kepariwisataan Berau"

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Tersedianya informasi mengenai kepariwisataan Berau dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah sumber dan media informasi pemasaran pariwisata Kab. Berau memperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 76,56 % dengan predikat ***Berhasil.***

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Tersedianya Informasi Potensi Pariwisata Unggulan Kabupaten Berau berupa leaflet, booklet, Brosur , LED Display screen,Banner 3 Dimensi , media TV Bandara Sultan Adji Muhammad Sulaeman Sepinggan Balikpapan, TV Bandara Soekarno Hatta dan TV Bandara Hang Nadim Batam.
2. Berperan serta secara aktif dalam berbagai event pameran promosi pariwisata di Luar Kabupaten Berau seperti :
    - Kemilau Expo dan Kaltim Expo dan di Kota Samarinda,
    - Balikpapan Fair di Kota Balikpapan
    - Gebyar Wisata Bahana Nusantara di Jakarta,
    - Pameran MTF di Surabaya,
    - Pameran ICTE di Yogyakarta,
    - Exotica Borneo di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta
    - Inafact di Makassar
    - Bali, Marine and Ecotourism di Bali
    - Gelar Wisata dan Budaya di Batam dan

- Hari Nusantara Tahun 2014 di Kota Baru Kalimantan Selatan

3. Penyediaan Tenaga Pramuwisata Terlatih yang ditempatkan di Ruang Kedatangan Bandara Udara Kalimarau untuk memberikan informasi tentang obyek wisata unggulan Kabupaten Berau kepada para Wisatawan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
4. Tersedianya media promosi wisata Kabupaten Berau dengan menyediakan database daerah tujuan wisata unggulan dengan sistem VR 360 derajat.

Pencapaian Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program ini didukung dengan melaksanakan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut yaitu :
   a) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata;
   b) Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri.

Program-program tersebut terlaksana dengan realisasi dukungan dana Rp. 2.425.040,974,00 (76,56%) dari target Rp.3.167.307.000,00 sehingga daya dukung terhadap pencapaian kinerja sasaran sangat signifikan.

Hambatan/Masalah :

Disamping keberhasilan capaian sasaran kinerja seperti diuraikan diatas, juga masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

a) Kegiatan Pameran di Padang tidak terlaksana karena adanya perubahan Lokasi di daerah lain sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan pergeseran lokus kegiatan sesuai dengan perencanaan.
b) Pada Tahun 2014 Belum tersedia Portal Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena adanya kenaikan harga di pasaran.

Strategi/pemecahan masalah :

a) Promosi Wisata Kabupaten Berau untuk tahun-tahun mendatang akan lebih diefektifkan dengan cukup mengikuti event pameran di daerah

yang merupakan pusat kunjungan wisatawan dunia seperti Jakarta, Bali dan Batam serta event pameran pariwisata yang diselenggarakan di Samarinda atau Balikpapan.

b) Pembangunan Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau harus diprioritaskan.

"Meningkatnya Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata"

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah Prosentase pencapaian realisasi penyelesaian kegiatan dan penyerapan anggaran memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 82,64 % dengan predikat ***Sangat Berhasil.***

Hambatan/masalah :

Belum optimalnya pelaporan progres realisasi fisik kegiatan

Strategi/upaya pemecahan :

Meningkatkan intensitas review laporan kemajuan fisik kegiatan

"Bertambahnya sumber dan potensi obyek wisata"

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran bertambahnya sumber dan potensi obyek wisata dengan indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah sumber dan obyek wisata baru memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 68,18 % dengan predikat ***cukup berhasil***

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana obyek wisata unggulan di Kabupaten Berau seperti tersedianya kano/perahu pada obyek wisata Labuan Cermin Kecamatan Biduk-biduk sebanyak 2 buah, tersedianya Fasilitas Toilet dan Ruang Ganti bagi pengunjung di Obyek Wisata Air Panas Asin Pemapak Kecamatan Biatan serta untuk memperindah Kota Tanjung Redeb juga dilakukan Rehab terhadap Gerbang Kota Tanjung

Redeb yang terletak di Jalan Gatot Subroto. Disamping itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau juga menyedian 1 (satu) unit Speed Boat wisata yang telah ditingkatkan kapasitas mesinnya pada Tahun 2014 untuk menunjang pengembangan sektor Pariwisata di Kabupaten Berau.

2. Untuk keperluan pengembangan, Obyek Wisata Air Panas Asin Pemapak yang berlokasi di Kecamatan Biatan telah dilakukan penelitian dan uji kelayakan dengan bekerjasama dengan ITB Bandung dan Obyek wisata hutan Kota Tangap di Kecamatan Teluk Bayur telah tersedia Design and Detail Engginering (DED).
3. Disamping itu Kabupaten Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus berupaya menggali sumber dan potensi obyek wisata baru yang memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata dunia seperti Obyek Wisata Pantai Talisayan, Obyek Wisata Alam dan Petualangan Sungai Nyadeng dan Goa Prasejarah di Merabu Kecamatan Kelay.

Kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan realisasi dukungan dana Rp. 1.926.517.100,00 (68,18%) dari target sebesar Rp.2.825.443.000,00.

Hambatan/masalah :

Rendahnya realisasi pencapaian sasaran kinerja tersebut disebabkan oleh adanya beberapa paket pekerjaan yang tidak terealisasi sebagai berikut:

a) Perencanaan Tracking yang berlokasi di Labuan Cermin yang tidak bisa dilaksanakan karena sudah ada DED yang dilaksanakan pada Tahun 2013
b) Perencanaan Dermaga Apung yang berlokasi di Labuan Cermin yang tidak bisa dilaksanakan sudah ada di DED yang dilaksanakan pada Tahun 2013.
c) Pengadaan Gapura Wisata yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Redeb tidak dapat dilaksanakan karena anggaran tidak mencukupi.

d) Pembangunan Dermaga Apung yang berlokasi di Pulau Derawan tidak terlaksana karena gagal lelang dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.
e) Pembuatan Masterplan Pantai Talisayan yang berlokasi di Kecamatan Talisayan dan tidak dilaksanakan karena anggaran tidak mencukupi.
f) Pembuatan DED Kawasan Wisata Air Panas Biatan yang berlokasi di Kecamatan Biatan tidak dilaksanakan karena anggaran tidak mencukupi.

Strategi/Upaya Pemecahan :

Perlunya penyusunan Masterplan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Berau

h. Urusan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Urusan transmigrasi untuk tahun 2014 telah diprogramkan sebegai berikut :

1. Program pengembangan wil. Transmigrasi
   - Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
2. Program Pengembangan masyarakat dan kawasan Transmigrasi
   - Pelatihan pengelola koperasi daerah transmigrasi se kabupaten berau
   - Sosialisasi PP no 3 tahun 2014 tentang ketransmigrasian

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program kegiatan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh SKP di lingkungan Kabupaten Berau secara umum sama dengan permasalahan yang terjadi di urusan wajib. Solusi yang direkomendasikanpun juga secara umum sama dengan solusi urusan pilihan.

Prestasi Yang Dicapai Kabupaten Berau Tahun 2014

Selama tahun 2014 banyak prestasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Berau. Prestasi tersebut merupakan bentuk keberhasilan kinerja dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Berau bersama sama dengan masyarakat dalam membangun daerah Kabupaten Berau. Adapun prestasi yang diperoleh oleh Kabupaten Berau selama tahun 2014 adalah;

a) Tingkat Nasional

1. Juara pertama penghargaan inovasi menejemen perkotaan bidang pelayanan perkotaan kepada Pemerintah Kabupaten Berau bidang Pengelolaan Pasar Tradisional dengan kategori sangat baik oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Anugrah Apresiasi Pendidikan Islam (API) dari Kementrian Agama Republik Indonesia.
3. Penghargaan Zakat Award dari Badan Zakat Nasional.

b) Panji yang di raih

1. Panji Keberhasilan Pembangunan di Bidang Keolahragaan
2. Panji Keberhasilan pembangunan di Bidang tata kelola kearsipan
3. Panji Keberhasilan pembangunan di bidang pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa
4. Panji Keberhasilan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan
5. Panji Keberhasilan pembangunan di bidang pariwisata kategori kabupaten
6. Panji Keberhasilan pembangunan di bidang laporan penyelnggaraan pemerintah kabupaten kategori kabupaten

c) Prestasi Tingkat Provinsi

1. Juara Pertama perlombaan desa/kampung dan penilaian Kepala Desa/Kepala Kampung berprestasi Tingkat Propinsi Kalimantan Timur.
2. Terbaik II dalam keberhasilan bidang Penyuluhan
3. Terbaik II dalam keberhasilan bidang perekonomian

4. Terbaik II dalam keberhasilan bidang perkebunan
5. Terbaik II dalam keberhasilan bidang tanaman pangan
6. Terbaik II dalam keberhasilan bidang ketenaga kerjaan
7. Terbaik III dalam keberhasilan bidang kebudayaan kategori kabupaten
8. Terbaik III dalam keberhasilan bidang pembangunan perpustakaan dan minat baca
9. Terbaik III dalam keberhasilan bidang kesehatan
10. Terbaik III dalam keberhasilan bidang kepemudaan
11. Terbaik III dalam keberhasilan bidang industri
12. Terbaik III dalam keberhasilan bidang pembangunan hukum dan HAM
13. Terbaik III dalam keberhasilan bidang keterlibatan informasi publik
14. Terbaik III dalam keberhasilan bidang pengembangan peternakan
15. Terbaik III dalam keberhasilan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

d) Prestasi Lain-Lain

- Juara satu perlombaan dan penilaian kepala desa/kampung berprestasi tingkat propinsi Kalimantan Timur an. Madri Pani, SE.
- Penghargaan Lencana Melati yang merupakan penghargaan tertinggi kedua dalam kepramukaan di Tanah Air. Yang diserahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada puncak peringatan Hari Jadi Pramuka ke-53 di Lapangan Utama Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur Jakarta